KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Jambi Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Laporan ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan, karena dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja.

Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas instansi.

Dalam penyusunan laporan ini telah dilakukan berbagai upaya agar dapat menghasilkan suatu laporan yang baik, namun demikian kesemuanya tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan, untuk kesempurnaan laporan ini. Mudah-mudahan dengan laporan ini dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus untuk memacu peningkatan kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi di masa mendatang.

Jambi, Maret 2021

WALIKOTA JAMBI

H. SYARIF FASHA, ME

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pelaksanaan anggaran berbasiskan kinerja, serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, maka laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) harus dibuat oleh setiap daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Jambi melaksanakan 4 (Empat) Prioritas Pembangunan, 11 (Sebelas) tujuan pembangunan dan 22 (Dua Puluh Dua) sasaran pembangunan, 37 (tiga puluh tujuh) Strategi Pembangunan dan 48 (Empat puluh delapan) Arah Kebijakan serta 34 (Tiga Puluh Empat) Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 1.828.835.334.125,00 terealisasi sebesar Rp. 1.667.849.788.841,45 (90,98%)

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan diperoleh capaian target Indikator Kinerja Utama sebesar **76,47%** masuk dalam kategori capaian **SANGAT TINGGI, 5,88%** masuk dalam kategori capaian **SEDANG** dan **20,59%** tidak bisa dievaluasi. Hasil ini menunjukkan bahwa bahwa Pemerintah Kota Jambi secara keseluruhan berhasil melaksanakan visi dan misi Kota Jambi.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Jambi ke depan. *Yaitu*, masih rendahnya realisasi investasi dan persentase daya saing produk IKM yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 pada tahun 2020. hal ini menjadi perhatian bukan hanya bagi Pemerintah Kota Jambi tetapi juga menjadi perhatian secara nasional maupun internasional, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemda Kota Jambi dengan berbagai unsur baik di wilayah Kota Jambi, daerah yang berbatasan dengan Kota Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah, khususnya pihak pelaku usaha.

Koordinasi dan sinergi yang lebih optimal diharapkan bisa memberi jawaban untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan berbagai pihak, dalam beragam cara sesuai dengan kompetensi dan tugas fungsi masing-masing, berorientasi kepada pencapaian tujuan yang sama.

Pemerintah Kota Jambi senantiasa akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*).

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :
1. *Latar Belakang*
2. *Maksud dan Tujuan*
3. *Gambaran Umum Daerah*
4. *Permasalahan Pembangunan*
5. *Dasar Hukum*
6. *Sistematika Penyusunan LKj 2020*

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat dari setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj**) merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa mendatang dan juga merupakan wadah atau laporan kinerja instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja disajikan dengan menguraikan capaian kinerja sasaran dengan melakukan perbandingan antara indikator kinerja pada target sasaran dengan realisasinya. Dengan pembandingan ini dapat dilihat sejauh mana Pemerintah Kota Jambi dapat mewujudkan sasaran strategi

yang telah ditetapkan serta dapat memperlihatkan manfaat yang telah diberikan organisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Selain itu, LKj juga melakukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dengan evaluasi internal ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja di masa depan. Kinerja merupakan gambaran mengenai seberapa jauh keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Pemda Kota Jambi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemda Kota Jambi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses

evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.3.1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pesako Betuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur.

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas indikatif Kota Jambi adalah 169.88,67 Km^2 yang terdiri dari:

a) Kecamatan Kotabaru = 29,937 Km^2 (17,62%)
b) Kecamatan Alam Barajo = 36,909 Km^2 (21,73%)
c) Kecamatan Jambi Selatan = 12,267 Km^2 (7,22%)

d) Kecamatan Paal Merah = 19,571 Km^2 (11,52%)
e) Kecamatan Jelutung = 7,617 Km^2 (4,48%)
f) Kecamatan Pasar Jambi = 1,670 Km^2 (0,98%)
g) Kecamatan Telanaipura = 16,822 Km^2 (9,90%)
h) Kecamatan Danau Sipin = 7,278 Km^2 (4,28%)
i) Kecamatan Danau Teluk = 13,444 Km^2 (7,91%)
j) Kecamatan Pelayangan = 10,689 Km^2 (6,29%)
k) Kecamatan Jambi Timur = 13,684 Km^2 (8,05%)

Perubahan luasan diatas menjadi salah satu dasar Pemerintah Kota Jambi untuk merevisi Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi diatas. Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 01030^{0,}2,98" – 01040'1,07" LS sampai 10340'1,67" – 10340'0,22" BT. Berdasarkan data DEM Nasional, wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian rata-rata 10 – 60 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Danau Sipin, Pelayangan dn Danau Teluk berada pada ketinggian 0 - 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, Paal Merah, Alam Barajo dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut. Secara umum kondisi topografi Kota Jambi disajikan sebagai berikut:

Topografi	Kemiringan	Persentase(%)
Datar	0-8	61,529%
Landai	8-15	28,570%
Agak curam	15-25	8,599%
Curam	25-45	1,302%

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat). Keadaan iklim rata-rata Kota Jambi dalam kurun waktu tahun

2020 terlihat cukup berfluktuasi. Suhu rata-rata terendah berkisar 26,5 °C sampai 27,2 °C dengan suhu maksimum 34,4 °C yang terjadi pada bulan Januari dan suhu minimum 21,5 °C terjadi pada bulan Februari dan Juni. Curah hujan tahun 2020 beragam antara berkisar 55 mm/tahun dan tertinggi berkisar 298 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 15 hari sampai 25 hari perbulannya. Sedangkan kecepatan angin tiap bulannya hampir merata antara 3 knots hingga 8 knots dan kelembaban udara berkisar 82%-88%.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Jambi

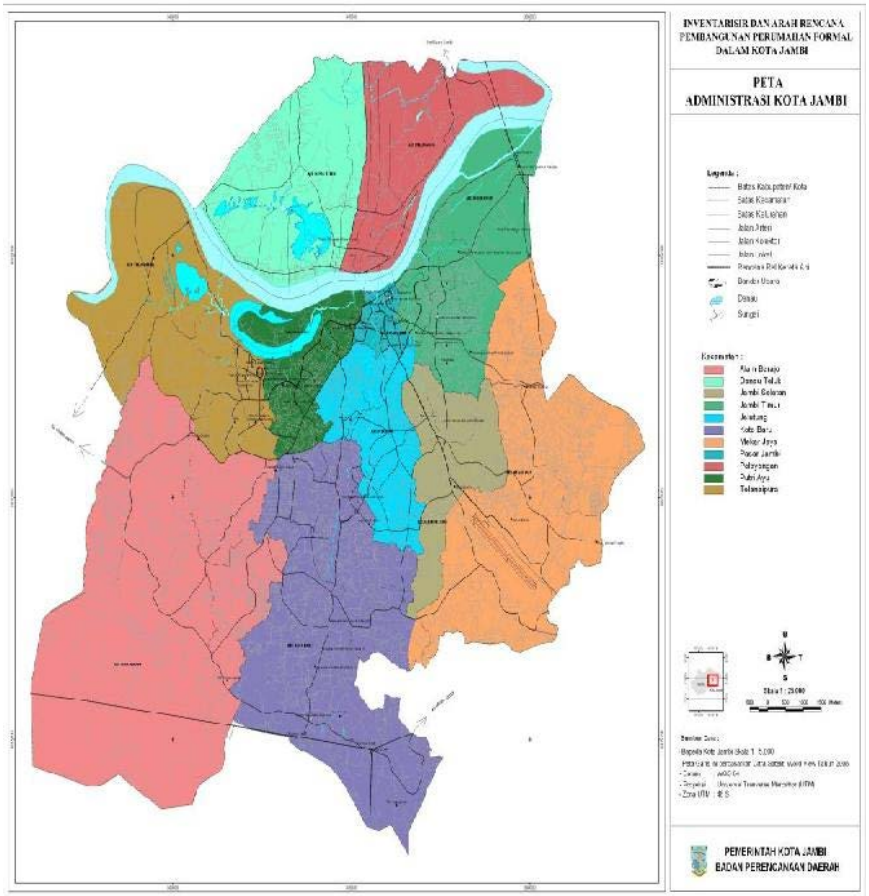

Sumber : BPS Kota Jambi 2020.

1.3.2. Gambaran Umum Demografi

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan hasil Registrasi Penduduk 2018 penduduk Kota Jambi tercatat 599.103 jiwa. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2018 maka kepadatan per Km^2 menurut Kecamatan adalah:

a) Kecamatan Kotabaru = 78.620 jiwa/Km^2
b) Kecamatan Alam Barajo = 101.305 jiwa/Km^2
c) Kecamatan Jambi Selatan = 62.907 jiwa/Km^2
d) Kecamatan Paal Merah = 91.383 jiwa/Km^2
e) Kecamatan Jelutung = 64.213 jiwa/Km^2

f) Kecamatan Pasar Jambi = 12.465 jiwa/Km^2
g) Kecamatan Telanaipura = 51.451 jiwa/Km^2
h) Kecamatan Danau Sipin = 49.152 jiwa/Km^2
i) Kecamatan Danau Teluk = 12.160 jiwa/Km^2
j) Kecamatan Pelayangan = 13.803 jiwa/Km^2
k) Kecamatan Jambi Timur = 67.234 jiwa/Km^2

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan *(sex ratio: 101).* Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel.1.1
Jumlah Penduduk Kota Jambi
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017, 2018 dan 2019

NO	PENDUDUK	JUMLAH		
		2017	2018	2019
1	Laki-Laki	297.036	300.775	303.818
2	Perempuan	294.098	297.537	300.920
Jumlah		**591.134**	**598.103**	**604.738**
Sex Ratio		**101,00**	**101,02**	**101,00**

Sumber : Diolah dari Kota Jambi Dalam Angka 2017, 2018 dan 2019

Tingkat kepadatan penduduk Kota Jambi secara rata-rata berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Jambi masih tergolong jarang. Namun tingkat kepadatan penduduk untuk kawasan perkotaan sudah tergolong cukup padat. Pada Tahun 2019 Tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kota Jambi adalah 2.944 jiwa/km^2.

Dari aspek ketenagakerjaan, persentase pekerjaan penduduk Kota Jambi yang berusia diatas 15 tahun adalah:

1	Pertanian.....	3,61%
2	Manufaktur	19%
3	Jasa	77,39%

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2020

Sedangkan berdasarkan status pekerjaan utama penduduk Kota Jambi yang berusia di atas 15 tahun adalah:

1	Buruh/Karyawan/Pegawai.....	60,77%
2	Pekerja Berusaha Sendiri.....	19,54%
3	Pekerja Bebas di Sektor Pertanian.....	0,16%

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2020

Jumlah pencari kerja terdaftar sepanjang tahun 2019 mencapai 5.102 orang, tabel berikut adalah rincian pencari kerja terdaftar menurut jenis kelamin di Kota Jambi.

Tabel 1.2.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar

Dirinci menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Bulan	Pencari Kerja Terdaftar		Penempatan Tenaga Kerja		Persentase
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Januari	230	306	120	95	40,11
2	Februari	147	46	47	31	40,41
3	Maret	258	160	118	50	40,19
4	April	121	104	54	36	40,00
5	Mei	200	200	97	65	40,50
6	Juni	457	301	185	129	41,42
7	Juli	241	134	82	75	41,87
8	Agustus	172	116	62	58	41,67
9	September	316	158	112	80	40,51
10	Oktober	180	126	74	50	40,52
11	Nopember	233	159	84	74	40,31
12	Desember	119	70	46	30	40,21
	JUMLAH	3.041	2.061	1.171	985	42,26

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2020

1.3.3. Kelembagaan Pemerintah

1.3.3.1. *Tugas Pokok dan Fungsi*

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Jambi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Jambi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bidang pemerintahan meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Walikota Jambi dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Selain itu, prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan pengembangan peran serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperluas. Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melalui pertanggungjawaban Walikota Jambi kepada DPRD.

1.3.3.2. *Struktur Organisasi*

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sampai saat ini Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Struktur Organisasi yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi dimaksud di atas, jumlah organisasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 14 (empat belas) Lembaga Teknis Daerah, 15 (lima belas) Dinas, 11 (sebelas) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

a. Sekretariat

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

b. Inspektorat

c. Dinas Daerah

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15. Dinas Pemuda dan Olah Raga
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20. Satuan Polisi Pamong Praja

d. Badan Daerah

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Kecamatan

1. Kecamatan Pasar
2. Kecamatan Telanaipura
3. Kecamatan Jambi Timur
4. Kecamatan Jambi Selatan
5. Kecamatan Jelutung

6. Kecamatan Kota Baru
7. Kecamatan Danau Teluk
8. Kecamatan Pelayangan
9. Kecamatan Danau Sipin
10. Kecamatan Paal Merah
11. Kecamatan Alam Barajo

f. Kelurahan

1. Kecamatan Pasar
   a. Kelurahan Pasar
   b. Kelurahan Orang Kayo Hitam
   c. Kelurahan Beringin
   d. Kelurahan Sungai Asam
2. Kecamatan Telanaipura
   a. Kelurahan Telanaipura
   b. Kelurahan Simpang IV Sipin
   c. Kelurahan Teluk Kenali
   d. Kelurahan Buluran Kenali
   e. Kelurahan Penyengat Rendah f. Kelurahan Pematang Sulur
3. Kecamatan Jambi Timur
   a. Kelurahan Tanjung Sari
   b. Kelurahan Tanjung Pinang
   c. Kelurahan Rajawali
   d. Kelurahan Talang Banjar
   e. Kelurahan Sijenjang
   f. Kelurahan Budiman
   g. Kelurahan Kasang
   h. Kelurahan Sulanjana

i. Kelurahan Kasang Jaya

4. Kecamatan Jambi Selatan
   a. Kelurahan The Hok
   b. Kelurahan Pasir Putih
   c. Kelurahan Pakuan Baru
   d. Kelurahan Tambak Sari
   e. Kelurahan Wijayapura
5. Kecamatan Jelutung
   a. Kelurahan Jelutung
   b. Kelurahan Payo Lebar
   c. Kelurahan Lebak Bandung
   d. Kelurahan Kebun Handil
   e. Kelurahan Talang Jauh
   f. Kelurahan Cempaka Putih
   g. Kelurahan Handil Jaya
6. Kecamatan Kota Baru
   a. Kelurahan Paal Lima
   b. Kelurahan Suka Karya
   c. Kelurahan Kenali Asam Atas
   d. Kelurahan Kenali Asam Bawah
   e. Kelurahan Simpang III Sipin
7. Kecamatan Danau Teluk
   a. Kelurahan Olak Kemang
   b. Kelurahan Ulu Gedong
   c. Kelurahan Pasir Panjang
   d. Kelurahan Tanjung Raden
   e. Kelurahan Tanjung Pasir
8. Kecamatan Pelayangan

a. Kelurahan Tengah
b. Kelurahan Jelmu
c. Kelurahan Arab Melayu
d. Kelurahan Mudung Laut
e. Kelurahan Tahtul Yaman
f. Kelurahan Tanjung Johor

9. Kecamatan Paal Merah
   a. Kelurahan Eka Jaya
   b. Kelurahan Lingkar Selatan
   c. Kelurahan Paal Merah
   d. Kelurahan Talang Bakung
   e. Kelurahan Payo Silincah
10. Kecamatan Alam Barajo
   a. Kelurahan Bagan Pete
   b. Kelurahan Beliung
   c. Kelurahan Kenali Besar
   d. Kelurahan Mayang Mangurai
   e. Kelurahan Rawasari
11. Kecamatan Danau Sipin
   a. Kelurahan Legok
   b. Kelurahan Murni
   c. Kelurahan Selamat
   d. Kelurahan Solok Sipin
   e. Kelurahan Sungai Putri

Kelembagaan pemerintah daerah tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah dan diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam membangun daerah demi

terwujudnya pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah.

1.3.4. Kondisi Ekonomi Daerah

1.3.4.1. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi tahun 2019 mencapai 5,33 persen sedangkan tahun 2018 mencapai 5,26 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Sektor perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 31,48 persen, untuk kategori ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,75 persen (2018). Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami pertumbuhan tetap sebesar 0,22 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam setahun. PDRB Kota Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2019 sebesar 30.855,90 Milyar Rupiah, lebih dari seperempat disumbang oleh sektor perdagangan. Penyumbang kedua terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan, dan penyumbang ketiga terbesar sektor industri pengolahan.

Jika ditinjau menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi Tahun 2019 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 9.712.778,1, Transportasi dan pergudangan sebesar Rp. 3.707.783,4, Industri pengolahan sebesar Rp. 3.112.496,3, konstruksi sebesar Rp. 2.801.840,3, Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 1.436.661,6, Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp. 735.067,0, Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 548.011,4, Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 341.076,1, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp. 83.912,4, Pengadaan listrik dan gas sebesar Rp. 66.741,9.

Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi
Tahun 2016-2019

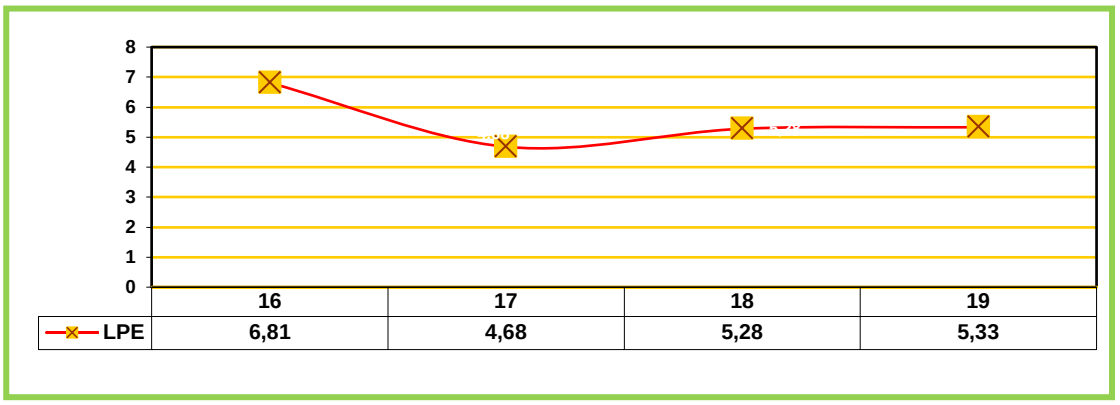

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2020

Tabel berikut mengambarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi menurut lapangan Usaha Tahun 2015- 2017 berdasarkan harga konstan.

Tabel 1.3.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi

(Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2015-2018

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	187.682,2	194.162,7	190.877,4
2.	Pertambangan dan Penggalian	418.285,0	432.125,5	425.967,3
3.	Industri Pengolahan	2.124.292,0	2.205.317,96	2.272.932,0
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	31.726,2	33.645,42	35.614,5
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.958,3	46.128,08	46.497,1

6.	Konstruksi	1.703.565,8	1.809.482,75	1.943.292,0
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.784.479,7	5.120.193,44	5.505.779,5
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.398.293,7	2.516.596,96	2.530.301,1
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	415.165,6	447.018,75	476.257,5
10.	Informasi dan Komunikasi	900.356,3	974.847,84	1.037.678,2
11.	Jasa Perusahaan	504.519,6	531.246,64	558.898,5
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.282.749,4	1.341.765,85	1.402.197,4
13.	Jasa Pendidikan	805.599,0	858.388,97	924.883,4
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	457.497,0	486.044,97	534.364,8
15.	Jasa Lainnya	139.239,0	148.782,67	155.351,3
	PDRB	**17.728.338,8**	**18.699.511,01**	**19.655.785,3**

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2020

1.3.4.2. *Struktur Ekonomi*

Struktur perekonomian masyarakat Kota Jambi pada kurun waktu 2016-2018 didominasi sektor Sekunder dan Tersier. Besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2018, kontribusi tertinggi diperoleh dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.896.456,54, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 3.625.367,87, Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.998.229,47, dan Sektor Bangunan sebesar Rp. 2.554.035,85.

Sedangkan 4 sektor yang memberikan kontribusi terendah berturut-

turut adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp. 61.123,55, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 71.414,78, Sektor Jasa Lainnya sebesar Rp. 199.918,84 dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 40.031,48.

Gambar 1.3

Struktur Perekonomian Kota Jambi Tahun 2019

Berdasarkan *harga konstan* Tahun 2016-2019

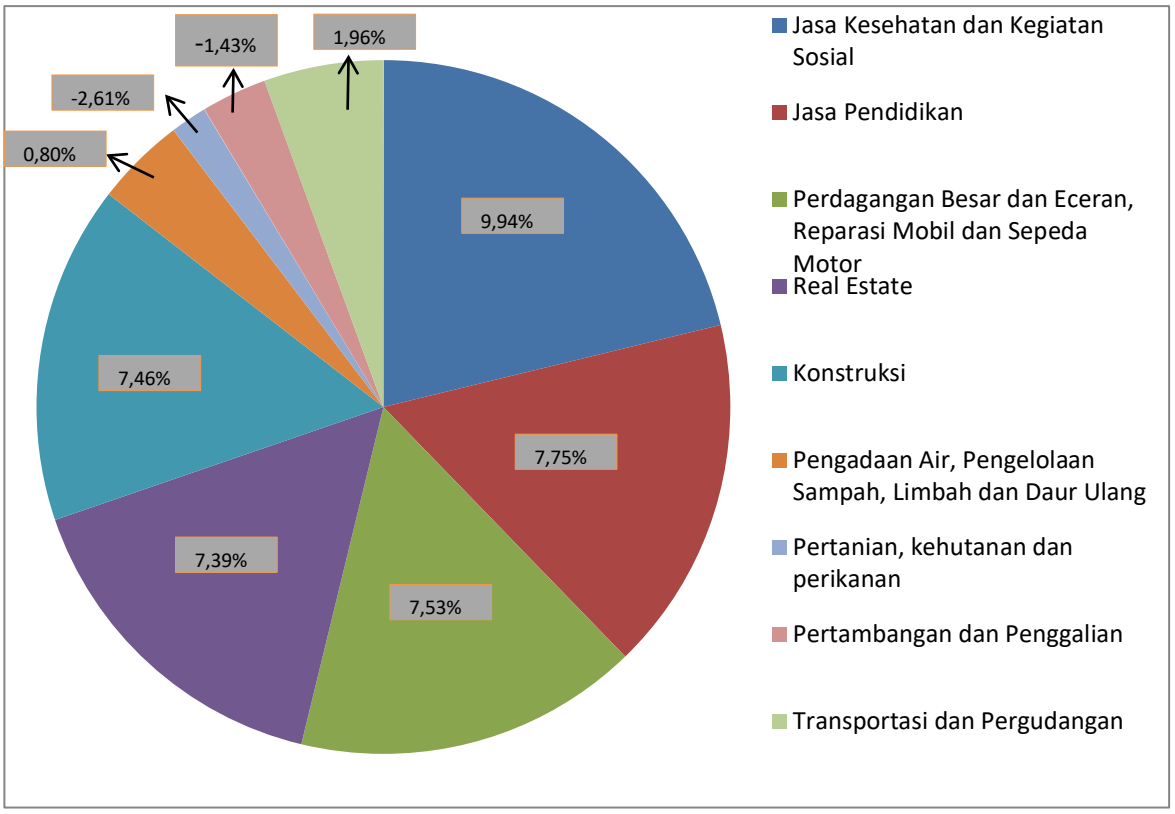

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2020

1.3.4.3. *Pendapatan Per kapita*

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Kota Jambi dapat dilihat melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Berdasarkan atas harga berlaku, PDRB perkapita Kota Jambi pada tahun

2017 sebesar Rp. 44.480.000,- angka ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.929.728.480,- dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 30.855.900.900,-

PDRB per Kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah Penduduk.

Untuk penghitungan PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 17.728.338,8,- meningkat menjadi Rp. 18.699.511,01 pada tahun 2018 dan menjadi Rp.19.655.780.000,- pada tahun 2019.

1.3.4.4. *Tingkat inflasi*

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontiniu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Gambar 1.4

Inflasi Kota Jambi Tahun 2017 – 2019

URAIAN	2017	2018	2019
INFLASI	1,52	3,02	1,27

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2020

Laju inflasi secara umum selama tahun 2016 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Laju inflasi umum pada tahun 2016 mencapai 4,54 persen, kemudian pada tahun 2017 sebesar 2,68 persen dan pada tahun 2018 sebesar 3, 02 persen, selanjutnya 1,27 persen pada tahun 2019.

1.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi mendesak dilakukan penataan diri, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Barometer keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi dapat diukur sejauhmana perkembangan ibu kotanya. Untuk menjadikan Kota Jambi agar sejajar dengan kota-kota lainnya di Indonesia perlu penanganan berbagai permasalahan diantaranya :

1.4.1. Bidang Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan dukungan penting untuk meningkatkan nilai tambah (*Value Added*) dan daya saing suatu perekonomian. Permasalahan mendasar di bidang infrastruktur kota adalah :

1) Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman.
2) Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.
3) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah.
4) Masih rendahnya aksesbilitas dan kapabilitas infrastruktur jalan.
5) Masih banyak titik genangan di Kota Jambi.
6) Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota

1.4.2. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendidikan di Kota Jambi yaitu belum optimalnya daya saing pendidikan, dimana Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat global. Permasalahan pendidikan Kota Jambi adalah optimalnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan masih rendahnya daya tampung siswa terutama ditingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri, masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki, belum meratanya penyebaran guru, masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru dan masih rendanhnya kualitas siswa.

b. Kesehatan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang kesehatan di Kota Jambi yaitu tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular, dimana secara umum derajat kesehatan masyarakat Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namum demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih ditemukannya balita gizi kurang serta baduta stanting. Penyelenggaraan kesehatan di Kota Jambi dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan

kesehatan bagi warga Kota Jambi khususnya keluarga kurang mampu, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

c. Ketenagakerjaan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Ketenagakerjaan di Kota Jambi yaitu rendahnya daya saing tenaga kerja, dimana meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini secara umum disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja dan rendahnya skill tenaga kerja, kondisi ini dapat menjadi beban bagi pemerintah Kota Jambi.

d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Kependudukan dan KB di Kota Jambi antara lain :

1) Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan
2) Tingginya kasus kejahatan anak

e. Transportasi

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang transportasi di Kota Jambi yaitu masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas, dimana dengan perkembangan yang terjadi khususnya di Kota Jambi salah satunya adalah perkembangan lalu lintas dan masalah yang harus benar-benar diperhatikan adalah pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal seperti: pengemudi kendaraan yang buruk, bus besar atau kecil yang

sembarangan parkir, ketidakteratur antara transportasi yang besar dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

f. Kesejahteraan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang transportasi di Kota Jambi yaitu tingginya angka penyandang PMKS, dimana sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Ditinjau dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwasanya program dan kegiatan terutama pada PMKS belum optimal sehingga ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Jambi untuk dapat menyusun langkah-langkah dan strategi dalam upaya menurunkan anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

1.4.3. Bidang Ekonomi

a. ***Keuangan Daerah***

Permasalahan pokok yang dihadapi bidang keuangan daerah di Kota Jambi yaitu rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan, dimana komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. APBD Kota Jambi beberapa tahun terkahir selalu berada di atas angka 1,6 Triliun. Dari total APBD Kota Jambi, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan, baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khsus (DAK). Jika dilihat dari proporsi secara persentase, Dana

Perimbangan menempati perentase tertinggi diikuti oleh PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari seberapa besar daerah tersebut bisa membiayai APBD dari PAD. Beberapa tahun terakhir, rata-rata PAD Kota Jambi berkisar diantara angka 18%-26% dari total APBD Kota Jambi. Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi selalu berkomitmen untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun dengan mengupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi,bekerjasama dengan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi serta melakukan upaya lainnya melaluipendirian BUMD untuk menambah sumber pendapatan lainnya.

b. Industri dan Perdagangan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Industri dan Perdagangan di Kota Jambi antara lain :

1) Lemahnya tata niaga perdagangan
2) Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan

1.4.4. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kota Jambi antara lain :

1) Masih rendahnya rasio RTH publik
2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah
3) Menurunnya kualitas lingkungan hidup

1.4.5. Bidang Pemerintahan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Pemerintahan atau Birokrasi di Kota Jambi yaitu belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN

dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik.

Posisi IP ASN Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 56,2, yang berarti berada pada kategori 'Rendah'. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkan kualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi (kompetensi tekhnis, manajerial maupun sosial cultural.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis masalah, sinergitas antar masalah, serta dalam rangka lebih terfokusnya intervensi program pembangunan maka dirumuskanlah isu-isu strategis menjadi 7 (tujuh) kelompok, sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup
4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat
5. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah
6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga
7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Dengan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Kota Jambi, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah

1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Kota Jambi berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan (NR) nomor 4421)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 209).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinnerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj 2020

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut, diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MAKSUD DAN
1.2. TUJUAN GAMBARAN UMUM
1.3. DAERAH PERMASALAHAN
1.4. PEMBANGUNAN DASAR HUKUM
1.5. PENYUSUNAN
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJ 2020

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI
2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
3.3. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
3.4. PENDANAAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 DAN 2020
3.5. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
3.6. PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA JAMBI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

BAB IV PENUTUP

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

Bab 2 Berisi :
1. ***Rencana Strategis Pemerintah Kota Jambi***
2. ***Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2020***

2.1. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Jambi Tahun 2020 didasarkan kepada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang menjadi dasar tolak ukur pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023. RPJMD adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah berdasarkan tolok ukur kinerja. Sesuai amanat masyarakat di era reformasi, maka RPJMD yang disusun oleh Pemerintah Daerah ini harus dapat menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat kota. Hal yang lebih penting lagi, RPJMD ini harus dapat diimplementasikan dan akhirnya diakuntabilitaskan. Untuk melihat implementasinya, unit kerja Pemda harus menjabarkannya dalam Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan Renstra unit kerja tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dari unit kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Walikota sebagai Kepala Daerah terpilih peroide 2018-2023, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian tersebut akan menguraikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Visi dan misi Pemerintah Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam **RPJMD** Tahun 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

VISI :

MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN

Pusat Perdagangan dan Jasa	:	Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda
Berbasis Masyarakat	:	*Community Based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan.
Berakhlak	:	Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan
Berbudaya	:	Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan

Pelayanan Prima : Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah

MISI :

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pemerintah Kota Jambi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1) Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2) Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3) Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4) Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5) Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

2.1.2. Prioritas Pembangunan

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2018–2023, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu:

(1) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
(3) Penanggulangan kemiskinan
(4) Pengembangan pariwisata dan promosi daerah

2.1.3. Sasaran

Pemerintah Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020 dalam mencapai 4 (empat) Prioritas Pembangunan memformulasikan 22 sasaran utama yang akan dicapai dengan uraian sebagai berikut :

Prioritas 1

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN

1. Meningkatkan layanan infrastruktur dan Utilitas perkotaan
2. Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prioritas 2

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

3. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK
4. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL
5. meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan
6. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat
7. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan
8. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
9. Meningkatkan Kesetaraan Gender
10. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
12. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan

Prioritas 3

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

13. Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan

14. Meningkatnya Ketahanan Pangan
15. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja
16. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil
17. Meningkatkan Derajat Kesehatan
18. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk
19. Menurunkan angka PMKS

Prioritas 4

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI DAERAH

20. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
21. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
22. Meningkatkan Realisasi Investasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan adanya indikator kinerja daerah dalam sebuah proses pengukuran kinerja dimana pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dimasa yang akan datang. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama periode 2018 – 2023 serta SKPD pelaksana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 – 2023

dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Dinas Komunikasi dan Informasi 2. Sekretariat Daerah 3. Seluruh Perangkat Daerah
2.	Indeks Profesinalitas ASN	1. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2. Seluruh Perangkat Daerah
3.	Nilai SAKIP	1. Sekretariat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Inspektorat 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 5. Seluruh Perangkat Daerah
4.	Indeks survey persepsi Korupsi	1. Inspektorat 2. Sekretariat Daerah 3. Sekretariat DPRD
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5. Kecamatan
6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11.	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15.	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
18.	Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
21.	Persentase Daya Saing Produk IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22.	Persentase koperasi berkualitas	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Dinas Pendidikan
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
27.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
28.	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
29.	Indeks Pembangunan Gender	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
30.	Indeks Pemberdayaan Gender	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
31.	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kecamatan
33.	Indeks Pembangunan Pemuda	Dinas Pemuda dan Olah Raga
34.	Persentase PMKS yang tertangani	Dinas Sosial

2.1.4. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2018-2023.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolak ukur kinerja.

2.1.4.1. Strategi

Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perencanaan yang dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup (a) mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan), (b) Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah, (c) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya, dan (d) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi selama periode 2018 - 2023 dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
3. Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
5. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK
6. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah

7. Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran
8. Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
9. Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol
10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan
11. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan
12. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
13. Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
14. Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi
15. Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan
16. Peningkatan harmonisasi ruang kota
17. Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan
18. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
19. Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
20. Meningkatkan Ketahanan Pangan
21. Penguatan daya saing kepariwisataan
22. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
23. Peningkatan Iklim Investasi
24. Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha
25. Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
26. Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
27. Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM
28. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare)
29. Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
30. Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar

31. Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
32. Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
33. Peningkatan Pengarusutamaan Gender
34. Peningkatan pemenuhan hak anak
35. Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
36. Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
37. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS

2.1.4.2. Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan strategi kebijakan sebagaimana tertera di atas, maka dirumuskanlah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi periode 2018–2023 yang memuat 5 misi, 6 tujuan, dan 22 sasaran. Arah Kebijakan Pembangunan ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program berdasarkan fungsi/ bidang/ sub-bidang/ sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Arah kebijakan dari sasaran dan strategi pada tujuan misi, sebagai berikut:

Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	• Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK • Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur	• Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK • Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN

		• Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah • Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN • Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK	• Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah • Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan • Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensi, transparan dan akuntabel • Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan • Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK • Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah

Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	• Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah	• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
	3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	• Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran	• Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan
3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	• Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa	• Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	• Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol	• Meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol

Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
4. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	6. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan ulitilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan	• Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan • Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap • Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi • Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan • Peningkatan harmonisasi ruang kota	• Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan • Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik • Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan • Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur • Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
	7. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	• Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan	• Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan • Pengendalian dan pengawasan lingkungan

			• Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan

Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	8. Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	• Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan • Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran
	9. Meningkatnya Ketahanan Pangan	• Meningkatkan Ketahanan Pangan	• Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan • Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
	10. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	• Penguatan daya saing kepariwisataan	• Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya

			• Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exibition*)
	11. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	• Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	• Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah • Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
	12. Meningkatkan Realisasi Investasi	• Peningkatan Iklim Investasi	• Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
	13. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	• Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha • Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan	• Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif • Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja • Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
	14. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	• Mendorong Terciptanya Produktivit as IKM	• Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif

			• Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal • Meningkatkan koperasi berkualitas

.Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	15. Meningkatkan Derajat Kesehatan	• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare) • Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran	• Kartu Jambi Bugar
	16. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	• Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar • Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran	• Meningkatkan sarana prasarana pendidikan • Menekan angka putus sekolah • Kartu Jambi Cerdas

			• Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
	17. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	• Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas	• Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga
	18. Meningkatkan Kesetaraan Gender	• Peningkatan Pengarus utamaan Gender	• Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan • Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan
	19. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	• Peningkatan pemenuhan hak anak	• Meningkatkan pemenuhan hak anak
	20. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	• Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	• Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	21. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	• Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan	• Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan

	22. Menurunkan angka PMKS	• Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS	• Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS • Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

2.1.5. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang yang telah di tetapakan dalam RPJMD, maka upaya pencapainya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut.

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

MISI		SASARAN	PROGRAM
I.	**PENGUATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik 3. Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah 4. Manajemen data/informasi/statistik daerah 5. Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur

			6. Penataan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah 7. Peningkatan kerjasama daerah 8. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparatur dan keprotokolan 9. Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian 10. Tata kelola administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa 11. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan dan kelembagaan keagamaan 12. Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan 13. Tata kelola organisasi dan ketatalaksanaan 14. Penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan 15. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 16. Penelitian dan Pengembangan

			17.Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset 18.Peningkatan sistem pengawasan internal, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 19.Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD 20.Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 21.Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 22.Peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan 23.Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
2.	**PENGUATAN PENEGAKKAN HUKUM. TRANTIBMAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT**	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	1. Penyelenggaraan trantibum, serta penegakan regulasi daerah
		Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	2. Pembinaan dan perlindungan masyarakat

		Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	3. Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan 4. Peningkatan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5. Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkesmas dan parpol
3	**PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN**	Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan ulitilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	1. Peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan 2. Pengendalian dan peningkatan disiplin berlalu lintas 3. Peningkatan pelayanan perparkiran 4. Perencanaan teknis ke-PU an 5. Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai 6. Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan 7. Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

			8. Fasilitasi, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang 9. Pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan 10. Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman 11. Peningkatan pemeliharaan dan penataan utilitas umum 12. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 13. Perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam 14. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah
4	**PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI PERKOTAAN**	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan Meningkatnya Ketahanan Pangan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1. Pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan 2. Pembinaan dan peningkatan industri kecil menengah 3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan tani

		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4. Peningkatan produksi, mutu produk, dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan 5. Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan kebudayaan 6. Pembinaan, peningkatan dan pengelolaan pariwisata 7. Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah 8. Peningkatan realisasi investasi 9. Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas, tenaga kerja 10. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 11. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
		Meningkatkan Realisasi Investasi	
		Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	
5	**PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN**	Meningkatkan Derajat Kesehatan	1. Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan 2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
		Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	

		Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	3. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial 4. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak 5. Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat 6. Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 7. Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan 8. Pelayanan umum kecamatan 9. Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan 10. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 11. Pemberdayaan masyarakat kelurahan
		Meningkatkan Kesetaraan Gender	
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
		Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	
		Menurunkan angka PMKS	

2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak diawasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Uraian dan rincian mengenai sasaran berdasarkan prioritas pembangunan, indikator kinerja utama dan target yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2.

Sasaran, Indikator Kinerja dan Target

Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020

NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2020
1	2	3	4		5	6
MISI 1 :		**PENGUATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**				
1.	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas	• Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,55

	kinerja pemerintah berbasis TIK	• Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur • Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah • Meningkatkan Penyelenggara an Pemerintah yang bersih dari KKN • Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK	2.	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	57,50
			3.	Nilai SAKIP	Nilai	BB
			4.	Indeks survey persepsi korupsi	Indeks	3,69
			5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86
MISI 2 :		PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM, TRANTIBMAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT				
2.	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	• Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah	6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	%	80
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	• Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran	7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	%	100
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingknya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	• Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa	8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	%	20
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	• Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol	9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	%	20

MISI 3 :		PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN				
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	• Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan • Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap • Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi • Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan • Peningkatan harmonisasi ruang kota	10	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	%	60,77
7.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	•Pencegahan, penanggulang an dan pemulihan lingkungan	11	Indeks kualitas air	Indeks	38,30
			12	Indeks kualitas udara	Indeks	80,72
			13	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	41,70
MISI 4 :		PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI PERKOTAAN				
8.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	• Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	%	52
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	• Meningkatkan Ketahanan Pangan	15.	Skor pola pangan harapan	%	91
10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	• Penguatan daya saing kepariwisataan	16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	%	2,38

11.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	• Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	9
12	Meningkatkan realisasi investasi	• Peningkatan Iklim Investasi	18.	Realisasi investasi	Rupiah	430,5 M
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	• Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha • Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,25
14.	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	• Mendorong Terciptanya Produktivit as IKM	20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	%	8,54
			21.	Persentase daya saing produk IKM	%	5,35
			22.	Persentase koperasi berkualitas	%	19,27
MISI 5 :		PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN				
15.	Meningkatkan derajat kesehatan	• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare) • Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	%	72,35
16.	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan	• Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar • Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat	24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14,61
			25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	%	17,32

		Sasaran				
			26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	%	10,69
17.	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	• Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas	27.	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,05
			28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	%	96,46
18.	Meningkatkan kesetaraan gender	• Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas	29.	Indeks pembangunan gender	Indeks	94,91
			30.	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	68,20
19.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	• Peningkatan pemenuhan hak anak	31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	%	80
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	• Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	%	61,43
21.	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	• Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan	33.	Indeks pembangunan pemuda	%	50,5
22.	Menurunkan angka PMKS	• Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS	34.	Persentase PMKS yang tertangani	%	70

No.	PROGRAM	APBD 2020			APBD-P 2020		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH	SKPD	RUTIN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	118.123.994.980	4.989.005.020	**123.113.000.000**	120.881.460.304	4.575.502.270	**125.456.962.574**
2.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	189.734.119.850	11.268.495.150	**201.002.615.000**	211.961.610.375	10.685.194.435	**222.646.804.810**
3.	Perencanaan teknis ke-PU an	9.205.601.000	4.604.408.400	**686.400.000.000**	11.291.945.750	3.826.622.400	**299.913.518.000**
4.	Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai	30.108.210.000			32.545.906.000		
5.	Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	525.813.660.600			135.512.259.850		
6.	Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	115.028.058.000			115.263.603.000		
7.	Fasilitasi, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	1.640.062.000			1.473.181.000		

8.	Pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan	1.476.799.600	2.091.413.900	**30.168.000.000**	1.388.424.600	1.918.913.900	**33.009.495.000**
9.	Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	1.635.144.400			1.441.754.400		
10.	Peningkatan pemeliharaan dan penataan utilitas umum	24.964.642.100			28.260.402.100		
11.	Penyelenggaraan trantibum, serta penegakan regulasi daerah	5.230.918.400	1.803.362.800	**7.813.000.000**	5.132.918.400	1.485.753.190	**7.066.207.390**
12.	Pembinaan dan perlindungan masyarakat	778.718.800			447.535.800		
13.	Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan	8.154.513.000	2.178.487.000	**10.333.000.000**	9.212.135.500	1.729.359.000	**10.941.494.500**
14.	Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	3.700.000.000	2.135.000.000	**5.835.000.000**	2.508.483.250	1.937.290.000	**4.445.773.250**

15.	Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	1.320.130.000	2.369.415.250	**5.197.000.000**	962.730.000	1.898.177.050	**3.709.555.300**
16.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	808.454.750			417.754.750		
17.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	699.000.000			430.893.500		
18.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.532.825.000	3.996.134.350	**58.250.000.000**	2.043.676.000	3.796.262.511	**57.806.992.111**
19.	Perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam	10.068.318.000			8.584.359.000		
20.	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	41.652.722.650			43.382.694.600		
21.	Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3.644.199.000	4.525.801.000	**8.170.000.000**	2.727.503.000	3.394.433.000	**6.121.936.000**

22.	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	3.673.428.550	3.018.971.450	**9.167.000.000**	2.057.700.050	2.819.693.782	**6.427.436.432**
23.	Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	2.474.600.000			1.550.042.600		
24.	Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	5.226.476.250	2.572.523.750	**7.799.000.000**	4.405.248.500	2.120.223.600	**6.525.472.100**
25.	Peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan	7.560.474.000	4.292.658.000	**17.637.000.000**	6.236.159.500	3.682.875.400	**14.859.280.900**
26.	Pengendalian dan peningkatan disiplin berlalu lintas	2.089.850.000			1.693.093.500		
27.	Peningkatan pelayanan perparkiran	3.694.018.000			3.247.152.500		
28.	Peningkatan akses dan kualitas informasi publik	4.060.388.000	2.324.738.000	**6.500.000.000**	3.375.342.000	1.684.688.000	**5.102.280.000**
29.	penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	74.124.000			25.000.000		

30.	Manajemen data/informasi/ statistik daerah	40.750.000			17.250.000		
31.	Peningkatan realisasi investasi	569.024.000	3.323.609.000	**4.541.000.000**	372.414.000	2.444.818.000	**3.224.024.000**
32.	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	648.367.000			406.792.000		
33.	Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	7.178.703.120	1.635.296.880	**8.814.000.000**	3.618.081.700	1.601.542.816	**5.219.624.516**
34.	Peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan	950.629.100	2.657.230.825	**5.592.000.000**	788.629.100	2.099.098.825	**4.186.447.800**
35.	Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1.984.140.075			1.298.719.875		
36.	Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan kebudayaan	1.408.750.000	1.931.800.000	**8.832.000.000**	912.750.000	1.525.260.800	**9.336.917.800**
37	Pembinaan, peningkatan dan pengelolaan pariwisata	5.491.450.000			6.898.907.000		

38	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan tani	838.100.000	3.465.640.000	**8.151.000.000**	384.492.500	3.236.512.000	**6.544.068.250**
39.	Peningkatan produksi, mutu produk, dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	3.847.260.000			2.923.063.750		
40.	Pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan	1.912.897.500	4.831.097.500	**9.277.385.000**	1.464.921.000	3.966.635.200	**7.127.805.700**
41.	Pembinaan dan peningkatan industri kecil menengah	2.533.390.000			1.696.249.500		
42.	Peningkatan sistem pengawasan internal, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.867.345.000	2.022.655.000	**4.890.000.000**	2.744.590.000	1.429.266.000	**4.173.856.000**
43.	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1.978.975.000	4.122.860.000	**6.782.000.000**	1.016.975.000	3.634.880.000	**5.128.520.000**

44.	Penelitian dan pengembangan	680.165.000			476.665.000		
45.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset	7.940.881.550	5.426.750.450	**13.367.632.000**	9.214.103.548	5.195.946.144	**14.410.049.692**
46.	Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah	3.256.735.000	4.561.265.000	**7.818.000.000**	1.838.125.000	3.587.467.000	**5.425.592.000**
47.	Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	5.071.942.750	4.121.057.250	**9.193.000.000**	3.171.338.750	3.112.625.250	**6.283.964.000**
48.	Peningkatan kerjasama daerah	804.000.000	16.165.695.000	**54.700.000.000**	679.295.000	15.793.653.625	**49.105.174.325**
49.	Penataan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	1.068.000.000			1.148.247.200		
50.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	6.067.000.000			6.147.825.000		

51.	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparatur dan keprotokolan	3.840.805.000			2.434.605.000		
52.	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	782.000.000			601.818.500		
53.	Tata kelola administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa	2.166.000.000			1.903.974.000		
54.	Fasilitas dan koordinasi kegiatan dan kelembagaan keagamaan	9.761.000.000			9.285.910.000		
55.	Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggan	1.097.500.000			1.313.500.000		
56.	Tata kelola organisasi dan ketatalaksanaan	1.117.000.000			1.141.951.000		

57.	Penataan administrasi pemerintahan dan kewilayah	11.831.000.000			8.654.395.000		
58.	Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD	30.609.185.000	15.124.815.000	**45.734.000.000**	29.316.104.000	15.453.145.000	**44.769.249.000**
59.	Pelayanan umum kecamatan	2.721.093.600	19.135.607.118	**90.887.000.000**	2.105.237.600	18.551.904.333	**82.183.405.058**
60.	Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	9.254.172.582			5.653.765.582		
61.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	18.279.779.100			25.464.417.538		
62.	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	41.496.347.600			30.408.080.005		
63.	Peningkatan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	908.596.000	1.426.404.000	**2.835.000.000**	642.619.500	1.163.072.000	**2.118.029.500**

64.	Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkesmas dan parpol	500.000.000			312.338.000		
TOTAL		**1.316.674.434.907**	**142.122.197.093**	**1.458.798.632.000**	**924.919.120.477**	**128.350.815.531**	**1.053.269.936.008**

2.2.2. Anggaran Tahun 2020

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 1.828.835.334.125,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.

Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**775.565.398.117**	**42,41**
2.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.053.269.936.008**	**57,59**
JUMLAH BELANJA		**1.828.835.334.125**	**100**

Sumber : APBD Kota Jambi 2020

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tergambar dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN	%
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	118.417.500.433	11,24
		2.	Indeks profesionalitas ASN	20.104.198.048	1,91

		3.	Nilai SAKIP	38.533.338.048	3,66
		4.	Indeks survey persepsi korupsi	33.964.668.000	3,22
		5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.134.295.000	0,30
2.	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	5.580.454.200	0,53
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	9.212.135.500	0,87
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideology pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan ideolo masyarakat	8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideology Pancasila	642.619.500	0.06
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	312.338.000	0,03
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	10	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	338.353.882.200	32,12
7.	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	11	Indeks kualitas air	2.043.676.000	0,19
		12	Indeks kualitas udara	8.584.359.000	0,81
		13	Indeks kualitas tutupan lahan	43.382.694.600	4,12
8.	Meningkatnya pembinaan,	14.	Persentase pembinaan,	1.464.921.000	0,14

	pengawasan dan pelayanan perdagangan		pengawasan dan pelayanan perdagangan		
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	15.	Skor pola pangan harapan	3.307.556.250	0,31
10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	7.811.657.000	0,74
11.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.838.125.000	0,17
12	Meningkatkan realisasi investasi	18.	Realisasi investasi	372.414.000	0,04
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	962.730.000	0,09
14.	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	417.754.750	0,04
		21.	Persentase daya saing produk IKM	1.696.249.500	0,16
		22.	Persentase koperasi berkualitas	430.893.500	0,04
15.	Meningkatkan derajat kesehatan	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	211.961.610.375	20,12
16.	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan	24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	120.881.460.304	11,48
		25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan		
		26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		
17.	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	27.	Laju pertumbuhan penduduk	4.405.248.500	0,42
		28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera		

		29.	Indeks pembangunan gender	2.057.700.050	0,20
		30.	Indeks pemberdayaan gender		
		31.	Persentase hak anak yang terpenuhi		
		32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	64.993.543.325	6,17
		33.	Indeks pembangunan pemuda	3.618.081.700	0,34
		34.	Persentase PMKS yang tertangani	2.508.483.250	0,24
JUMLAH				**1.053.269.936.008**	**100**

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI

Bab 3 Berisi :

1. ***Capaian Indikator Kinerja Utama 2020***
2. ***Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja***
3. ***Perbandingan Target Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019***
4. ***Pendanaan Per Prioritas Pembangunan Tahun 2019 dan Tahun 2020***
5. ***Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tahun 2020***
6. ***Penghargaan yang Diraih Pemerintah Kota Jambi selama Tahun 2020***

Dokumen perencanaan taktis strategis yang menjadi dasar tolok ukur pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih peroide 2018-2023, disamping itu pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dengan terus mendorong upaya pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1.	≥ 91	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Diolah.

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2020 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk tahun 2020.

Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,33	116,80	2,55	-	-	2,44
2.	Indeks profesionalitas ASN	55	91,18%	57,50	66,70	116,00%	88,00
3.	Nilai SAKIP	B	100,00%	BB	-	-	A
4.	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	-	3,69	-	-	3,8
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	97,48%	86,00%	85,51%	99,43%	88,5%

6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82,00%	100,00%	80,00%	75,00%	93,75%	60,00%
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	93,63%	93,63%	100,00%
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	20,00%
9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00%	100,00%	20,00%	48,71%	243,00%	20,00%
10.	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	93,27%	60,77%	65,56%	107,88%	85,79%
11.	Indeks kualitas air	32,11	88,00	38,30	39,60	103,40%	43,38
12.	Indeks kualitas udara	80,68	81,00	80,72	84,51	104,70%	91,45
13.	Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	64,00	41,70	44,82	107,48%	61,37
14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00%	175,94%	52,00%	116,23%	223,52%	100,00%
15.	Skor pola pangan harapan	87,90%	100,22%	91,00%	91,50%	100,55%	92,5%
16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35%	-	2,38%	2,29	99,22%	2,41%
17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	201,13%	9,00%	-9,64%	-107,11%	9,00%
18.	Realisasi investasi	410 M	245,12%	430,5 M	249,4 M	68,39%	523,37 M
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	101,21%	65,25%	64,12%	98,27%	66,00%

20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	100,00%	8,54%	8,54%	100,00%	10,00%
21.	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	448,8%	5,35%	2,8%	52,34%	8,30%
22.	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	102,73%	19,27%	19,73%	101,46%	36,70%
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	-	72,35%	72,65%	100,41%	72,37%
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	100,13%	14,61%	15,10%	103,35%	14,64%
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	99,90%	17,32%	17,32%	100,00%	4,32%
26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	100,00%	10,69	10,92	102,15	10,72%
27.	Laju pertumbuhan penduduk	N/A	-	1,05	-	-	1,01%
28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	99,80%	96,46%	95,99%	99,51%	97,15%
29.	Indeks pembangunan gender	94,89	99,53%	94,91	94,60	99,73%	94,95
30.	Indeks pemberdayaan gender	68,07	102,54%	68,20	69,83	102,39%	68,50
31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	101,75%	61,43%	59,15%	96,29%	66,00%
33.	Indeks pembangunan pemuda	50,00	-	50,50	-	-	52,00

34.	Persentase PMKS yang tertangani	60,00%	38,86%	70,00%	67,26%	96,09%	85,00%

Catatan :
- *IKU Nomor 1, 3, dan 4 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari KemenPAN RB*
- *IKU Nomor 27 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari BPS Kota Jambi*
- *IKU Nomor 33 belum dapat diisi karena angka merupakan output dari Bappenas.*

Dari 34 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2020, **26 indikator menunjukkan capaian ≥ 91% atau lebih** masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target IKU Pemerintah Kota Jambi yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2020, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat **26** indikator menunjukkan capaian **SANGAT TINGGI, 2** indikator menunjukkan capaian **SEDANG** dan **6** Indikator **BELUM TERDATA.**

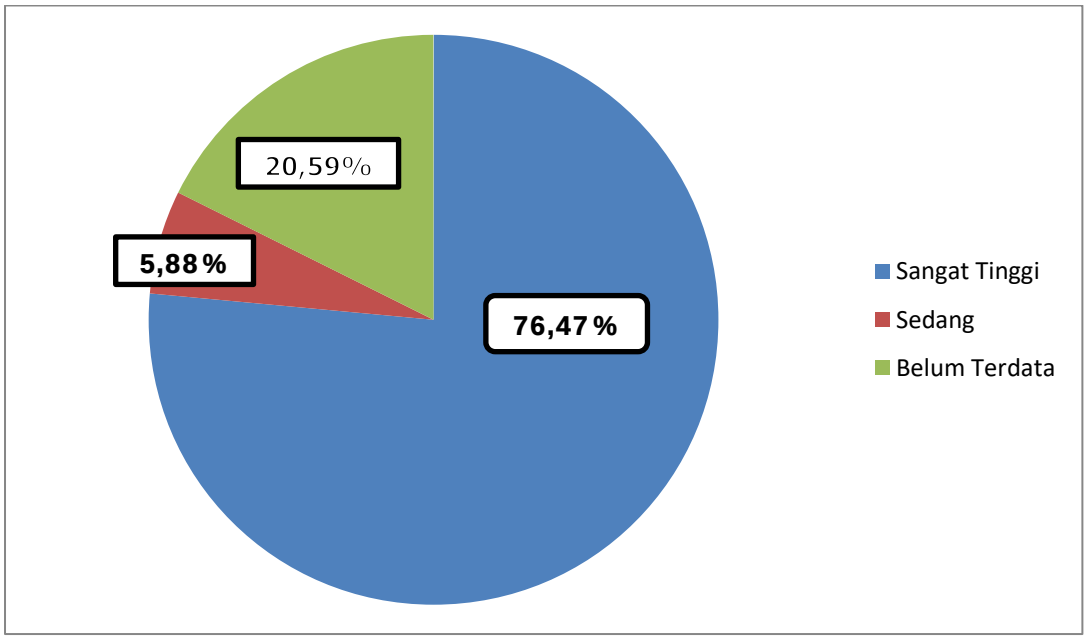

Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2020

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bagian sub-bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per prioritas pembangunan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Jambi dalam kurun waktu 2018-2023 telah merencanakan / menetapkan 4 Prioritas dengan 22 sasaran pembangunan dan 34 Indikator Kinerja Utama.

SASARAN 1
MENINGKATKAN PROFESIONALISME ASN DAN AKUNTABILITAS KINERJA BERBASIS TIK

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 1 (pertama) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel. 3.3. berikut.

Tabel 3.3.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 1 (kesatu) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	116,80%	2,55	-	-	2,44
		2	Indeks profesionalitas ASN	55	91,18%	57,50	66,70	116,00	88,00
		3	Nilai SAKIP	B	100,00%	BB	-	-	A
		4	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	91,78%	3,69	-	-	3,8

		5	Indeks Kepuasan Masyara kat	85,28%	96,08%	86,00%	85,51%	99,43%	88,5%
RATA-RATA % CAPAIAN					99,17%			43,09%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Untuk mencapai sasaran profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK ditetapkan 5 (lima) IKU dengan target yang berbeda. Dalam pelaksanaannya kelima IKU ini dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU kesatu merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah, dengan *leading sector* Dinas Komunikasi dan Informasi yaitu indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan target 2,55 belum terealisasi atau dengan capaian sebesar 0 persen masuk dalam kategori **BELUM TERDATA**, dimana hasil evaluasi SPBE Tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak melaksanakan penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga dengan demikian tidak ada nilai SPBE Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2020. Penilaian terakhir yang dilakukan adalah pada tahun 2019 dengan nilai SPBE 2,85.

IKU kedua merupakan tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan seluruh perangkat daerah dengan *leading sector* Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yaitu indeks profesionalitas ASN dengan target sebesar 57,50 persen terealisasi sebesar 66,70 persen atau dengan capaian 116,00 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dikarenakan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Adapun rumus pengukuran indeks profsionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Dimensi terdiri dari 1. Dimensi kualifikasi, 2. Dimensi kompetensi 3. Dimensi kinerja dan 4. Dimensi Disiplin, yaitu:

1. Dimensi Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
f. Di bawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);

d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

Kualifikasi diartikan sebagai berikut :

a. Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian
b. Keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dsb.)
c. Tingkatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Pada ASN atau PNS Kualifikasi dapat ditempuh dengan pemberian izin belajar dan Tugas Belajar.

Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar. Pemberian tugas belajar dan izin belajar didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 196 1 tentang Pemberian Tugas Belajar.

Izin belajar dan tugas belajar bagi PNS adalah bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, khususnya yang bekerja dalam bidang pelayanan publik.

Persentase Pendidikan Formal terakhir

No	Indikator	Tahun 2020	
		Target	Realisasi
1	Izin Belajar	30	81
2	Tugas Belajar	30	4
3	Jumlah	60	85
4	Jumlah ASN SLTA yang akan ditingkatkan	526	
5	**Persentase Pendidikan Formal yang akan ditingkatkan (3/4) x 100%**	11,41%	16,16%

2. Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan;

b. Diklat Fungsional;

c. Diklat Teknis; dan

d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

- **Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:**

  a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

- **Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:**
  a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
  b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
- **Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:**
  a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
  b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
  c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- **Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:**

a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/magang/ sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan *(capability)* atau keahlian *expertise)* yang lebih dari sekedar keterampilan *(skill)* belaka.

Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan dan diklat. Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa *hard* maupun *soft competencies*.

a. Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial *(managerial competence)* adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel dibawah ini:

Kompetensi Manajerial

No	Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial setiap tahun :						
	-Diklat PIM Tk. II	10	10	5	5	0	0
	-Diklat PIM Tk. III	15	15	5	5	0	0
	-Diklat PIM Tk. IV	30	29	30	30	30	30
	Jumlah	55	54	40	40	30	30
2	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial (akumulasi)						
	-Diklat PIM Tk. II	22	20	27	25	27	25
	-Diklat PIM Tk. III	112	125	117	130	117	130
	-Diklat PIM Tk. IV	498	479	528	509	558	539
	Jumlah	632	624	672	664	702	694
3	Jumlah Pejabat Struktural	1130		1102		1102	
4	**Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial (2/3) x 100%**	55,93%	55,22%	60,98%	60,25%	63,70%	62,98%

b. Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknik*(technical competence)* yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi yang sama dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti diklat teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis tugas dan fungsi serta diklat fungsional,

dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kompetensi Teknis

No	Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi Teknis setiap tahun :	190	190	120	174	160	252
2	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi Teknis (akumulasi)	1670	1630	1790	1804	1950	2056
3	Jumlah PNS	6326		6213		5816	
4	**Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis (2/3) x 100%**	26,40%	25,77%	28,81%	29,04%	33,53%	35,35%

Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian kinerja, diantaranya :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan.
2. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai penugasan bukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi/kebutuhan

Untuk itu, beberapa langkah yang dilakukan (solusi) untuk meningkatkan kinerja indikator ini dimasa yang akan datang antara lain :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana Pembina diklat yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja.
2. Melaksanakan diklat yang penunjukan peserta berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan.
3. Menciptakan Kerjasama yang baik antara peserta diklat, panitia penyelenggara dan widyaiswara.

3. Dimensi Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011

tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan

sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Penilaian Prestasi Kerja PNS

NO	KETERANGAN NILAI SKP	JUMLAH PERKATEGORI	JUMLAH PERSENTASE
1	91 – 100 : Sangat baik	340	5,85%
2	76 – 90 : Baik	5275	90,70%
3	61 – 75 : Cukup	20	0,34%
4	51 – 60 : Kurang	2	0,03%
5	50 – ke bawah : Buruk	83	1,43%
6	JUMLAH ASN YANG MENYAMPAIKAN	5720	
7	JUMLAH ASN	5816	
8	Persentase Penilaian Prestasi Kerja PNS yang mendapatkan Nilai Baik [(1+2)/7] X 100%	96,54	

4. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

a. Hukuman disiplin ringan;

b. Hukuman disiplin sedang; dan

c. Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;

b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;

c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan

d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan ke pemerintahan yang baik (*Good Governance)* melalui pengukuran persentase Penurunan Hukuman disiplin. Selanjutnya dalam hal peningkatan disiplin, tindaklanjut terhadap PNS yang indispliner terus dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sepanjang tahun 2020 telah ditetapkan untuk hukuman ringan SK Kepala OPD sebanyak 13 orang, hukuman tingkat sedang sebanyak 9 orang, sedangkan hukuman tingkat berat sebanyak 4 orang. Dengan demikian Hukuman disiplin yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam tahun 2020 sebanyak 26 Surat Keputusan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

No	Tingkatan Hukuman	Jenis Hukuman	Jumlah
1	Hukuman Disiplin tingkat Berat	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	4
2	Hukuman Disiplin tingkat Sedang	a.Penundaan Gaji Berkala	6
		b.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	0
		c.Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	3
3	Hukuman ringan SK Walikota	Pernyataan tidak puas secara tertulis	0
3	Hukuman ringan yang ditembuskan Kepala OPD termasuk yang berbentuk SP	Surat Teguran	13
		Jumlah	26

Selanjutnya tindaklanjut terhadap PNS yang melakukan tindak pidana telah ditetapkan SK Pemberhentian dengan hormat terhadap 4 (empat) orang PNS, sebagaimana tergambar pada tabel berikut dibawah ini.

No	Jenis Tindak pidana	Penetapan Status	Jumlah
1	Tindak pidana biasa	a. Pemberhentian tidak dengan hormat	0
		b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	4
2	Tindak pidana korupsi	1. Pemberhentian tidak dengan hormat	0
JUMLAH			4

Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target telah tercapai 100,20%, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan Indikator Persentase Penurunan Hukuman Disiplin

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi	
Persentase Penurunan Hukuman Disiplin	%	4,97	4,98	100,2%

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran disiplin yang ditangani oleh BKPSDMD mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BKPSDMD sehingga banyak SKPD yang melaporkan kasus pelanggaran disiplin untuk selanjutnya dilakukan Pembinaan.

Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKPSDMD Kota Jambi berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun 2018-2020

Jenis Pelanggaran Disiplin	Tahun		
	2018	2019	2020
Ringan	98	25	13
Sedang	7	4	9
Berat	1	6	4
Jumlah	106	35	26

Penurunan hukuman Disiplin

No	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	RINGAN	25	13
2	SEDANG	4	9
3	BERAT	1	4
4	TIPIKOR	5	0
5	JUMLAH	35	26
6	Jumlah Pegawai Kota	6213	5816
7	Persentase Hukuman Disiplin (5/6) x 100%	0,56%	0,45%

Kategori tingkat profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

No.	Nilai	Tingkat Profesionalitas
1.	91 – 100	Sangat Tinggi
2.	81 – 90	Tinggi
3.	71 – 80	Sedang
4.	61 – 70	Rendah
5.	60 ke bawah	Sangat Rendah

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar **Rp. 18.462.156.681** sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi mencapai **Rp. 9.345.244.772** atau dengan serapan dana APBD mencapai **50,62%**,

dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2020 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir adalah **SILPA sebesar Rp. 9.116.911.909,00.** Adapun untuk Belanja Langsung dengan Anggaran sebesar Rp. **6.283.964.000,00** dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. **4.431.977.599,00** atau mencapai **70,53%.** Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dijelaskan bahwa untuk mengelola sumberdaya aparatur di Kota Jambi dengan jumlah PNS pada akhir Desember 2020 sebanyak 5.816 PNS sedangkan jumlah PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi sejumlah 44 PNS artinya 1 orang harus menangani 132 PNS ini sangat efisien dari dukungan sumber daya. Sedangkan pengelolaan sumberdaya manusia aparatur dilakukan mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun yang harus terus menerus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Untuk menjaga keberlangsungan proses tersebut menjadi kewenangan tugas pokok dan fungsi bagi PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi yang harus mampu melaksanakan program dan kegiatan serta mencapai target yang sudah ditetapkan. Kemudian dari sisi penggunaan anggaran terdapat sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.851.986.401,- (Satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) atau (29,47 %).

- **Analisis Efisiensi**

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara

yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau kurang dari 100%.

Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mencapai 62,82%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara yang hanya memiliki tingkat efisiensi 24,60% .

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

- **Analisis Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran dibawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dimana anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai

keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Selanjutnya IKU ketiga yaitu nilai SAKIP yang merupakan tanggung jawab Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi, Inspektorat Kota Jambi, Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah dan seluruh perangkat daerah dengan target tahun 2020 adalah nilai BB dan belum terealisasi atau dengan capaian 0 persen masuk dalam kategori **BELUM TERDATA**. Adapun penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan dan saat ini belum ada pengumuman nilai SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang biasanya rutin dilakukan pada bulan Januari atau Februari tahun berjalan terhadap penilaian SAKIP tahun 2020.

Adapun komponen yang dinilai dengan bobot, sebagai berikut:

No	Komponen Yang Di Nilai	Bobot
1.	Perencanaan kinerja	30
2.	Pengukuran kinerja	25
3.	Pelaporan kinerja	15
4.	Evaluasi internal	10
5.	Capaian kinerja	20
	Nilai hasil evaluasi	100

Indikator keempat yaitu indeks survey persepsi korupsi dengan penanggungjawab Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan *leading sector* Inspektorat Kota Jambi. Target indeks survey persepsi korupsi ditetapkan dengan indeks 3,69 dan belum terealisasi atau dengan capaian 0 persen masuk dalam kategori **BELUM TERDATA.** Dapat

dijelaskan bahwa sama dengan IKU ketiga yaitu nilai SAKIP dimana penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi dan saat ini belum ada pengumuman nilai indeks persepsi korupsi dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi.

Lebih lanjut indikator kelima yaitu indeks kepuasan masyarakat yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Kecamatan dalam Kota Jambi, dengan target 86,00 persen dan terealisasi 85,51 persen atau capaian sebesar 99,43 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Dimana dapat dijelaskan bahwa semua program atau kegiatan pada tahun 2020 menunjang pada keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana, sasaran strategis dinas yang merupakan indikator kinerja utama tercapai, namun indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 mengalami penurunan dari segi indeks Kepuasan Masyarakat dengan target B terealisasi B.

Dalam penyusunan indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Bagian Organisasi Setda Kota Jambi melakukan survey dengan mengambil sampel pada instansi yang melakukan pelayanan publik, yaitu 62 (enam puluh dua) Kelurahan

yang terkait langsung pelayanan publik dengan jumlah responden sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	RESPONDEN
1.	Arab Melayu	75
2.	Bagan Pete	75
3.	Beliung	75
4.	Beringin	74
5.	Budiman	70
6.	Buluran Kenali	74
7.	Cempaka Putih	76
8.	Eka Jaya	75
9.	Handil Jaya	75
10.	Jelmu	73
11.	Jelutung	75
12.	Kasang	73
13.	Kasang Jaya	75
14.	Kebun Handil	76
15.	Kenali Asam Atas	74
16.	Kenali Asam Bawah	74
17.	Kenali Besar	74
18.	Lebak Bandung	73
19.	Legok	73
20.	Lingkar Selatan	73
21.	Mayang Mangurai	74
22.	Mudung Laut	76
23.	Murni	75
24.	Olak Kemang	75
25.	Orang Kayo Hitam	75
26.	Paal Lima	75
27.	Paal Merah	74
28.	Pakuan Baru	75
29.	Pasar Jambi	75
30.	Pasir Panjang	76
31.	Pasir Putih	75
32.	Payo Lebar	75
33.	Payo Selincah	75
34.	Pematang Sulur	74
35.	Penyengat Rendah	74
36.	Rajawali	74
37.	Rawasari	75

38.	Selamat	75
39.	Sijenjang	75
40.	Simpang III Sipin	75
41.	Simpang IV Sipin	74
42.	Solok Sipin	75
43.	Suka Karya	75
44.	Sulanjana	76
45.	Sungai Asam	75
46.	Sungai Putri	75
47.	Tahtul Yaman	76
48.	Talang Bakung	75
49.	Talang Banjar	74
50.	Talang Jauh	74
51.	Tambak Sari	74
52.	Tanjung Johor	80
53.	Tanjung Pasir	75
54.	Tanjung Pinang	75
55.	Tanjung Raden	75
56.	Tanjung Sari	75
57.	Telanai Pura	76
58.	Teluk Kenali	74
59.	Tengah	73
60.	Thehok	74
61.	Ulu Gedong	75
62.	Wijayapura	74
TOTAL		4.628

Sumber : data primer diolah

Adapun berdasarkan prinsip pelayanan publik sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", "valid" dan "realiable", sebagaimana unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif

NO	KELURAHAN	NILAI RATA-RATA
1.	Arab Melayu	2,69
2.	Bagan Pete	2,91
3.	Beliung	2,91
4.	Beringin	3,08
5.	Budiman	2,99
6.	Buluran Kenali	3,00
7.	Cempaka Putih	2,93
8.	Eka Jaya	2,88
9.	Handil Jaya	2,99
10.	Jelmu	2,95
11.	Jelutung	3,16
12.	Kasang	3,01
13.	Kasang Jaya	3,04
14.	Kebun Handil	2,89
15.	Kenali Asam Atas	3,09
16.	Kenali Asam Bawah	2,99
17.	Kenali Besar	2,86
18.	Lebak Bandung	2,96
19.	Legok	3,14
20.	Lingkar Selatan	2,92
21.	Mayang Mangurai	2,97
22.	Mudung Laut	2,96
23.	Murni	3,03
24.	Olak Kemang	2,99
25.	Orang Kayo Hitam	3,03
26.	Paal Lima	3,00
27.	Paal Merah	3,09
28.	Pakuan Baru	3,03

29.	Pasar Jambi	3,12
30.	Pasir Panjang	2,92
31.	Pasir Putih	3,03
32.	Payo Lebar	2,83
33.	Payo Selincah	2,96
34.	Pematang Sulur	3,00
35.	Penyengat Rendah	2,91
36.	Rajawali	3,12
37.	Rawasari	2,96
38.	Selamat	3,04
39.	Sijenjang	3,04
40.	Simpang III Sipin	2,95
41.	Simpang IV Sipin	2,97
42.	Solok Sipin	3,08
43.	Suka Karya	3,12
44.	Sulanjana	3,07
45.	Sungai Asam	3,00
46.	Sungai Putri	3,12
47.	Tahtul Yaman	2,92
48.	Talang Bakung	2,89
49.	Talang Banjar	2,70
50.	Talang Jauh	2,88
51.	Tambak Sari	2,97
52.	Tanjung Johor	2,91
53.	Tanjung Pasir	2,91
54.	Tanjung Pinang	2,99
55.	Tanjung Raden	2,93
56.	Tanjung Sari	3,05
57.	Telanai Pura	3,05
58.	Teluk Kenali	2,97
59.	Tengah	2,97
60.	Thehok	3,05
61.	Ulu Gedong	2,83
62.	Wijayapura	2,99

Sumber : data primer diolah

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan

NO	KELURAHAN	NILAI RATA-RATA
1.	Arab Melayu	2,69
2.	Bagan Pete	2,88
3.	Beliung	2,93
4.	Beringin	3,01
5.	Budiman	2,90
6.	Buluran Kenali	2,92
7.	Cempaka Putih	2,84
8.	Eka Jaya	2,81
9.	Handil Jaya	2,95
10.	Jelmu	2,85
11.	Jelutung	3,20
12.	Kasang	2,86
13.	Kasang Jaya	2,99
14.	Kebun Handil	2,87
15.	Kenali Asam Atas	2,89
16.	Kenali Asam Bawah	2,92
17.	Kenali Besar	2,85
18.	Lebak Bandung	2,88
19.	Legok	3,36
20.	Lingkar Selatan	2,89
21.	Mayang Mangurai	2,82
22.	Mudung Laut	2,87
23.	Murni	3,05
24.	Olak Kemang	3,00
25.	Orang Kayo Hitam	2,88
26.	Paal Lima	2,96
27.	Paal Merah	3,11
28.	Pakuan Baru	3,04
29.	Pasar Jambi	3,00
30.	Pasir Panjang	2,93
31.	Pasir Putih	3,00
32.	Payo Lebar	2,91
33.	Payo Selincah	2,87
34.	Pematang Sulur	2,99
35.	Penyengat Rendah	2,99
36.	Rajawali	3,14
37.	Rawasari	2,97
38.	Selamat	2,99
39.	Sijenjang	3,03
40.	Simpang III Sipin	2,88

41.	Simpang IV Sipin	2,91
42.	Solok Sipin	2,97
43.	Suka Karya	3,09
44.	Sulanjana	3,04
45.	Sungai Asam	2,97
46.	Sungai Putri	3,00
47.	Tahtul Yaman	2,89
48.	Talang Bakung	2,89
49.	Talang Banjar	2,78
50.	Talang Jauh	2,85
51.	Tambak Sari	2,91
52.	Tanjung Johor	2,90
53.	Tanjung Pasir	2,85
54.	Tanjung Pinang	2,89
55.	Tanjung Raden	2,92
56.	Tanjung Sari	3,11
57.	Telanai Pura	2,95
58.	Teluk Kenali	2,96
59.	Tengah	3,03
60.	Thehok	3,01
61.	Ulu Gedong	2,87
62.	Wijayapura	2,86

Sumber : data primer diolah

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

NO	KELURAHAN	NILAI RATA-RATA
1.	Arab Melayu	2,41
2.	Bagan Pete	2,81
3.	Beliung	2,87
4.	Beringin	3,04
5.	Budiman	2,87
6.	Buluran Kenali	3,00
7.	Cempaka Putih	2,64
8.	Eka Jaya	2,84
9.	Handil Jaya	2,91
10.	Jelmu	2,71
11.	Jelutung	3,15
12.	Kasang	2,75

13.	Kasang Jaya	2,92
14.	Kebun Handil	2,91
15.	Kenali Asam Atas	2,69
16.	Kenali Asam Bawah	2,84
17.	Kenali Besar	2,82
18.	Lebak Bandung	2,81
19.	Legok	3,05
20.	Lingkar Selatan	2,84
21.	Mayang Mangurai	2,82
22.	Mudung Laut	2,79
23.	Murni	2,95
24.	Olak Kemang	2,93
25.	Orang Kayo Hitam	2,92
26.	Paal Lima	2,88
27.	Paal Merah	2,97
28.	Pakuan Baru	3,01
29.	Pasar Jambi	2,95
30.	Pasir Panjang	2,84
31.	Pasir Putih	2,84
32.	Payo Lebar	2,81
33.	Payo Selincah	2,76
34.	Pematang Sulur	2,93
35.	Penyengat Rendah	2,84
36.	Rajawali	3,01
37.	Rawasari	2,93
38.	Selamat	2,74
39.	Sijenjang	2,74
40.	Simpang III Sipin	2,97
41.	Simpang IV Sipin	2,76
42.	Solok Sipin	2,86
43.	Suka Karya	2,85
44.	Sulanjana	3,04
45.	Sungai Asam	2,99
46.	Sungai Putri	3,04
47.	Tahtul Yaman	2,82
48.	Talang Bakung	2,81
49.	Talang Banjar	2,68
50.	Talang Jauh	2,88
51.	Tambak Sari	2,84
52.	Tanjung Johor	2,91
53.	Tanjung Pasir	2,77

54.	Tanjung Pinang	2,95
55.	Tanjung Raden	2,95
56.	Tanjung Sari	2,87
57.	Telanai Pura	2,96
58.	Teluk Kenali	3,05
59.	Tengah	2,81
60.	Thehok	3,08
61.	Ulu Gedong	2,72
62.	Wijayapura	2,84

Sumber : data primer diolah

4. Biaya/tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaran yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

NO	KELURAHAN	NILAI RATA-RATA
1.	Arab Melayu	2,64
2.	Bagan Pete	3,29
3.	Beliung	3,29
4.	Beringin	3,41
5.	Budiman	3,00
6.	Buluran Kenali	3,36
7.	Cempaka Putih	3,01
8.	Eka Jaya	3,33
9.	Handil Jaya	3,32
10.	Jelmu	3,52
11.	Jelutung	3,47
12.	Kasang	3,38
13.	Kasang Jaya	3,09
14.	Kebun Handil	3,43
15.	Kenali Asam Atas	2,92
16.	Kenali Asam Bawah	3,20
17.	Kenali Besar	3,24
18.	Lebak Bandung	2,79
19.	Legok	3,60
20.	Lingkar Selatan	3,44
21.	Mayang Mangurai	3,42
22.	Mudung Laut	3,21

23.	Murni	3,35
24.	Olak Kemang	3,48
25.	Orang Kayo Hitam	3,43
26.	Paal Lima	3,20
27.	Paal Merah	3,41
28.	Pakuan Baru	3,29
29.	Pasar Jambi	3,33
30.	Pasir Panjang	3,62
31.	Pasir Putih	3,32
32.	Payo Lebar	3,05
33.	Payo Selincah	3,29
34.	Pematang Sulur	3,23
35.	Penyengat Rendah	3,09
36.	Rajawali	3,12
37.	Rawasari	3,19
38.	Selamat	3,05
39.	Sijenjang	3,16
40.	Simpang III Sipin	3,04
41.	Simpang IV Sipin	3,41
42.	Solok Sipin	3,27
43.	Suka Karya	3,35
44.	Sulanjana	3,42
45.	Sungai Asam	3,52
46.	Sungai Putri	3,39
47.	Tahtul Yaman	3,42
48.	Talang Bakung	3,29
49.	Talang Banjar	2,89
50.	Talang Jauh	3,46
51.	Tambak Sari	3,00
52.	Tanjung Johor	3,50
53.	Tanjung Pasir	3,43
54.	Tanjung Pinang	3,36
55.	Tanjung Raden	3,92
56.	Tanjung Sari	3,37
57.	Telanai Pura	3,39
58.	Teluk Kenali	3,41
59.	Tengah	3,37
60.	Thehok	3,23
61.	Ulu Gedong	3,36
62.	Wijayapura	3,12

Sumber : data primer diolah

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

NO	KELURAHAN	NILAI RATA-RATA
1.	Arab Melayu	2,76
2.	Bagan Pete	3,17
3.	Beliung	3,19
4.	Beringin	3,20
5.	Budiman	3,14
6.	Buluran Kenali	3,16
7.	Cempaka Putih	2,84
8.	Eka Jaya	3,08
9.	Handil Jaya	3,27
10.	Jelmu	3,19
11.	Jelutung	3,37
12.	Kasang	3,10
13.	Kasang Jaya	3,03
14.	Kebun Handil	3,14
15.	Kenali Asam Atas	2,99
16.	Kenali Asam Bawah	3,24
17.	Kenali Besar	3,07
18.	Lebak Bandung	2,84
19.	Legok	3,36
20.	Lingkar Selatan	3,04
21.	Mayang Mangurai	3,14
22.	Mudung Laut	3,09
23.	Murni	3,23
24.	Olak Kemang	3,29
25.	Orang Kayo Hitam	3,35
26.	Paal Lima	3,17
27.	Paal Merah	3,20
28.	Pakuan Baru	3,25
29.	Pasar Jambi	3,21
30.	Pasir Panjang	3,50
31.	Pasir Putih	3,27
32.	Payo Lebar	2,99
33.	Payo Selincah	3,09

34.	Pematang Sulur	3,11
35.	Penyengat Rendah	3,19
36.	Rajawali	3,12
37.	Rawasari	3,13
38.	Selamat	3,07
39.	Sijenjang	3,13
40.	Simpang III Sipin	2,91
41.	Simpang IV Sipin	3,30
42.	Solok Sipin	3,28
43.	Suka Karya	3,39
44.	Sulanjana	3,21
45.	Sungai Asam	3,45
46.	Sungai Putri	3,38
47.	Tahtul Yaman	3,38
48.	Talang Bakung	3,15
49.	Talang Banjar	2,80
50.	Talang Jauh	2,97
51.	Tambak Sari	2,97
52.	Tanjung Johor	3,31
53.	Tanjung Pasir	3,31
54.	Tanjung Pinang	3,17
55.	Tanjung Raden	3,73
56.	Tanjung Sari	3,09
57.	Telanai Pura	3,36
58.	Teluk Kenali	3,24
59.	Tengah	3,45
60.	Thehok	3,24
61.	Ulu Gedong	3,17
62.	Wijayapura	3,04

Sumber : data primer diolah

6. Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksanan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

NO	KELURAHAN	NILAI RATA-RATA
1.	Arab Melayu	2,69
2.	Bagan Pete	2,97
3.	Beliung	2,97
4.	Beringin	3,09

5.	Budiman	3,03
6.	Buluran Kenali	3,04
7.	Cempaka Putih	2,84
8.	Eka Jaya	2,91
9.	Handil Jaya	3,05
10.	Jelmu	3,00
11.	Jelutung	3,23
12.	Kasang	2,92
13.	Kasang Jaya	2,93
14.	Kebun Handil	2,95
15.	Kenali Asam Atas	3,00
16.	Kenali Asam Bawah	3,05
17.	Kenali Besar	2,91
18.	Lebak Bandung	2,99
19.	Legok	3,21
20.	Lingkar Selatan	2,97
21.	Mayang Mangurai	2,97
22.	Mudung Laut	2,92
23.	Murni	3,16
24.	Olak Kemang	3,05
25.	Orang Kayo Hitam	2,95
26.	Paal Lima	2,99
27.	Paal Merah	3,09
28.	Pakuan Baru	3,11
29.	Pasar Jambi	3,11
30.	Pasir Panjang	3,05
31.	Pasir Putih	2,99
32.	Payo Lebar	2,99
33.	Payo Selincah	2,92
34.	Pematang Sulur	2,96
35.	Penyengat Rendah	2,96
36.	Rajawali	3,15
37.	Rawasari	3,04
38.	Selamat	3,01
39.	Sijenjang	3,05
40.	Simpang III Sipin	2,95
41.	Simpang IV Sipin	2,95
42.	Solok Sipin	3,00
43.	Suka Karya	3,41
44.	Sulanjana	3,16
45.	Sungai Asam	3,07

46.	Sungai Putri	3,12
47.	Tahtul Yaman	3,01
48.	Talang Bakung	2,99
49.	Talang Banjar	2,77
50.	Talang Jauh	2,97
51.	Tambak Sari	3,00
52.	Tanjung Johor	3,05
53.	Tanjung Pasir	2,88
54.	Tanjung Pinang	3,00
55.	Tanjung Raden	3,03
56.	Tanjung Sari	3,19
57.	Telanai Pura	3,05
58.	Teluk Kenali	3,05
59.	Tengah	2,95
60.	Thehok	3,07
61.	Ulu Gedong	2,95
62.	Wijayapura	2,97

Sumber : data primer diolah

7. Perilaku pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

NO	KELURAHAN	NILAI RATA-RATA
1.	Arab Melayu	2,72
2.	Bagan Pete	3,04
3.	Beliung	2,96
4.	Beringin	3,18
5.	Budiman	3,01
6.	Buluran Kenali	3,07
7.	Cempaka Putih	2,99
8.	Eka Jaya	2,95
9.	Handil Jaya	2,96
10.	Jelmu	2,99
11.	Jelutung	3,21
12.	Kasang	2,95
13.	Kasang Jaya	3,11
14.	Kebun Handil	2,95
15.	Kenali Asam Atas	3,01
16.	Kenali Asam Bawah	3,00
17.	Kenali Besar	2,93
18.	Lebak Bandung	2,89
19.	Legok	3,18

20.	Lingkar Selatan	2,86
21.	Mayang Mangurai	3,01
22.	Mudung Laut	3,03
23.	Murni	3,08
24.	Olak Kemang	3,01
25.	Orang Kayo Hitam	2,93
26.	Paal Lima	3,00
27.	Paal Merah	3,08
28.	Pakuan Baru	3,09
29.	Pasar Jambi	3,08
30.	Pasir Panjang	3,00
31.	Pasir Putih	3,04
32.	Payo Lebar	2,96
33.	Payo Selincah	2,95
34.	Pematang Sulur	2,95
35.	Penyengat Rendah	3,12
36.	Rajawali	3,16
37.	Rawasari	3,01
38.	Selamat	2,93
39.	Sijenjang	3,19
40.	Simpang III Sipin	2,99
41.	Simpang IV Sipin	2,95
42.	Solok Sipin	2,99
43.	Suka Karya	3,49
44.	Sulanjana	3,11
45.	Sungai Asam	3,01
46.	Sungai Putri	3,05
47.	Tahtul Yaman	2,99
48.	Talang Bakung	2,96
49.	Talang Banjar	2,86
50.	Talang Jauh	2,97
51.	Tambak Sari	2,99
52.	Tanjung Johor	3,04
53.	Tanjung Pasir	2,99
54.	Tanjung Pinang	3,03
55.	Tanjung Raden	3,01
56.	Tanjung Sari	3,11
57.	Telanai Pura	3,04
58.	Teluk Kenali	3,08
59.	Tengah	3,03
60.	Thehok	3,14

61.	Ulu Gedong	3,00
62.	Wijayapura	2,99

Sumber : data primer diolah

8. Maklumat pelayanan

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

NO	KELURAHAN	NILAI RATA-RATA
1.	Arab Melayu	2,73
2.	Bagan Pete	2,92
3.	Beliung	3,03
4.	Beringin	3,04
5.	Budiman	2,99
6.	Buluran Kenali	2,99
7.	Cempaka Putih	2,99
8.	Eka Jaya	2,95
9.	Handil Jaya	3,00
10.	Jelmu	3,01
11.	Jelutung	3,23
12.	Kasang	2,96
13.	Kasang Jaya	2,95
14.	Kebun Handil	2,92
15.	Kenali Asam Atas	3,03
16.	Kenali Asam Bawah	3,01
17.	Kenali Besar	2,93
18.	Lebak Bandung	2,90
19.	Legok	3,38
20.	Lingkar Selatan	3,00
21.	Mayang Mangurai	2,99
22.	Mudung Laut	2,99
23.	Murni	3,09
24.	Olak Kemang	3,00
25.	Orang Kayo Hitam	3,03
26.	Paal Lima	2,95
27.	Paal Merah	3,22
28.	Pakuan Baru	3,11
29.	Pasar Jambi	3,05
30.	Pasir Panjang	2,97
31.	Pasir Putih	3,04

32.	Payo Lebar	3,04
33.	Payo Selincah	3,03
34.	Pematang Sulur	2,97
35.	Penyengat Rendah	3,08
36.	Rajawali	3,12
37.	Rawasari	3,00
38.	Selamat	2,92
39.	Sijenjang	3,11
40.	Simpang III Sipin	3,07
41.	Simpang IV Sipin	2,96
42.	Solok Sipin	2,99
43.	Suka Karya	3,15
44.	Sulanjana	3,17
45.	Sungai Asam	2,97
46.	Sungai Putri	3,09
47.	Tahtul Yaman	2,97
48.	Talang Bakung	3,00
49.	Talang Banjar	2,73
50.	Talang Jauh	3,00
51.	Tambak Sari	3,00
52.	Tanjung Johor	3,01
53.	Tanjung Pasir	3,01
54.	Tanjung Pinang	3,01
55.	Tanjung Raden	3,04
56.	Tanjung Sari	3,20
57.	Telanai Pura	2,99
58.	Teluk Kenali	3,09
59.	Tengah	2,99
60.	Thehok	3,12
61.	Ulu Gedong	2,95
62.	Wijayapura	2,97

Sumber : data primer diolah

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

NO	KELURAHAN	NILAI RATA-RATA
1.	Arab Melayu	2,39
2.	Bagan Pete	2,73
3.	Beliung	2,80

4.	Beringin	2,93
5.	Budiman	2,83
6.	Buluran Kenali	2,85
7.	Cempaka Putih	2,70
8.	Eka Jaya	2,69
9.	Handil Jaya	2,96
10.	Jelmu	2,51
11.	Jelutung	3,09
12.	Kasang	2,77
13.	Kasang Jaya	2,79
14.	Kebun Handil	2,88
15.	Kenali Asam Atas	2,65
16.	Kenali Asam Bawah	2,88
17.	Kenali Besar	2,84
18.	Lebak Bandung	2,79
19.	Legok	3,03
20.	Lingkar Selatan	2,82
21.	Mayang Mangurai	2,95
22.	Mudung Laut	2,64
23.	Murni	2,70
24.	Olak Kemang	2,81
25.	Orang Kayo Hitam	2,73
26.	Paal Lima	2,87
27.	Paal Merah	3,01
28.	Pakuan Baru	3,09
29.	Pasar Jambi	2,71
30.	Pasir Panjang	2,80
31.	Pasir Putih	2,91
32.	Payo Lebar	2,79
33.	Payo Selincah	2,76
34.	Pematang Sulur	2,80
35.	Penyengat Rendah	2,77
36.	Rajawali	2,99
37.	Rawasari	2,89
38.	Selamat	2,08
39.	Sijenjang	2,69
40.	Simpang III Sipin	2,79
41.	Simpang IV Sipin	2,76
42.	Solok Sipin	2,51
43.	Suka Karya	2,85
44.	Sulanjana	3,11

45.	Sungai Asam	3,00
46.	Sungai Putri	2,53
47.	Tahtul Yaman	2,75
48.	Talang Bakung	2,76
49.	Talang Banjar	2,57
50.	Talang Jauh	2,84
51.	Tambak Sari	2,78
52.	Tanjung Johor	3,00
53.	Tanjung Pasir	2,77
54.	Tanjung Pinang	2,89
55.	Tanjung Raden	2,92
56.	Tanjung Sari	2,83
57.	Telanai Pura	2,80
58.	Teluk Kenali	2,85
59.	Tengah	2,73
60.	Thehok	3,00
61.	Ulu Gedong	2,59
62.	Wijayapura	2,85

Sumber : data primer diolah

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata ketimbangan" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 13 (tiga belas) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Dari Nilai Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Berisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Unit Pelayanan x 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

a. Menambah unsur yang dianggap relevan

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah unsur tetap

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,61	C	Kurang Baik
3	3,064 - 3,532	76,61 - 88,31	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel hasil pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	KELURAHAN	KATEGORI		SKOR
1.	Arab Melayu	C	Kurang Baik	65,86
2.	Bagan Pete	C	Kurang Baik	74,19
3.	Beliung	C	Kurang Baik	74,78
4.	Beringin	B	Baik	77,66
5.	Budiman	C	Kurang Baik	74,25
6.	Buluran Kenali	C	Kurang Baik	76,01
7.	Cempaka Putih	C	Kurang Baik	71,57
8.	Eka Jaya	C	Kurang Baik	73,37
9.	Handil Jaya	C	Kurang Baik	76,04
10.	Jelmu	C	Kurang Baik	74,16
11.	Jelutung	B	Baik	80,77
12.	Kasang	C	Kurang Baik	74,09
13.	Kasang Jaya	C	Kurang Baik	74,48
14.	Kebun Handil	C	Kurang Baik	74,78
15.	Kenali Asam Atas	C	Kurang Baik	72,90
16.	Kenali Asam Bawah	C	Kurang Baik	75,30
17.	Kenali Besar	C	Kurang Baik	73,43
18.	Lebak Bandung	C	Kurang Baik	71,73
19.	Legok	B	Baik	81,31
20.	Lingkar Selatan	C	Kurang Baik	74,32
21.	Mayang Mangurai	C	Kurang Baik	75,19
22.	Mudung Laut	C	Kurang Baik	73,54
23.	Murni	B	Baik	76,73

24.	Olak Kemang	C	Kurang Baik	76,52
25.	Orang Kayo Hitam	C	Kurang Baik	75,59
26.	Paal Lima	C	Kurang Baik	74,96
27.	Paal Merah	B	Baik	78,23
28.	Pakuan Baru	B	Baik	77,77
29.	Pasar Jambi	C	Kurang Baik	76,48
30.	Pasir Panjang	B	Baik	76,71
31.	Pasir Putih	C	Kurang Baik	76,11
32.	Payo Lebar	C	Kurang Baik	73,15
33.	Payo Selincah	C	Kurang Baik	73,89
34.	Pematang Sulur	C	Kurang Baik	73,49
35.	Penyengat Rendah	C	Kurang Baik	74,78
36.	Rajawali	B	Baik	77,51
37.	Rawasari	C	Kurang Baik	75,30
38.	Selamat	C	Kurang Baik	71,70
39.	Sijenjang	C	Kurang Baik	75,96
40.	Simpang III Sipin	C	Kurang Baik	73,04
41.	Simpang IV Sipin	C	Kurang Baik	75,04
42.	Solok Sipin	C	Kurang Baik	74,81
43.	Suka Karya	B	Baik	79,66
44.	Sulanjana	B	Baik	78,58
45.	Sungai Asam	B	Baik	77,66
46.	Sungai Putri	C	Kurang Baik	76,95
47.	Tahtul Yaman	C	Kurang Baik	75,36
48.	Talang Bakung	C	Kurang Baik	74,22
49.	Talang Banjar	C	Kurang Baik	68,78
50.	Talang Jauh	C	Kurang Baik	74,44
51.	Tambak Sari	C	Kurang Baik	73,43
52.	Tanjung Johor	B	Baik	76,69
53.	Tanjung Pasir	C	Kurang Baik	74,70
54.	Tanjung Pinang	C	Kurang Baik	75,74
55.	Tanjung Raden	B	Baik	78,96
56.	Tanjung Sari	B	Baik	77,18
57.	Telanai Pura	B	Baik	76,57
58.	Teluk Kenali	B	Baik	76,91
59.	Tengah	C	Kurang Baik	75,80
60.	Thehok	B	Baik	77,55
61.	Ulu Gedong	C	Kurang Baik	73,33
62.	Wijayapura	C	Kurang Baik	73,91

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan analisa di atas, maka nilai indeks secara keseluruhan diperoleh dengan angka indeks 3,009 setelah dikonversi menjadi 75,22 dengan mutu pelayanan pada kategori baik “C”.

No	Indikator	Kesimpulan
1.	IKM setelah dikonversi	75,22
2.	Mutu pelayanan	C
3.	Kinerja unit pelayanan	Kurang Baik

Sumber : data primer diolah

Permasalahan/Kendala

1. Lokasi penilaian berbeda
2. Unit kerja yang disurvei pada tahun 2019 belum sama sekali disurvei sehingga belum ada rencana tindaklanjut perbaikan pelayanan pada tahun 2020

Solusi

Direncanakan akan dibuat perbaikan pelayanan pada tahun 2021 sesuai dengan data survei pelayanan pada tahun 2020.

Selanjutnya pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Jambi mendapatkan nilai IKM sebesar 84,25 persen dari target 86 persen atau kategori BAIK “B”, dengan jumlah responden sebanyak 875 orang.

Nilai Unsur Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi

Tahun 2020

No	Unsur Pelayanan	Bobot Rata-Rata Unsur	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi
1	2	3	4	5	6=5x25
U1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	2934	3,353	0,369	9,225
U2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3958	3,381	0.372	9,3
U3	Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan	2864	3,275	0,360	9,525

U4	Kemungkinan Adanya Pungutan Biaya Lainnya Selain Tarif	3027	3,459	0,381	9,250
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan Antar Tercantum Dalam Standar Pelayanan Dengan Hasil Yang Diberikan	2945	3,366	0,370	9,250
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas Memberikan Pelayanan	2947	3,368	0,370	9,3
U7	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan	2956	3,378	0,372	9,250
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	2940	3,360	0,370	10,175
U9	Penanganan Pengaduan Layanan Pengaduan	3236	3,398	0,407	10,175

No	Indikator	Kesimpulan
1.	IKM setelah dikonversi	84,25
2.	Mutu pelayanan	B
3.	Kinerja unit pelayanan	Baik

Sumber : data primer diolah

Lebih lanjut pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mendapatkan nilai IKM sebesar 86,77 persen dari target 86 persen atau kategori BAIK “B”, dengan jumlah responden 249 orang.

Nilai Unsur Pelayanan DUKCAPIL Kota Jambi

Tahun 2020

No	Unsur Pelayanan	Bobot Rata-Rata Unsur	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi
1	2	3	4	5	6=5x25
U1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	843	3,386	0,376	9,39
U2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	837	3,361	0,373	9,33
U3	Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan	830	3,333	0,370	9,25
U4	Kemungkinan Adanya Pungutan Biaya Lainnya Selain Tarif	965	3,876	0,430	10,75
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan Antar Tercantum Dalam Standar Pelayanan Dengan Hasil Yang Diberikan	849	3,410	0,378	9,46
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas Memberikan Pelayanan	842	3,382	0,375	9,38
U7	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan	850	3,414	0,379	9,47
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	817	3,281	0,364	9,11
U9	Penanganan Pengaduan Layanan Pengaduan	953	3,827	0,425	10,62

No	Indikator	Kesimpulan
1.	IKM setelah dikonversi	86,77
2.	Mutu pelayanan	B
3.	Kinerja unit pelayanan	Baik

Sumber : data primer diolah

SASARAN 2
MENURUNKAN TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP PERDA DAN PERWAL

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 2 (kedua) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel. 3.4. berikut.

Tabel 3.4.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 2 (kedua) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
2.	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaraan PERDA dan PERWAL	82,00%	100,00%	80,00%	75,00%	93,75%	60,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,00%			93,75%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Pada IKU keenam yaitu penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL dengan target 80,00 persen terealisasi 75,00 persen atau dengan capaian 93,75 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI** dengan formulasi pengukuran jumlah pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan sebanyak 119 kasus dibagi jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan sebanyak 119 kasus maka didapat capaian sebesar 100,00 persen.

LAPORAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

No	Jenis Penertiban	Nomor PERDA dan Peraturan Perundangan Yang Dilanggar	Jumlah
1.	Gangguan	Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pergudangan	1

2.	Asusila dan pelacuran		1
3.	Perizinan tidak lengkap	Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 02 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum	1
4.	Tidak memiliki perizinan	Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Tempat Umum	6
5.	Perizinan tidak lengkap	Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ozon Gangguan (HO)	1
6.	Perizinan tidak lengkap	Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan (IMB)	2
7.	Perizinan tidak lengkap	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	1
8.	Perizinan tidak lengkap	Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pergudangan	1
9.	Perizinan tidak lengkap	Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila	1
10.	Perizinan tidak lengkap	Perda Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum	4
11.	Ketertiban Umum	Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 09 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha	1
12.	Bukan pada zona pergudangan	Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pergudangan	3
13.	Bukan pada zona pergudangan	Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi (RTRW)	1
14.	Perizinan tidak lengkap	Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Tempat Umum	1
15.	Ketertiban Umum	Perda Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pengelolan Sampah	1

16.	Asusila dan pelacuran	Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila	2
17.	Perizinan tidak lengkap	Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 09 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha	3
18.	Gangguan	Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (HO)	1
JUMLAH			32

LAPORAN PENEGAKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

No	Jenis Penertiban	Nomor Perkada dan Peraturan Perundangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban
1.	Tidak menjalankan protokol kesehatan	Perwal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Area Publik/Di lingkungan Usaha dan masayarakat Dalam Pemberlakukan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi	74
2.	Melakukan aktivitas atau operasional usah, pada saat pemberlakukan larangan penutupan sementara dan/atau penundaan kegiatan operasional usaha berlangsung	Instruksi Walikota Jambi Nomor 05/Ins/IV/HKU/2020 tentang Perpanjangan Penutupan Sementara Dan/Atau Penundaan Kegiatan Usaha Pariwisata Dalam Upaya Antisipasi Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19)	5
		Perwal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Area Publik/Dilingkungan Usaha dan Masyarakat Dalam Pemberlakuka Relaksaasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi	5

3.	Melewati Jam Operasional	Perwal Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet (WARNET	3
JUMLAH			87

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut. Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selama tahun 2020

1) Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran perda dan perwal

   Target: 119 kasus, Realisasi: 119 Kasus, capaian kinerja 100 persen (BAIK). Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya komitmen pimpinan dalam merespon serta menindaklanjuti setiap laporan tentang adanya indikasi pelanggaran perda, serta hasil dari patroli yang dilaksanakan oleh anggota Satpol PP dilapangan sehingga, indicator kinerja sasaran tersebut memperoleh predikat Baik . namun dari keberhasilan capaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tersebut masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian sarsan yaitu :

   1. Luasnya cakupan penegakan perda yang meliputi luas wilayah, jumlah perda dan masyarakat atau Badan Usaha;
   2. Kurangnya jumlah PPNS untuk penegakan perda.

untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) seperti : Polisi, TNI, Kehakiman dalam melaksanakan penegakan Perda;
2. Mengirimkan anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS setiap tahun

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator sasaran tersebut dikarenakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dengan dilaksanakannya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, badan hukum serta aparatur. Selain itu diberlakukannya penindakan terhadap pelanggar perda menjadi pendorong akan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut sehingga memperoleh predikat Baik.

SASARAN 3

MENINGKATKAN PELAYANAN PADA KONDISI PRA, TANGGAP DAN PASCA KEBAKARAN SERTA KEBENCANAAN

Sasaran ketiga mengenai meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan yang didukung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 3 (ketiga) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel. 3.5. berikut.

Tabel 3.5.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 3 (ketiga) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	7.	Cakupan pelayan an pemadam kebakar an	100,00%	100,00%	100,00%	93,63%	93,63%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,00%			93,63%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Iku ketujuh yaitu cakupan pelayanan pemadam kebakaran dengan target 100,00% terealisasi 93,63 persen atau dengan capaian 93,63 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dimana data bersumber dari 5 (lima) indikator penentu, dengan sub indikator dimasing-masing akan dianalisa sebagai berikut:

1) Tercapainya Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) dan Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran sebesar 100%, artinya seluruh indikator yang menjadi tolak ukur dalam indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Ada 2 sub indikator dalam indikator ini, yaitu :
   a) Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) untuk Tahun 2020 targetnya 18 menit dan dari pemadaman kebakaran yang dilakukan selama Tahun 2020 rata-rata di angka 17 menit. Ini berarti Tingkat Waktu Tanggap sudah tercapai bahkan melebihi target yang ada.
   b) Jumlah warga Kota Jambi yang memperoleh layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama Tahun 2020 sebanyak 184 KK, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 85 KK, dengan begitu ketercapaian bagian ini sebesar 100%
2) Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran, Pelayanan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran/ Operasi Darurat Non

Kebakaran/ Operasi Non Kebakaran di Tahun 2020 sebesar 100% sedangkan target ketercapaian sebesar 100%. Berikut rincian sub indikatornya :

a) Jumlah Operasi Pemadam Kebakaran selama Tahun 2020 sebanyak 54 Kali sedangkan target operasi pemadaman kebakaran di Tahun 2020 sebanyak 80 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2020 yaitu sebanyak 54, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayaninya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2020 sebesar 100%.
b) Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran sebanyak 54 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 54 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2020 yaitu sebanyak 54, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayaninya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2020 sebesar 100%.
c) Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (Operasi Darurat Non KebakaranI : Bencana Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor, Orang tenggelam, Orang Masuk Sumur, Bunuh Diri, dsb di tahun 2020 sebanyak 33 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 25 kali. Banyaknya operasi penyelamatan dan evakuasi darurat non kebakaran yang melebihi target yang ditetapkan dapat terlayani dengan maksimal oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Jambi, dengan begitu ketercapaian subindikator ini sebesar 100%

d) Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (Non Kebakaran) : evakuasi sarang tawon, penangkapan ular, penangkapan anjing liar, dsb di tahun 2020 sebanyak 97 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 25 kali. Banyaknya operasi penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang melebihi target yang ditetapkan dapat terlayani dengan maksimal oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dengan begitu ketercapaian subindikator ini sebesar 100%.

3) Tercapainya Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran dan kebencanaan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi di Tahun 2020 sebesar 100%. Ini didukung oleh beberapa subindikator yaitu :

a) Jumlah Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan investigasi pasca kebakaran dan kebencanaan selama Tahun 2020 sebanyak 54 Kali sedangkan target Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan investigasi pasca kebakaran dan kebencanaan di Tahun 2020 sebanyak 85 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2020 yaitu sebanyak 54 kali, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayaninya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2020 sebesar 100%.

b) Pelayan Jumlah warga Kota Jambi yang menerima dana bantuan korban kebakaran/ bencana lainnya, selama Tahun 2020 sebanyak 70 KK sedangkan target Pelayan Jumlah warga Kota Jambi yang

menerima dana bantuan korban kebakaran/ bencana lainnya di Tahun 2020 sebanyak 150 KK. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2020 yaitu sebanyak 54 kali, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayaninya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2020 sebesar 100%.

4) Tercapainya Standarisasi Sarana dan Prasarana Kebakaran Dan Kebencanaan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi di Tahun 2020 sebesar 100%. Ini didukung oleh beberapa subindikator yaitu :
   a) Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Pemadam Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3.000-5.000 liter di Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 1 unit mobil pemadam kebakaran. Dengan adanya rekomendasi dari DPRD Kota Jambi maka ada penambahan anggaran untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sehingga pengadaan mobil pemadam kebakaran di Tahun 2020 sebanyak 3 unit. Jadi ketercapaian di sub indikator ini sebesar 100%.
   b) Jumlah Standarisasi Sarana dan Sarana Kebakaran dan Kebencanaan di Tahun 2020 sebanyak 1 kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.
   c) Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Peralatan dan Kendaraan Fire Truk di Tahun 2020 sebanyak 12 kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.

d) Jumlah Kegiatan Pendistribusian/ Pergudangan di Tahun 2020 sebanyak 12 Laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.

e) Jumlah Kegiatan Pengendalian Sarana/ Prasarana di Tahun 2020 sebanyak 12 Laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.

5) Tercapainya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Prakebakaran dan Prakebencanaan di Tahun 2020 sebesar 68.18% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, ada beberapa subindikator yang tidak mencapai target, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Jumlah Pelayanan Pemeriksaan APK dan Sarana Proteksi Kebakaran di Tahun 2020 sebanyak 500 gedung atau bangunan, tetapi terealisasi sebanyak 299 kali pemeriksaan gedung dan bangunan lainnya. Hal ini disebabkan oleh pandemic COVID-19 sehingga menghambat berjalannya pemeriksaan ini. Ketercapaian dam subindikator ini sebesar 45.8%

b) Jumlah Wilayah Kota Jambi yang memperoleh pelayanan informasi rawan kebakaran dan kebencanaan di Tahun 2020 sebanyak 20 Lokasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.

e) Jumlah kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di tahun 2020 sebanyak 40 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 30 kali. Banyaknya kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang melebihi target yang ditetapkan dapat terlayani dengan maksimal oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dengan begitu ketercapaian subindikator ini sebesar 100%.

c) Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Relawan kebakaran di masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan terlaksana di Tahun 2020 yang targetkan ada 12 Relawan, dan terealisasi sebanyak 132 relawan. Sehingga realisasi di subindikator ini sebesar 100%.

d) Jumlah Kegiatan Mitigasi Bencana tidak terlaksana di Tahun 2020 yang ditargetkan ada 1 kali Kegiatan, ini disebabkan pandemi COVID-19 yang terjadi di Tahun 2020. Sehingga realisasi di subindikator ini sebesar 0%.

e) Jumlah kegiatan Pendidikan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ditahun 2020 terealisasi sebanyak 19 orang sedangkan ditetapkan sebanyak 30 orang. Tidak maksimalnya subindikator ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan yang tersedia selama Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic COVID-19.

SASARAN 4
MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG ARTI PENTINGNYA IDEOLOGI PANCASILA DAN KEBHINEKAAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Sasaran Keempat yaitu meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 4 (keempat) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel. 3.6. berikut:

Tabel 3.6.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 4 (keempat) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingknya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,00%			100,00%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Dapat dijelaskan bahwa iku ke delapan yaitu persentase pembinaan terhadap maasyarakat terkait ideologi pancasila dengan target 20,00 persen terealisasi 20,00 persen atau dengan capaian 100,00 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dimana formula penghitungan jumlah forum kemasyarakatan yang akan menjadi sasaran dilakukan pembinaan sebanyak 46 Forum dibagi dengan jumlah Forum Kemasyarakatan yang terdaftar sebanyak 230 Forum terdiri dari Orkesmas, Parpol, FKUB, FKDM dan FPK sehingga tercapai 20,00% sesuai target. Pembinaan yang dilakukan terhadap 230 forum kemasyarakatan berupa:

1. Pembinaan Pembauran Kebangsaan

   Menitikberatkan pada pembinaan tentang bagaimana memberikan pemahaman tentang kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk (plural) yang terdiri dari banyak suku/etnis, agama dan ras, sehingga dengan kemajemukan tersebut justru menjadi semangat untuk tetap menyatukan diri dalam bingkai NKRI dan berpegang teguh pada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

   Menitikberatkan pada pembinaan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam memaknai keberadaan jatidirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya, sehingga akan tumbuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembinaan Ideologi Pancasila

   Menitikberatkan pada pembinaan Ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan harus diimplementasikan oleh seluruh masyarakat secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila dapat menjiwai dan menyemangati setiap perilaku rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan dan tidak mudah tergiur oleh rayuan ideologi lain yang nampak menjanjikan namun kenyataannya justru melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

   Peran penting dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini adalah : sebagai Detekni Dini terhadap gejala yang dapat menimbulkan keresahan dan gangguan kamtibmas di masyarakat. Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ini diketuai oleh Bapak Walikota Jambi dengan timnya terdiri dari Kaban Kesbangpol Kota Jambi, Staff Ahli Bidang Pembangunan, Asisten Pemerintahan Sekda Kota Jambi, Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Kota Jambi, Kasat Bimas Polresta Jambi, Anggota BIN Daerah Jambi, Kasubbid Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Kota Jambi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. Setiap

anggota tim melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi di wilayahnya khususnya dan Kota Jambi pada umumnya akan adanya gejala gejala atau keadaan yang dapat menimbulkan keresahan dan gangguan kamtibmas di tengah tengah masyarakat. Selanjutnya disampaikan pada kegiatan Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

5. Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial

   Tim Penanganan Konflik Sosial ini adalah sebagai upaya untuk pencegahan dan deteksi dini terhadap konflik sosial di daerah dalam rangka pemetaan terhadap potensi konflik sosial yang ada didaerah. Tim PKS terdiri dari Kepala SKPD se Kota. Ruang lingkup Penanganan Konflik Sosial meliputi : Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascca Konflik. Rapat Penanganan Konflik Sosial.

6. Fasilitasi Tim Pemantauan Orang Asing Dalam Wilayah Kota Jambi

   Keberadaan Tim ini memegang peranan penting dalam upaya mengantisipasi berbagai dampak yang akan timbul sebagai akibat pesatnya arus globalisasi dan hegemoni politik internasional yang berdampak pada prilaku masyarakat Indonesia khususnya Kota Jambi. Tim POA terdiri dari : Imigrasi, BAIS TNI, BINDA, KeMenag, Intel Polresta,Disdukcapil,Diknas,Disperindag,dan Badan Kesbangpol Kota Jambi.

7. Fasilitasi Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB)

   Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Ummat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

8. Fasilitasi Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Jambi.

   Tim ini dibentuk berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Jambi Tahun 2020.

9. Fasilitasi Tim Fasilitasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan serta Komunikasi Pegiat Seni di Kota Jambi

SASARAN 5
MENINGKATKAN PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PARPOL DALAM PEMBANGUNAN

Sasaran Kelima yaitu meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 5 (kelima) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel. 3.7. berikut.

Tabel 3.7.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 5 (kelima) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	9	Persenta se orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyara kat	20,00%	100,00%	20,00%	48,71%	243%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,00%			243%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Selanjutnya IKU kesembilan yaitu persentase orkesmas dan parpol yang berperan aktif dimasyarakat dengan target 20,00 persen terealisasi 48,71 persen atau dengan capaian 243 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dimana jumlah orkesmas dan parpol yang aktif sebanyak 113 dibagi dengan jumlah orkesmas dan parpol yang terdaftar di database Badan Kesbangpol Kota Jambi sebanyak 232 Orkesmas sehingga tercapai 48,71 persen melebihi target yang ditetapkan.

Adapun upaya yang dilakukan terhadap orkemas dan parpol sehingga berperan aktif dalam pembangunan yaitu melalui :

1. Pembinaan dan Pemantauan Orkemas

   Dalam rangka Pembinaan dan Pemantauan Orkemas dibentuk Tim Ketahanan Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan :

   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang telah dirubah dengan PerPu No. 2 tahun 2017.
   b. Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2016
   c. Peraturan Pemerintah RI No. 59 tahun 2016 tentang Ormas WNA
   d. Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 2017 pemberian bantuan dan pencegahan tindakan pidana pendanaan teroris.
   e. Permendagri RI No. 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas
   f. Permendagri RI No. 59 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pendaftaran Ormas
   g. Permendagri RI No. 58 tahun 2017 tentang Kerja Sama dalam Negeri dan Kesbangpol dan Pemerintahan Umum.

   Badan Kesbangpol Kota Jambi menetapkan lima kriteria Organisasi Kemasyarakatan yang aktif, adapun kriteria tersebut sebagai wujud dalam mendukung program-program pemerintah. Kriteria Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang aktif, adalah sebagai berikut:

   1. Memiliki Sekretariat Organisasi Kemasyarakatan;

2. Tersedianya Struktur Organisasi dan AD/ART;
3. Melaksanakan rapat rutin
4. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi;
5. Melaksanakan kegiatan di masyarakat

Sebagai contoh dari peran aktif yang telah dilakukan oleh Ormas dan Parpol yaitu :

1. Ormas OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) telah berperan aktif dalam melaksanakan penelitian terhadap masyarakat yang pernah terlibat dengan kegiatan prostitusi dan terindikasi HIV/AIDS dengan harapan pemberian pelayanan terhadap orang-orang tersebut bisa diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya (tidak diskriminasi)
2. Ormas Ki - Sumo (Komunitas Suka Menolong) telah melaksanakan kegiatan sunatan massal, donor darah dan operasi mata katarak
3. Lembaga Anti Narkoba (LAN) telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada siswa sekolah menengah pertama tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, sehingga dengan adanya sosialisasi yang dilakukan sejak dini kepada pelajar SLTP ini, maka diharapkan generasi muda dapat menjauhi dan menghindari diri dari penyalahgunaan Narkoba.
4. Komunitas Pecinta Tekuluk Jambi, yang telah gencar dalam mempromosikan tekuluk sebagai warisan budaya Jambi, sehingga tekuluk saat ini sudah dikenal secara nasional bahkan internasional.
5. Parpol juga berperan aktif melaksanakan kegiatan dalam bentuk pemberian donasi kepada masyarakat yang terkena dampak akibat bencana alam.

2. Fasilitasi Parpol melalui Pendidikan Politik dengan melakukan Sosialisasi tentang Undang Undang Pemilu

3. Fasilitasi Parpol untuk Bantuan Keuangan bagi Parpol dengan pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan Parpol serta melakukan pembinaan untuk tertib administrasi bantuan keuangan Parpol.

Berikut disajikan Data Ormas yang dibina dan Data Ormas yang aktif Pada tahun 2020 sebagai berikut :

a. Data Ormas yang dibina

Ormas dan LSM per kecamatan dalam wilayah Kota Jambi

1. Jambi Hypnoterapy Center (JHC)
2. Asosiasi Pedagang Pasar Aur Duri (APPAD)
3. Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Pecegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesi (LSM BPPK-RI)
4. Himpunan Aspirasi Anak Negeri Anti Manipulasi (HAANAM)
5. Asosiasi Pedagang HasilLAut Dan Sungai (APHLS) Kota Jambi (Organisasi Kemasyarakatan Lokal Kota Jambi)
6. Sanggar Seni Tudung Saji
7. SIDO Bangun Lestari
8. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat eduli Lingkungan Sosial (LSM GEMA PLUS)
9. Perkumpulan Sadar Jambi
10. Himpunan Mahasiswa Tebo (HIMASTE)

b. Orkesmas Cabang MENDGARI Per Kecamatan Dalam Wilayah Kota Jambi

1. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (LT KPSKN – PIN RI)
2. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantai Penyelenggara Triapolitika Republik Indonesi (LP2TRI)
3. Dharmayukti Karini Cabang Jambi (Pengadilan)

4. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Jambi
5. Bhayangkari
6. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Jambi
7. SOKA GAKKAI Indonesia
8. PERSIT Kartika Chandra Kirana Cabang XXII KOORCABREM 042PD/II Sriwijaya
9. Pengurus Cabang Fatayat Nahdatul Ulama Kota Jambi (PC. FATAYAT NU)
10. Ikatan Persaudaraan Alumni Zulhijah
11. Pimpinan Daerah – Persaudaraan Muslimah Kota Jambi (PD-SALIMAH JAMBI)

c. Organisasi Berbadan Hukum Per Kecamatan Dalam Wilayah Kota Jambi

1. Ikatan Pengacara Wanita (IPWJ)
2. Pengurus Daerah Kota Jambi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (The Unity Action Of Indonesian Moslem Students)
3. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PC-NU) Kota Jambi
4. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Indoenasian Street Vendor Association – Kota Jambi
5. Perkumpulan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional Riset manajemen
6. Yayasan Penyuluhan Kesehatan Indonesia
7. Perkumpulan Badan Kontak Taklim (BKMT)
8. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (DPC-HWDI) Kota Jambi
9. Perkumpulan Komunitas Pengawas Korupsi (LSM-KPK)
10. Perkumpulan Komunitas Jambi Cerdas
11. Sentra Komunikasi Mitra POLRI (SENKOM)

12. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jambi (LBH JAMBI)
13. Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia Alisa Khadijah ICMI Kota Jambi
14. Dewan Pimpinan Cabang Garda Bela Negara Nasional (DPC-GBNN) Kota Jambi
15. Jambi Seberang Fotografi (JSF)
16. Yayasan Mulia Dharma Sentosa
17. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC-HNSI)
18. GM. REBIDSI
19. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Repunlik Indonesia (DPC-PWRI)
20. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
21. Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Dan Pembangunan (DPD-JPKP)
22. Lentera Hijau Siginjai Lestari (LEISTARI)
23. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi
24. Badan Peneliti Independen (BPI) Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPN PN)
25. Perkumpulan Keluarga Empat Lawang (HK4L)

Total Ormas yang dibina pada tahun 2020 sebanyak 46 Ormas.

SASARAN 6
MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN

Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur dalam periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Jambi

tahun 2018 – 2023 merupakan prioritas pembangunan yang pertama.

Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.

Infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang berlangsung saat ini belum menunjukan hasil yang memadai untuk memerankan fungsinya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 6 (keenam) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel. 3.8. berikut.

Tabel 3.8.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 6 (keenam) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	10.	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	111,47%	60,77%	65,56%	107,88%	85,79%
RATA-RATA % CAPAIAN					111,47%			107,88%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Untuk mencapai sasaran meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan ditetapkan 1 (satu) IKU yaitu cakupan pelayanan infrastruktur dan utilitas. Dalam pelaksanaannya IKU ini dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Target IKU cakupan layanan infrastruktur dan utilitas tahun 2020 adalah sebesar 60,77 persen, sampai dengan akhir tahun telah dapat dicapai realisasi sebesar 65,56 persen dengan persentase capaian sebesar 107,88 persen, kategori **SANGAT TINGGI**.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kota Jambi, untuk mengatasi permasalahan infrastruktur yang ada di Kota Jambi, selama periode tahun 2018 – 2023 melaksanakan beberapa program yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan bangunan, meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik, menurunkan jumlah titik genangan perkotaan, meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur dan meningkatkan harmonisasi dan konsistensi tata ruang.

Kota Jambi terdiri dari 11 Kecamatan dimana didalamnya terdapat 62 Kelurahan, dengan Visi Pembangunan yaitu **"Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima",** dimana dalam melaksanakan pembangunan selalu menghadapi tantangan dan hambatan, terutama dalam menyambut era perdagangan bebas di kawasan Asean. Untuk itu, sudah sewajarnya segenap komponen bangsa di Kota Jambi, baik aparatur pemerintah, swasta maupun masyarakat secara bahu membahu harus mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

TUGU MONAS KOTA JAMBI

Tugu Keris Siginjai merupakan ikon baru masyarakat Kota Jambi yang menggantikan tugu sebelumnya yang berbentuk Monas yang merupakan salah satu terobosan-terobosan program dan kegiatan yang inovatif namun tetap berlandaskan aturan dan peraturan yang berlaku untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dengan segala keterbatasan merupakan sesuatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Hal ini tentu saja dapat berjalan secara optimal jika pemerintah dapat mengoptimalkan konsep pemberdayaaan masyarakat yang mencakup pembangunan

masyarakat *(community development)* dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah implikasinya kepada Pemerintah Daerah adalah meningkatnya kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota. Sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.

Salah satu kondisi lingkungan KAMPUNG BANTAR di Kota Jambi

tersebut, Pemerintah Kota Jambi melakukan kegiatan inovasi **yaitu Kampung BANTAR (Kampung yang Bersih, Aman dan Pintar)** dan Kegiatan **Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu**

Berasaskan Swadaya (Bangkit Berdaya) di Kota Jambi Guna Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Nasional.

Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan luas 20.538 ha atau 205,38 Km^2 dengan penduduk yang heterogen, berdasarkan hasil registrasi penduduk 2018 tercatat 599.103 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebesar **2.944 jiwa/km2.** Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi dan pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan jasa mempunyai mobilitas penduduk yang tinggi, terutama dari daerah tetangga (mobilitas sirkuler). Disamping sarana dan prasarana transportasi yang sudah relatif lebih baik, maka faktor jarak juga sangat menentukan**.**

Tingkat kepadatan dan heterogenitas penduduk yang cukup tinggi di Kota Jambi selain merupakan faktor kekuatan namun juga sekaligus menjadi faktor kelemahan. Faktor kekuatan dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa sampai saat ini Kota Jambi masuk ke dalam kategori kota yang aman di Indonesia, hal ini berarti tingkat kehidupan sosial budaya dan kehidupan rukun antar umat beragama dan ras di Kota Jambi dinilai sangat baik. Disisi lain kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan masalah dalam penanganan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Jambi yang selama ini berlangsung, mulai dari tahap perencanaan pembangunan telah mencatat rata-rata lebih dari 3.000 usulan kegiatan yang berasal dari tingkat Rukun Tetangga (RT). Namun dalam perjalanan proses perencanaan selanjutnya usulan kegiatan masuk ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, selanjutnya tingkat kecamatan, Forum SKPD hingga pada tahap Musrenbang tingkat Kota usulan tersebut hanya terakomodir tidak lebih dari 45 persen.

TUJUAN AKHIR KONSEP " KAMPUNG BANTAR"

MENJADIKAN SUATU LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TERKECIL LINGKUP RT DI MASYARAKAT :

- ✓ berwawasan lingkungan bersih dan sehat,
- ✓ tercukupinya fasilitas sanitasi dan sarana prasarana lingkungan memadai,
- ✓ permukiman layak huni dan tertata rapi (nyaman),
- ✓ aman dan tertib,
- ✓ tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup baik (Produktif),
- ✓ senantiasa menjaga semangat jiwa gotong-royong, nilai-nilai Agama, kesetiakawanan Nasional, Adat istiadat dan norma-norma Hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara yang lebih berakhlak , beradat dan berbudaya.

Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri masih terdapat inefisiensi dalam anggaran dan waktu pelaksanaan. Untuk suatu kegiatan yang menggunakan anggaran APBD harus mengeluarkan komponen pembiayaan untuk peralatan dan tenaga kerja hingga mencapai 25 persen, PPN 10 persen dan fee pihak penyedia juga hampir 10 persen. Sehingga dapat di jumlahkan total inefisiensi mencapai 45 persen dari total anggaran.

Oleh karena itu BANGKIT BERDAYA dengan berlandaskan semangat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dapat mengoptimalkan pembangunan dan hasil pembangunan dengan lebih baik.

Program BANGKIT BERDAYA merupakan program inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dengan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan berupa bantuan material / bahan bangunan kepada kelompok Rukun Tetangga (RT) dimana usulan yang diajukan telah melalui proses sesuai tahapan perencanaan pembangunan

daerah. Pada tahap pelaksanaan kegiatan semuanya dilakukan oleh swadaya masyarakat dengan berpegang pada asas gotong royong.

Dibalik setiap tetes keringat yang dilakukan oleh masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana utilitas lingkungan yang mereka butuhkan akan tumbuh rasa memiliki yang kuat sehingga mereka secara langsung akan senantiasa menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah mereka bangun. Selain itu kontribusi suka rela yang diberikan oleh keluarga masyarakat dalam turut serta membangun fasilitas yang ada tersebut, seperti konsumsi, fasilitas listrik dan fasilitas keamanan juga akan menumbuhkan rasa memiliki dan kekeluargaan yang lebih tinggi.

PENATAAN KAMPUNG BANTAR
(BERSIH, AMAN DAN PINTAR)

KEGIATAN DIFOKUSKAN PADA TINGKAT RT YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DI TENGAH - TENGAH MASYARAKAT MENGAKSELERASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN .

BERSIH LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN HIJAU, HARUS ADA BANK SAMPAH

AMAN BEBAS NARKOBA , RENDAHNYA ANGKA KRIMINALITAS, KDRT, DAN KASUS PERCERAIAN

PINTAR BEBAS BUTA AKSARA, RENDAHNYA ANGKA PUTUS SEKOLAH, GIZI ANAK (PAUD), POSYANDU TERINTEGRASI, KB, IBU HAMIL & BALITA, RENDAHNYA TINGKAT PENGANGGURAN,

2018	2019	2020
88 RT	154 RT	112 RT

Namun yang paling utama tujuan dari pelaksanaan kegiatan inovatis BANGKIT BERDAYA ini adalah Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Lingkungan RT, Upaya Percepatan Pembangunan dan Sanitasi Masyarakat Perkotaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkungan.

Secara garis besar selama periode tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dengan sasaran meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan dengan indikator sasaran berupa:

1. Titik genangan air

Jumlah total titik genangan = 19 titik. Jumlah titik genangan yang direalisasikan tahun 2019 = 1 titik, dan pada tahun 2020 = 6 titik. Persentase target ditentukan berdasarkan perbandingan Titik Genangan yang ditangani dan *T*otal titik genangan, realisasi capaian kinerja pada tahun 2020 terealisasi sebesar 31,58 % (6 titik genangan)

dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 15,79 % (3 titik genangan).

Di tahun 2019 bidang Sumber Daya air menangani Pengurangan titik genangan, Jumlah total titik genangan adalah 19 titik. Target untuk tahun 2020 adalah 3 titik genangan dan terealisasikan 6 titik di tahun 2020, dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Kota Jambi sehingga mengakibatkan beberapa wilayah tergenang banjir. Adapun penanganan yang telah dilakukan yaitu dilaksanakannya normalisasi pembersihan, pengerukan sedimen dan pemeliharaan sungai yang menjadi titik terjadinya banjir yang mengakibatkan aliran sungai terhambat karena sampah dan sedimentasi. Beberapa pembangunan infrastruktur drainase juga telah dilakukan untuk mengurangi genangan banjir yang terjadi dan terus meningkatkan kualitas pembangunan dengan mengawasi pembangunan infrastruktur sesuai teknis pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang telah disepakati.

2. Rasio jalan kota dalam kondisi baik

Persentase target panjang jalan kota dalam kondisi baik ditentukan berdasarkan perbandingan panjang jalan kota dalam kondisi baik sedang dengan panjang seluruh jalan kota, realisasi capaian kinerja persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 87.54% atau sepanjang 446,844 km, dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 91.79% atau sepanjang 468,56 km dari total panjang Kota Jambi 510,452 km, Pencapaian sebesar 95.37%.

Kegiatan yang dilakukan hanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, tidak ada penambahan jalan, Kendala yang dihadapi sampai saat ini masih sama yaitu terbatasnya anggaran perbaikan jalan;

Pemeliharaan Jalan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan, yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan. Agar tujuan pemeliharaan jalan dapat tercapai secara optimal diperlukan Perencanaan Pemeliharaan Jalan.

Analisis Kinerja

Jalan adalah aset yang harus dikelola dan difungsikan secara optimal. Pada kenyatannya, jaringan jalan cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada jalan. Maka untuk memperlambat laju penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak, perlu dilakukan program pemeliharaan dengan baik agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan.

Program pemeliharaan jalan harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan banyaknya kendala dan permasalahan, seperti keterbatasan dana menjadi kendala untuk pemeliharaan jaringan jalan, menyebabkan belum bisa terpenuhinya seluruh kebutuhan pemeliharaan rutin jaringan jalan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu penentuan urutan yang dapat digunakan sebagai suatu acuan dalam penyusunan program pemeliharaan jaringan jalan. Penentuan urutan prioritas pemeliharaan jaringan jalan tersebut harus melihat dari berbagai kriteria sehingga menghasilkan hasil yang akurat dan tepat.

Solusi

Meningkatkan frekuensi pemeliharaan dengan interval penanganan setiap satu tahun melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang di rencanakan secara rutin dan yang tidak direncanakan tergantung pada kejadian kerusakan. Jenis kegiatan dalam pekerjaan ini antara lain dapat berupa penambahan lapis permukaan, pemotongan rumput dan pembersihan drainase jalan dengan melibatkan peran serta masyarakat agar kondisi jalan terjaga secara kualitas maupu kemantapannya.

3. Rasio jembatan dalam kondisi baik

Panjang jembatan dalam kondisi baik di Kota Jambi = 646 m. Dan total panjang jembatan di Kota Jambi = 654 m. Persentase target panjang jembatan dalam kondisi baik ditentukan berdasarkan perbandingan Panjang jembatan dalam kondisi baik dan panjang seluruh jembatan, realisasi capaian kinerja persentase panjang jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 97.30 %, dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 97.30%, Pencapaian sebesar 100 %.

Secara keseluruhan pekerjaan jalan di Kota Jambi pada Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Uraian	Capaian
	Jalan Lingkungan (Km)	
1.	Kecamatan Jambi Selatan	13,493

2.	Kecamatan Jambi Timur	1,782
3.	Kecamatan Jelutung	4,667
4.	Kecamatan Kota Baru	29,307
5.	Kecamatan Pasar Jambi	0,679
6.	Kecamatan Telanaipura	4,713
7.	Kecamatan Danau Teluk	0,122
8.	Kecamatan Pelayangan	0,356
Total Jaling (Km)		**55,119**
	Jalan Status Kota (Km)	
1.	Kecamatan Jambi Selatan	3,199
2.	Kecamatan Jambi Timur	-
3.	Kecamatan Jelutung	0,326
4.	Kecamatan Kota Baru	5,457
5.	Kecamatan Pasar Jambi	0,554
6.	Kecamatan Telanaipura	4,280
7.	Kecamatan Danau Teluk	1,486
8.	Kecamatan Pelayangan	4,307
Total Status Kota (Km)		**19,608**
	Parit Jalan (Km)	
1.	Kecamatan Jambi Selatan	-
2.	Kecamatan Jambi Timur	-
3.	Kecamatan Jelutung	-
4.	Kecamatan Kota Baru	2,085
5.	Kecamatan Pasar Jambi	-
6.	Kecamatan Telanaipura	2,756
7.	Kecamatan Danau Teluk	-
8.	Kecamatan Pelayangan	-
Total Parit Jalan (Km)		**4,841**

4. Rasio cakupan pelayanan air minum

Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap masalah air minum Air minum layak menurut Definisi MDGs Nasional adalah rumah tangga yang menggunakan sumber utama air minum dari pipa atau leding (yang disalurkan ke rumah, halaman rumah, dari tetangga, maupun dari keran/hidran umum), dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dengan jarak minimal 10 meter atau lebih ke tempat pembuangan akhir tinja, serta penampungan air hujan. Persentase akses air bersih adalah perbandingan jumlah penduduk yang terlayani air bersih(jiwa) dengan total jumlah penduduk pada tahun yang sama.

Analisis Peningkatan Kinerja

Jumlah SR Air Minum yang terlayani tahun 2020 = 85.809 SR. Jumlah penduduk di Kota Jambi = 604.378 (Data dari BPS). 1 KK = 5 orang. Berdasarkan data diatas persentase akses air bersih pada tahun 2020 sebesar 70.99 % dari target 69.39 %. Walaupun akses air minum sudah meningkat, masih terdapat kesenjangan antar wilayah dan status sosial ekonomi. Secara kuantitas masih banyak rumah tangga yang belum mencapai akses minimal tetapi banyak pula rumah tangga yang menggunakan air secara berlebihan. Kualitas air minum masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Ada alasan rumah tangga memilih untuk tidak mengolah air minum dengan memilih sumber air yang dianggap aman seperti air minum kemasan dan isi ulang. Kecenderungan ini meningkat sejalan dengan tingginya status sosial ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam peningkatan cakupan sumber air minum yang improved terutama air PDAM.

Kecenderungan ini bisa berdampak negatif terhadap upaya peningkatan air minum perpipaan (PDAM). Padahal kualitas air minum kemasan dan

isi ulang juga masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Kualitas air minum masih belum memadai dan diperberat oleh tingginya sanitasi unimproved termasuk open defecation sebagai sumber pencemaran Masih tingginya proporsi sanitasi yang buruk menghambat peningkatan kualitas air minum sehingga penularan penyakit melalui air (diare) masih cukup tinggi. Rumah tangga yang menggunakan air minum unimproved cenderung menggunakan sarana sanitasi yang unimproved Pengawasan kualitas air minum yang telah berjalan belum sepenuhnya.

Solusi

Kendala dalam upaya pencapaian indikator kinerja dan Pemecahan masalahnya:

1. Peningkatan alokasi dana untuk penyediaan air bersih/minum setara dengan jumlah pertambahan penduduk yang belum terlayani sampai tahun 2020.
2. Besarnya pendanaan untuk pencapaian 100% pelayanan air bersih/minum mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan program dan anggaran untuk pembangunan layanan infrastruktur dasar tersebut.
3. Sulitnya pengolahan sumber air baku yang korosif membutuhkan teknologi yang dapat memisahkan logam tersebut dengan air.

Peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum dan sarana sanitasi dapat dilihat berikut.

No	Uraian	Capaian
1.	Pembangunan IPAL Komunal (SR)	50
	Pembangunan tangki septik komunal (SR)	-
	Pembangunan IPAL komunal kombinasi MCK (SR)	-
	Pembangunan tangki septik individual (SR)	1.120

	Pembangunan MCK++IPAL per unit	-
Jumlah Rumah Yang Bersanitasi (SR)		**1.170**
2.	**- Rasio Pelayanan Jaringan Air Minum Per Jumlah Rumah (%)**	
	Instalasi Produksi	
	a. Broni (Lt/Dtk)	2.500
	b. Benteng (Lt/Dtk)	80
	c. Aur Duri (Lt/Dtk)	160
	- **Pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah**	
	Penambahan jaringan (meter)	9.969
	Peremajaan jaringan (meter)	-
	Jumlah sambungan rumah (SR)	325

Kondisi layanan air bersih dan sanitasi tahun 2020

No	Uraian	Capaian
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air bersih (SR)	85.809
2.	Jumlah rumah yang bersanitasi (SR)	1.170

5. Rasio pelayanan air limbah

Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Jamban Sehat Permanen
2. Jamban Sehat Semi permanen
3. Sharing/Numpang
4. Masih Buang Air Besar Sembarangan

Analisis Kinerja

Jumlah SR Air Limbah yang terlayani tahun 2020 = 1.170 SR. Jumlah

KK yang terlayani = 583.487. Pada tahun 2020, target indikator Penduduk dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) sebesar 1.56%. Sedangkan realisasi indikator tersebut pada tahun 2020 sebesar 1.00%. Itu berarti realisasi indikator tersebut pada tahun 2020 belum mencapai target indikator perlu adanya kajian cepat agar dapat segera memetakan kondisi sanitasi (air limbah dan persampahan) di kabupaten/kota masing-masing untuk kemudian dapat menetapkan beberapa kebijakan yang sesuai untuk dapat memberi kemudahan bagi kabupaten/kota untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala lain yang dihadapi sampai saat ini dikarenakan recofusing/rasionalisasi pendanaan anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga target tahun 2020 pencapaiannya tidak tercapai 100 %.

Solusi

Kendala dalam upaya pencapaian indikator kinerja dan Pemecahan masalahnya Keberhasilan penanganan sanitasi adalah yang memenuhi kaidah teknis yang dipersyaratkan.

- Meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan pengelolaansampah dan air limbah yang layak dengan berbagai upaya memberi kemudahan bagi masyarakat.
- belum terintegrasinya perencanaan antar sektor seperti Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang sehingga memerlukan pelaksanaan perencanaan yang maksimal.
- keberjalanan fasilitas atau infrastruktur sanitasi dapat terjaga dengan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan,pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan.
- Pembiayaan untuk penyediaan fasilitas sanitasi layak perlu

ditingkatkan melalui evaluasi atas alokasi secara spesifik agar data lebih akurat.

- Selain pembangunan fisik, pemberian edukasi dan advokas (mengeluarkan kebijakan agar masyarakat mau melakukan kewajibanya untuk tidak mencemari lingkungan baik disektor air limbah maupun persampahan) kepada masyarakat akan pentingnya sanitasi baik pembangunan dan pemeliharaan.
- Dalam penanggulangan masalah persampahan upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui OPD terkait adalah membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah secara mandiri melalui Aksi bank sampah /TPS3R yang telah ada, diharapkan sampah yang masuk ke TPA merupakan residu yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

6. Rasio bangunan dalam kondisi baik

Jumlah gedung dalam kondisi baik pada tahun 2019 = 216 unit. Jumlah gedung yang dilaksanakan di tahun 2020 sebanyak 258 unit. Dan total jumlah gedung di Kota Jambi sebanyak 371 unit. Target jumlah gedung dalam kondisi baik di tahun 2020 61.46 % dan terealisasi 69.54 %. Artinya di tahun 2020 mengalami pencapaian yang sangat baik.

7. Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan

Target dokumen perencanaan yang diimplementasikan sebesar 84 %. Dapat direalisasikan pada tahun 2020 sebesar 63 %, terdapat penambahan dokumen perencanaan untuk tahun 2020 sebanyak 88 dokumen perencanaan. Jumlah dokumen perencanaan yang di implementasikan di tahun 2020 sebanyak 89 dokumen dari jumlah total dokumen perencanaan menjadi 141 dokumen dengan jumlah stok produk 52 dok di tahun 2020.

8. Rasio ketaatan RTRW

Sumber data awal dari Bappeda, dikarenakan Bidang Penataan Ruang DPUPR merupakan bidang baru di tahun 2019. Luas realisasi sempadan danau dan sungai = 576.22 HA. Luas Sempadan Sungai dan Danau dalam rencana RTRW Kota Jambi = 625 HA.

Kesesuaian Tata Ruang lebih menekankan kepada kawasan sempadan Danau dan Sungai, seberapa jauh pemerintah Kota Jambi mempertahankan fungsi sempadan danau dan sungai yang sesuai dengan luas di RTRW Kota Jambi 2013-2033 Dari hasil interpretasi Citra Worldview-4 tahun 2018, didapatkan data hitungan sebagai berikut : Luas bangunan yang berada di sempadan Sungai dan Danau adalah seluas = 48,78 Ha Luas sempadan Sungai dan Danau sesuai RTRW Kota Jambi adalah 625 Ha Persentase bangunan yang melanggar adalah sebesar = (48,78/625) x 100% = 7,80% Sehingga Luas Sempadan Sungai dan Danau yang masih sesuai dengan tata ruang adalah 92,2%.

Rekapitulasi inkonsistensi fungsi pemanfaatan ruang

Peruntukkan	Luas Peruntukkan (ha)	Inkonsistensi	
		Luas (ha)	%
Sempadan sungai	325	26,22	8,07
Sempadan danau	300	14,83	4,94
RTH Taman	875,9	42,153	4,81
RTH Hutan Kota	524	87,77	16,75
RTH Jalan	93	4,2	4,52
RTH Pemakaman	140	94	67,14
RTH Kawasan Perkantoran	27	3,973	14,71
Hutan kota, greenbelt, dan fungsi tertentu lainnya	1332,6	553	41,50
JUMLAH	**3617,5**	**826,146**	**162,45**

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan adminsitrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

1. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan

Belakang Komplek BPK – Paal Lima		
Dari Perumahan Torino – Kantor Lurah Kenali Asam Bawah – Batas Wilayah Kel. Kenali Asam Bawah		

Belakang SMA 1 – Rumah Dinas Walikota – Jl. Mpu Sendok – Jl. Mpu Gandring – Maulana Malik Ibrahim		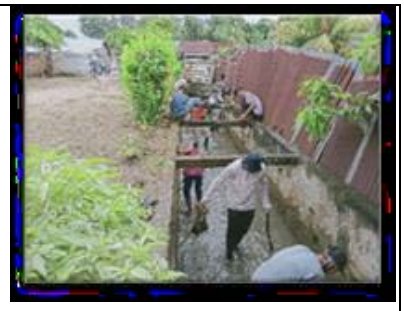
Lorong Telaga – Broni – Ampera – Sungai Pete (Flamboyan)		
Jl. Slamet Riyadi – Makam Rd. M. Taher		
Lorong Diamond – Lorong Cadas – Pintu Air Danau Sipin		

Lorong Paca Karya – Jl. Orang Kayo Pingai – Pasar Talang Banjar – Lorong Garuda 1- RT. 28 Talang Banjar		
Dari Jl. Kol. Pol. M. Taher – SMA 2 - Donorejo		
Dari Lorong Galaxy (Rumah Wakapolda)- Perum Parma – Jl. Abdul Rahman Saleh – Jl. Soekarno Hatta – Jl. RB. Siagian		
Jl. RB. Siagian – Jl. H. Kamil – Abdullah Khatab		

Lorong Nagoya dan Jl. Amangkurat		
RT. 25 Rajawali – Gang Riau – Lorong Hodayat – Jl. Dr. Setiabudi – Sungai Tembuku		
Jl. Kol.M. Taher – Belakang Transmart – Jl. Barau barau – Jl. Tengku Sulaiman – Jl. Tarmizi Kadir – Pertemuan Sungai Tembuku		
Komplek Setia Negara – Depan Tribun		

Belakang Hotel Matahari – Ke Karamunting – Jembatan Makalam		
Samping Tribun Jambi – Posbindu Lebak Bandung – Sungai Asam		
Sei. Kambang dari Jamtos – Rumah Makan Salero Baru		
(Dari Perum Lazio – Akper Telanai Bakti) – Danau Teluk Kenali		

RT. 60 Eka Jaya Perum Maulana – Saluran Irigasi Eka Jaya		
Dari Jl. Berbah Kel. Eka Jaya – Saluran Irigasi Tangkit		
RT. 05 Perum Vidia Indah I s/d Lrg. Pengadilan Jerambah Bolong		
Jalan Kolonel UD Sunaryo – Taman Rimba (Bakso Legowo) Komplek PU		

Belakang Kantor Lurah Mayng – Perum Pesona Jambi – Jalan Mutiara Hijau – Sei Kenali Besar		

Lebih lanjut komponen pendukung IKU ke sepuluh dari Dinas Perhubungan Kota Jambi adalah:

1. Cakupan layanan transportasi

   Dengan target 58,84 persen terealisasi sebesar 57,28 persen dengan capaian 97,34 persen. Capaian ini belum sesuai target dikarenakan pada tahun 2020 kondisi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap operasional angkutan umum yang biaya operasi kendaraan tidak tertutupi karena jumlah penumpang yang diangkut sangat minim dan adanya pembatasan mobilisasi orang untuk melakukan aktifitas pada jam-jam tertentu.

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan keselamatan perhubungan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	73,50%	84,84%
	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik		
Perencanaan dan peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan yang melaksanakan uji angkutan	26.780 Unit	24.293 Unit

	Tingkat ketersediaan pengembangan PKB berbasis teknologi	11 Unit	6 Unit
	Persentase layanan angkutan darat	1000 Unit	107 Unit
	Persentase sarana prasarana terminal layak fungsi	45%	35,29%

2. Persentase pengendalian lalu lintas

Dengan target sebesar 60 persen terealisasi 65,81 persen atau dengan capaian sebesar 109,68 persen.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Penyusunan perencanaan, norma, kebijakan dan standar perhubungan	Persentase jumlah ketersediaan dokumen perencanaan lalu lintas	5 Dokumen	2 Dokumen
2.	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas	Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas berkurang	36 Titik	23 Titik
		Jumlah pelaksanaan dan pengendalian operasional lalu lintas	132 Kali	79 Kali

3.	Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan dan angkutan jalan	Jumlah pelaksanaan penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang	50 Kali	26 Kali
4.	Sosialisasi dan bimbingan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah pelaksanaan bimbingan peraturan LLAJ	40 Kali	35 Kali

3. Cakupan pelayanan perparkiran

   Dengan target sebesar 80,74 persen terealisasi sebesar 98,23 persen atau dengan capaian 121, 76 persen.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Peningkatan efektifitas operasional pemungutan retribusi	Persentase peningkatan PAD parkir	92%	104,25%
2.	Perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana parkir	Jumlah ketersediaan Sarpras Parkir	11 unit	11 unit
3.	Penertiban dan penataan parkir	Jumlah titik parkir yang tertata	513 unit	464 unit

Selanjutnya komponen pendukung IKU kesepuluh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, sebagai berikut:

1. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani

   Kegiatan penyelenggaraan, peningkatan kualitas kawasan permukiman tahun 2020, antara lain:

   a. Perbaikan rumah tidak layak huni dana APBD sebanyak 38 unit
   b. Perbaikan rumah tidak layak huni dana APBN sebanyak 555 unit
   c. Perbaikan rumah tidak layak huni dana DAK sebanyak 138 unit
   d. Luas permukiman kumuh yang tertangani sebanyak 4,12 ha
   e. Pendataan permukiman pada kecamatan sebanyak 1 kecamatan

2. Persentase pemenuhan rumah bagi MBR

   Kegiatan penyelenggaraan, penyediaan dan penataan perumahan, antara lain:

   a. Dokumen perencanaan PSU sebanyak 1 dokumen
   b. Rumah bagi MBR sebanyak 2.000 unit
   c. Perumahan yang diserahkan ke Pemda sebanyak 15 lokasi
   d. Perumahan PSU yang tertangani sebanyak 1 lokasi
   e. Perumahan yang di bina dan diawasi sebanyak 50 lokasi

3. Persentase permukiman yang dilayani utilitas umum

   Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan penataan penerangan jalan umum, antara lain:

   a. Pengadaan lampu jalan sebanyak 1.200 titik
   b. Pemeliharaan lampu jalan sebanyak 13.500 titik
   c. Pembayaran rekening listrik PJU sebanyak 844 KWH

SASARAN 7
MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran ketujuh yang ditetapkan dalam mencapai Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur adalah meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.9.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 7 (Ketujuh) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
7.	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	11.	Indeks kualitas air	32,11	101,37%	38,30	39,60	103,40%	43,38
		12.	Indeks kualitas udara	80,68	95,21%	80,72	84,51	104,70%	91,45
		13.	Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	108,49%	41,70	44,82	107,48%	61,37
RATA-RATA % CAPAIAN					101,69%			105,19%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Dalam pelaksanaannya pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan menetapkan 3 (tiga) IKU yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan, yang mana cara pengukuran ketiga iku tersebut didasarkan pada Peraturan

Menteri LHK Nomor 78/MENLHK/Setjen/SET.19/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.

IKU indeks kualitas air dari target 38,30 terealisasi sebesar 39,60 sehingga tercapai sebesar 103,40% dengan kategori **SANGAT TINGGI**. capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan. Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dari pengujian kualitas air anak sungai di Kota Jambi dengan dilakukan beberapa tahap sebagai berikut :

Perhitungan indeks Pencemaran untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index–PI). Menurut definisinya Pij adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang

merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air I dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Formula penghitungan indeks pencemaran adalah:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Dimana :

Lij : Konsentrasi Baku peruntukkan air (j)

Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)

PIj : Pencemaran Bagi Peruntukkan (j) (Ci/Lij)M : Nilai Maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R : Nilai rata-rata dari Ci/Lij

Untuk menghitung indeks pencemaran air maka dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- Langkah 1 : Masing-masing titik pemantauan diasumsikan memiliki 1 (satu) data dan memiliki status mutu air.
- Langkah 2 : Kemudian konsentrasi parameter dibandingkan dengan baku mutu. Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij)baru yaitu dengan rumus sebagai berikut : (Ci/Lij) baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)
- Langkah 3 : Merangkum langkah No. 1dan No.2 kemudian membuat tabel indeks pencemaran air, masukkan data analisis uji laboratorium setiap sungai dalam rumus software Microsoft excel untuk mendapatkan nilai indeks kualitas air sungai.

Hasil analisi dan kualitas air sungai di kota Jambi disajikan pada tabel berikut:

Tabel

Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Jambi Metode IP

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Mutu Air	IKA
1.	Kenali besar (hulu)	4,8	Ringan	
2.	Kenali besar (hilir)	5,4	Sedang	
3.	Kenali kecil (hulu)	4,2	Ringan	
4.	Kenali kecil (hilir)	5,8	Sedang	
5.	Asam (hulu)	5,2	Sedang	
6.	Asam (hilir)	5,3	Sedang	
7.	Tambuku (hulu)	6,4	Sedang	
8.	Tambuku (hilir)	5,9	Sedang	
9.	Selincah (hulu)	4,3	Ringan	
10.	Selincah (hilir)	3,8	Ringan	39,60
11.	Kambang (hulu 1)	5,7	Sedang	
12.	Kambang (hulu 2)	5,3	Sedang	
13.	Kambang (hilir)	4,7	Ringan	
14.	Putri (hulu 1)	5,3	Sedang	
15.	Putri (hulu 2)	5,4	Sedang	
16.	Putri (hulu 3)	5,8	Sedang	
17.	Putri (hilir)	5,2	Sedang	
18.	Solok sipin (hulu)	3,5	Ringan	
19.	Solok sipin (hilir)	5,0	Sedang	

Sumber: data primer diolah, 2020

Grafik Status Mutu Kualitas Air Sungai di Kota Jambi

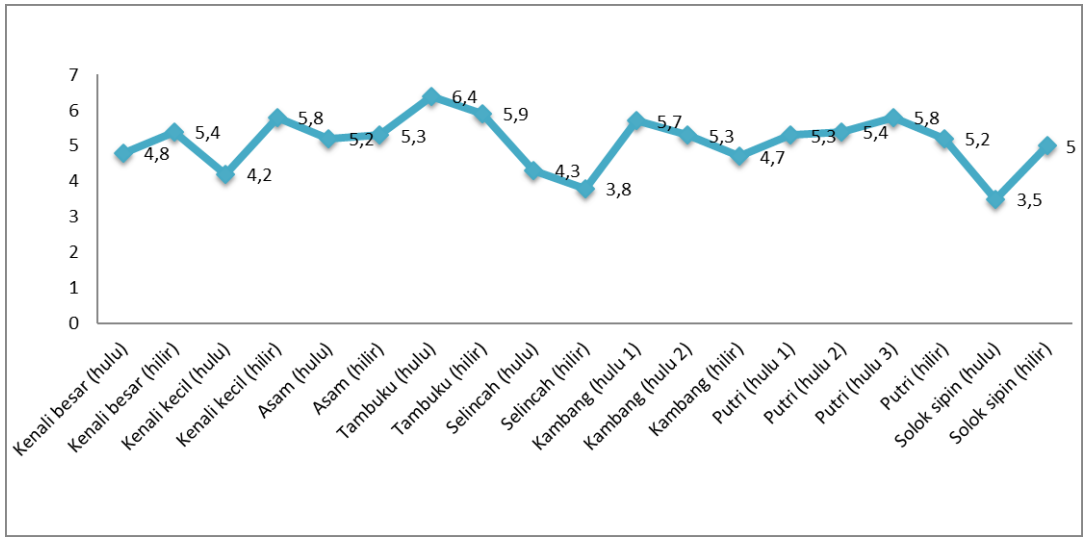

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan grafik dan tabel diatas terlihat bahwa nilai indeks pencemaran (IP) berkisar antara 3,5 – 6,4 nilai indeks pencemaran air (IP) terendah terdapat di lokasi sungai Solok Sipin pada bagian hulu yaitu dengan nilai sebesar 3,5 kategori tercemar ringan dan nilai terbesar indeks pencemaran air (IP) terdapat di sungai Tembuku bagian hulu yaitu sebesar 6,4 kategori tercemar sedang dan nilai indeks kualitas air 39,60.

Indeks Kualitas Air Kota Jambi Tahun 2020

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	2	3	4=(status/jml status)	5	6=(4x5)
1	Memenuhi	0	0,00	70	0,00
2	Ringan	36	0,48	50	24,00
3	Sedang	39	0,52	30	15,60
4	Berat	0	0,00	10	0,00
Jumlah		75			39,60

Pencemaran air sungai di Kota Jambi, didominasi oleh tingginya kadar BOD5, COD, DO, PO4. Cu, dan Zn. Kandungan Cu2+ dan Zn

merupakan logam berat yang biasanya terdapat di sedimen sungai, adanya kandungan Cu2+ dan Zn yang tinggi di badan air kemungkinan berasal dari aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang hulu dan hilir sungai. Salah satu contoh dari aktivitas masyarakat tersebut yaitu kegiatan penumpukkan barang bekas atau dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan robet (rombongan besi tua) dimana diantara barang-barang bekas tersebut terdapat limbah B3 seperti batu bateray dan besi, dimana kedua barang tersebut bersifat korosif. Barang-barang bekas tersebut diletakkan di tempata terbuka (tanpaatap/penutup) sehingga pada siang hari di cuaca panas suhu menjadi naik, Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Sedangkan pada saat cuaca hujan barang-barang bekas tersebut terkena air hujan dan menjadi basah, Dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, proses percepatan kororsif juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi.

Selain aktivitas masyarakat kegiatan usaha juga memilik peran dalam adanya kandungan Cu2+ dan Zn, kegiatan usaha yang dimaksud adalah cucian mobil, motor dan bengkel yang letaknya di sepanjang aliran sungai dari hulu sampai hilir. Ceceran oli, larutan oli pada air cucian mobil dan motorpada saat proses pencucian. Rata-rata usaha cuciam mobildan motor 80% tidakmemiliki IPAL air buangan sisa pencucian dialirkan langsung menuju drainase kota. Hal inilah menjadi salah satu penyebab tingginya kandungan Cu2+ dan Zn di delapan sungai Kota Jambi.

Sementara untuk tingginya kadar BOD5 dan COD jelas karena tingginya bahan organik yang masuk ke badan air, hal ini bisa disebabkan

oleh limbah cair domestik. Dengan demikian, selisih nilai antara COD dan BOD5 memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit terurai diperairan. Tingginya kadar BOD5 dan COD akan menurunkan tingkat DO, hal ini juga menjadi salah satu parameter yang hampir selalu diluar baku mutu. Kondisi ini menunjukan bahwa semua sungai yang melewati Kota Jambi sudah perlu untuk dikelola dengan baik sehingga kedepan kondisi seperti ini dapat diperbaiki kearah yang lebih baik.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga melakukan perhitungan Indeks Pencemaran Air Danau dengan hasil disajikan pada tabel berikut :

Indeks Kualitas Air Danau di Kota Jambi Metode IP

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Nutu Air	IKA
1.	Danau Sipin (komersil)	4,2	Ringan	43,89
2.	Danau Sipin (non komersil)	2,9	Ringan	
3.	Danau Sipin (muara)	5,1	Sedang	
4.	Danau Teluk (komersil)	3,2	Ringan	
5.	Danau Teluk (non komersil)	2,1	Ringan	
6.	Danau Teluk (muara)	4,6	Ringan	
7.	Danau Teluk Kenali (komersil)	3,5	Ringan	
8.	Danau Teluk Kenali (non komersil)	2,8	Ringan	
9.	Danau Teluk Kenali (muara)	4,3	Ringan	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Grafik Status Mutu Kualitas Air Danau di Kota Jambi Metode IP

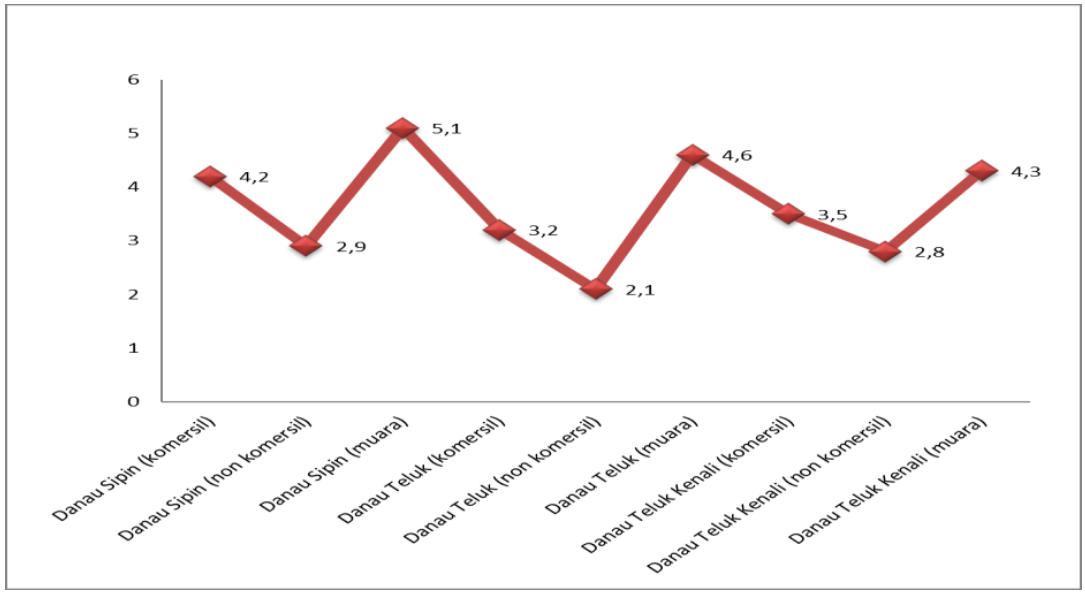

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel dan gambar diatas terlihat bahwa nilai indeks pencemaran (IP) berkisar 2,1 – 5,1 nilai indeks pencemaran air (IP) terendah terdapat dilokasi Danau Teluk (non komersil) yaitu sebesar 2,1 Katagori Tercemar Ringan dan nilai terbesar indeks pencemaran air (IP) terdapat di Danau Danau Sipin (Muara) sebesar 5,1 Katagori Tercemar Sedang dengan Nilai Indeks Kualitas Air 43,89.

Pencemaran air danau di kota Jambi lebih di dominasi tingginya kadar BOD5, COD, sebagian di beberapa titik pengambilan sampel terdapat parameter PO4, Nitrit, Cu, dan Zn. Faktor-faktor yang mempengaruhi BOD yaitu meningkatnya jumlah senyawa organik yang diuraikan, tersedianya mikroorganisme aerob, dan tersedianya jumlah oksigen yang dibutuhkan. Tingginya nilai BOD dapat disebabkan oleh tingginya kandungan bahan organik pada danau. Bahan organik dan logam berat yang masuk ke badan air, hal ini bisa disebabkan oleh limbah cair domestik dan aktivitas kegiatan masyarakat lainnya yang sebagian terbawa dari anak anak sungai yang

mengalir menuju danau disamping itu dimungkinkan berasal dari endapan pakan ikan maupun jasad biota yang telah mati.

Selain itu keterlibatan dan peran aktif dari berbagai *stakeholders* baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penurunan beban pencemar air sangat diperlukan, adapun yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pembuatan septic tank komunal

   Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septic tank komunal di perumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air.
2. Kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah ke sungai melalui iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik
3. Melarang pembuangan hasil kegiatan yang ada di Kota Jambi secara langsung ke sungai sebelum melalui proses pengolahan
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah, pada tahun 2019 telah dilakukan pembinaan sebanyak 40 dunia usaha dan penagwasan terhadap 100 perusahaan
5. Penegakan hukum Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan.

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan Kegiatan pemantauan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan, Kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair, Kegiatan pengkajian dampak lingkungan dan Kegiatan penegakan hukum lingkungan. Program ini telah menyerap biaya sebesar Rp. 1.968.215.500,-, dengan kegiatan :

- Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran di Kota Jambi

- Melakukan koordinasi pengendalian pencemaran
- Melakukan pengujian sampel sebanyak 300 sampel di 91 titik.
- Melakukan pembinaan 40 usaha dan pengawasan terhadap pelaku usaha sebanyak 100 pelaku usaha.

IKU kedua belas yaitu indeks kualitas udara dengan target 80,72 terealisasi pada angka 84,51 atau dengan capaian sebesar 104,70 persen dengan kategori **SANGAT TINGGI** dikarenakan pada tahun 2020 tidak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sehingga tidak terjadi dampak kabut asap di Kota Jambi yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.

Pemantauan kualitas udara berfungsi untuk memberikan informasi faktual tentang kondisi (status) kualitas udara saat ini, kecenderungan masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan masa depan. Informasi dasar yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, ijin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku mutu kualitas udara. Data hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, penyusunan kebijakan ataupun pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dalam peraturan perundangan lingkungan hidup didaerah. Polusi udara ditimbulkan dari berbagai faktor sebagai akibat terjadinya pencemaran udara seperti polusi kendaraan bermotor, pabrik, pembakaran hutan dan lahan.

Alat pemantauan kualitas udara otomatis atau yang disebut Air Quality Monitoring System (AQMS) dan alat Pasive Sampler yang digunakan oleh Pemerintah Kota Jambi untuk melakukan pemantauan kualitas udara Ambien yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Titik peruntukan pengambilan sampel kualitas udara otomatis atau yang disebut Air Quality Monitoring System (AQMS) stationnya yang berlokasi di lapangan depan kantor Walikota Jambi sementara untuk pasive sampler yang berlokasi di 4 (empat) titik sebagai peruntukan sumber pencemaran udara yaitu Peruntukan wilayah pemukiman, Perkantoran, Transportasi dan area Industri. Sebaran lokasi pengambilan sampel udara Ambien disajikan pada Tabel berikut.

Lokasi Titik Sampel Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi

No	Nama Peruntukkan	Alamat	Titik Koordinat
1.	Station AQMS	Lapangan Depan Kantor Walikota	X: -1.629584 Y: 103.607389
2.	Transportasi	Jl. D.I Panjaitan, Kel. Jelutung	X: -1.615830 Y: 103.616419
3.	Industri	Kawasan Industri crumb rubber Kel. Sijenjang	X: -1.574666 Y: 103.628226
4.	Pemukiman	Pemukiman (perum Villa Kenali, Kel. Mayang Mangurai)	X: -1.645444 Y: 103.585694
5.	Perkantoran	Komplek perkantoran Walikota Jambi	X: -1.629584 Y: 103.607389

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Data hasil pemantauan kualitas udara ambien yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Baku Mutu Udara Ambien yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kemudian data hasil pemantauan kualitas udara dianalisa menggunakan metode analisa perhitungan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Dalam peraturan tersebut terdapat penetapan parameter-parameter dasar untuk indeks standar pencemar udara (ISPU), yaitu NO2, SO2, Karbon Monoksida (CO), Ozon (O3), dan

PM10. Selanjutnya Kadar SO2 dan kadar NO2 sebagai indikator perhitungan nilai IKU tingkat Nasional.

Dari hasil pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Nopember Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel dan grafik dibawah ini :

Hasil Data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2020

No	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
1.	20	45	17	24	107	20	105	42	18	21	42	13
2.	17	48	28	40	62	31	44	48	30	21	39	22
3.	23	51	43	21	46	18	61	43	19	25	40	21
4.	31	51	52	28	20	20	80	18	17	47	15	33
5.	35	41	61	22	41	22	30	18	17	19	19	17
6.	34	40	40	20	21	24	59	20	18	68	39	16
7.	67	39	58	30	29	21	78	22	29	47	37	16
8.	106	23	91	53	59	19	23	19	32	52	38	15
9.	26	22	48	123	22	35	24	25	17	24	43	26
10.	35	19	44	82	46	53	25	21	19	23	44	16
11.	38	15	61	55	30	47	22	20	19	32	53	16
12.	38	10	43	21	38	51	25	26	17	21	34	16
13.	26	18	44	32	62	20	32	63	30	21	19	17
14.	30	16	45	73	20	28	23	50	18	40	22	0
15.	41	12	122	22	20	52	24	109	37	25	23	0
16.	42	26	40	22	22	44	24	23	16	18	23	0
17.	36	39	34	22	40	21	31	93	20	59	22	0
18.	45	21	52	48	20	22	33	39	43	52	25	0

19.	40	18	27	39	19	32	93	38	26	22	37	0
20.	41	18	45	62	20	55	44	67	25	40	42	0
21.	43	21	81	63	21	90	121	27	18	23	44	0
22.	40	47	108	62	38	21	123	22	20	33	47	0
23.	42	73	22	99	22	29	18	33	33	23	46	0
24.	36	16	24	19	76	23	18	47	30	35	50	0
25.	33	17	23	31	149	22	28	44	20	16	45	0
26.	31	19	123	-	85	58	38	51	22	26	14	0
27.	38	16	130	21	29	79	24	21	43	64	14	0
28.	34	12	172	26	29	60	47	34	19	63	15	0
29.	41	12	230	51	37	43	33	27	19	79	14	0
30.	49	0	87	121	23	69	55	26	19	38	14	0
31.	38	0	20	0	26	0	61	25	0	35	0	0
Rata2	41,24	28,75	67,17	45,93	41,26	37,63	46,65	37,45	23,67	35,87	31,97	18,77

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Kepmen LHK Nomor : P.14/MENLHK/7/2020

0 - 50 Baik

51 - 100 Sedang

101 - 199 Tidak Sehat

200 - 299 Sangat Tidak Sehat

300 - keatas Berbahaya

Grafik Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2020

Berdasarkan tabel dan gambar diatas Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2020 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berfluktuasi nilai tertinggi terjadi pada bulan Maret Tahun 2020 yaitu sebesar 67,17dengan kategori sedang selanjutnya di bulan April Tahun 2020 dan seterusnya cenderung menurun di bawah nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 50 dengan katagori Baik, Jika di rata-ratakan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2020 sebesar 38,03 hal ini menunjukkan kategori Baik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Presentasi Kategori Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukan bahwa presentasi Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2020 yang terbanyak adalah dengan Katagori Baik yaitu sebesar 80% sementara katagori sedang sebanyak 16% dan Tidak sehat hanya sebesar 4%.

Dari hasil uji laboratorium di 4 (empat) titik sebagai peruntukan sumber pencemaran udara yaitu Peruntukan untuk wilayah pemukiman, Perkantoran, Transportasi dan area Industri yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2020 yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Hasil Pemantauan Pasive Sampler

No	Peruntukkan	Kadar NO_2 (BM EU 40 µg/m³)	Kadar SO_2 (BM EU 20 µg/m³)	Kadar NO_2	Kadar SO_2
		µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3
1.	Transportasi	22,93	4,06	22,69	5,35
2.	Industri	11,53	9,47	12,27	8,60
3.	Pemukiman	15,44	3,45	14,14	2,47
4.	Perkantoran	14,17	6,33	13,55	7,23
5.	BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2.57

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Hasil Pemantauan kualitas udara dengan metode Pasive Sampler Kota Jambi Tahun 2020 tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk parameter NO2 maupun Parameter SO2 masih di bawah baku mutu jika di bandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.

Indikator perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) parameter yang di gunakan adalah Kadar SO2 dan kadar NO2 sebagai indikator perhitungan nilai IKU tingkat Nasional. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara dapat di lihat pada Tabel berikut ini:

Hasil Perhitungan Indeks Kualitias Udara Kota Jambi Tahun 2020

No	Peruntukkan	Kadar NO2	Kadar SO2	Kadar NO2	Kadar SO2	Kadar NO2	Kadar SO2	NO2 Ratarata Peruntukan	SO2 Ratarata Peruntukan	NO2 Ratarata Kab	SO2 Ratarata Kab	Indeks NO2	Indeks SO2	Ieu	IKU Kota Jambi
		µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3								
1.	Transportasi	22,93	4,06	22,69	5,35			22,81	4,71	17,25	6,53	0,43	0,33	0,38	84,51
2.	Industri	11,53	9,47	12,27	8,60			11,90	9,04						
3.	Pemukiman	15,44	3,45	14,14	2,47			14,79	2,96						
4.	Perkantoran	14,17	6,33	13,55	7,23	30,74	14,67	19,49	9,41						
5.	BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57										

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel diatas Hasil Perhitungan Indeks Kualitias Udara Kota Jambi Tahun 2020 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai IKU Kota jambi Tahun 2020 sebesar 84,51 dengan Kategori Baik dan hal ini menunjukan masih di atas target Nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 84,1.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator Indeks Kualitas Udara adalah :

- Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Air Quality Monitoring System (AQMS).

Kegiatan lain yang mendukung indikator ini yaitu :

- Kegiatan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor (spotcheck kendaraan bermotor)

  selama tiga hari berturut-turut pada ruas jalan yang berbeda dengan target total 1500 kendaraan.

Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor hari pertama dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 di Jalan Hos Cokroaminoto (Halaman Parkir Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi) pada pukul 08.00 s.d 15.00 WIB. Acara secara simbolik dibuka oleh Wakil Walikota Jambi dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian emisi kendaraan dinas Wakil Walikota dan staf ahli walikota Jambi, Kepala DLH Kota Jambi serta mobil dinas lainnya kemudian diteruskan pengujian kendaraan umum.

Pengujian emisi kendaraan yang dilakukan oleh Wakil Walikota Jambi

Pengujian emisi kendaraan bermotor hari kedua tanggal 16 September 2020 dilaksanakan di Jalan Sultan Taha (Depan WTC) dan pengujian uji emisi hari ketiga tanggal 17 September 2020 di Jalan H. Agus Salim (halaman parkir Gedung Senam Kotabaru).

Uji Emisi hari ke 2 di depan WTC Kota Jambi

Uji Emisi hari ke 3 di Parkiran Gedung Senam Kota Jambi

Ambang batas yang digunakan untuk menentukan lulus atau tidak lulus uji emisi adalah berdasarkan Kepmen LH Nomor 05 Tahun 2006. Adapun hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor selama tiga hari pelaksanaan adalah sbb:

Data Hasil Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tahun 2020

No	Jenis Kendaraan	Lulus Uji		Tidak Lulus		Jumlah Unit
		Unit	%	Unit	%	
1.	Premium	1.187	95	58	5	1.245
2.	Solar	317	57	236	43	553
Jumlah						1.798

Dari 1798 kendaraan yang tercatat telah di uji sejumlah 1245 unit adalah mobil berbahan bakar Premium dan 553 unit adalah mobil berbahan bakar solar. Untuk mobil berbahan bakar bensin 95% lulus uji dan 5% tidak lulus uji, sedangkan untuk mobil berbahan bakar solar 57% lulus uji dan 43% tidak lulus uji. Hal ini menunjukkan bahwa hampir rata-rata kendaraan

berbahan bakar bensin telah melakukan perawatan atau dalam kondisi baik. Sementara untuk bahan bakar solar, jika dilihat dari uji opasitasnya rata-rata 54,24% maka kendaraan tersebut kurang dilakukan service secara berkala.

- Pemantauan kualitas udara jalan raya (road side monitoring) Pemantauan kualitas udara jalan raya dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai dengan 05.30 hari berikutnya. Hari pertama dilaksanakan di jalan H. Agus Salim, hari kedua di Jalan Slamet Riyadi, dan Hari ketiga di Jalan HOS Cokroaminoto. Pemantauan dilakukan oleh PT. NUSA LABORATORIUM INDONESIA sebagai laboratorium rekanan yang ditunjuk.

Alat Pemantauan Kualitas Udara jalan Raya

- Pemantauan kinerja lalulintas (traffic counting) Pemantauan kinerja lalulintas (traffic counting) hari pertama dilakukan di Jl. H. Agus Salim (Depan Kantor DLH Provinsi Jambi), hari kedua di Jalan Slamet Riyadi (depan kantor BPJS/Jamsostek) dan hari ketiga di jalan Jl.HOS

Cokroaminoto. Camcorder untuk pemantauan ditempatkan di titik lokasi yang sama dengan penempatan alat pemantau kualitas udara jalan raya.

VCR adalah perbandingan antara jumlah kendaraan yang melintas dengan kapasitas maksimum yang dapat ditampung ruas jalan tersebut, dan merupakan gambaran dari tingkat pelayanan ruas jalan. Standar nilai VCR yang ditetapkan berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia (NKJI,1997). Dengan diketahuinya nilai ratarata kecepatan lalulintas (SMS) dan nilai VCR atau DS per jalan dari semua jalan yang dipantau maka dapat diketahui dengan mudah level atau tingkat pelayanan (LoS) dari masing-masing jalan. Berdasarkan grafik dibawah inilah kita bisa tentukan nilai LoS dengan cara menyilangkan niai VCR atau DS dengan nilai SMS ke dalam grafik maka akan diperoleh nilai LoS untuk setiap jalan maupun nilai LoS Kota.

Level Of Service (LOS)

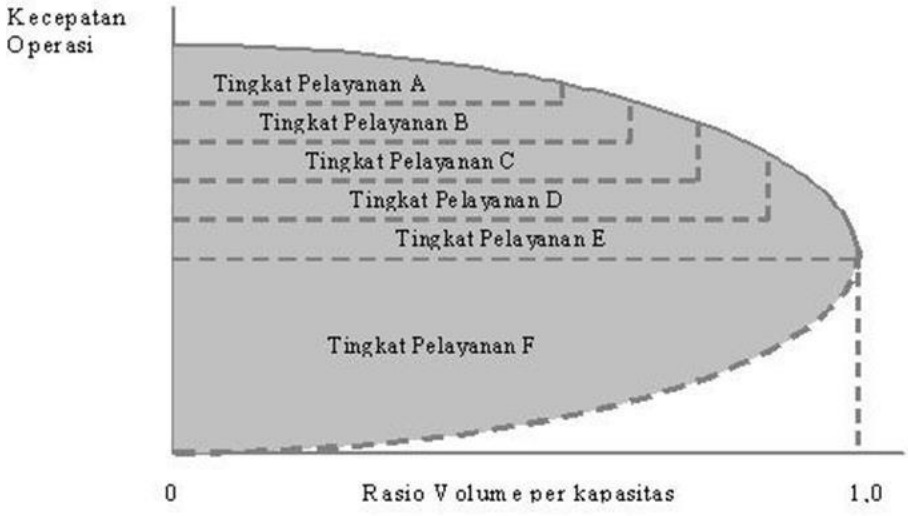

Sumber : Morlok. 1991

Untuk pemantau kinerja lalulintas, berdasarkan perhitungan menggunakan Software data base Langit Biru menunjukan Nilai VCR (Volume Capacity Ratio) sebagai berikut:

VCR Pada Ketiga Ruas Jalan yang Dipantau

No	Jalan	VCR Maksimum
1.	H. Agus Salim	0,62
2.	Slamet Riyadi	0,38
3.	HOS Cokroaminoto	0,50

Selanjutnya nilai LoS yang diperoleh tersebut maka situasi lalu lintas dan pelayanan jalan dapat digambarkan secara teknis seperti dalam Tabel diatas Kriteria tingkat pelayanan (TP) jalan dibawah ini sebagaimana yang tercantum dalam MKJI.

Dengan diketahuinya nilai (LoS) dari masing-masing jalan dan kota maka keterangan karakter lalulintas yang tergambar menunjukkan kondisi riil lalu lintas.

Kriteria Tingkat Pelayanan (TP) Jalan

No	Tingkat Pelayanan	Kriteria	Nilai	Keterangan
1.	A	TP Sangat Tinggi	0,00-0,20	Kondisi arus bebas kecepatan tinggi volume lalu lintas rendah
2.	B	TP Tinggi	0,21-0,44	Arus stabil kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas
3.	C	TP Sedang	0,45-0,74	Arus stabil kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan
4.	D	TP Rendah	0,75-0,84	Arus mendekati tidak stabil kecepatan masih dapat dikendalikan V/C masih dapat ditolerir
5.	E	TP Sangat Rendah	0,85-1,00	Arus tidak stabil kecepatan kadang terhenti permintaan mendekati kapasitas
6.	F	TP Sangat-sangat Rendah	>1.00	Arus dipaksakan kecepatan rendah volume dibawah kapasitas antrian panjang

Berdasarkan dari tabel kriteria diatas, tingkat pelayanan pada jalan H. Agus Salim berada pada peringkat C yang berarti bahwa kemampuan

ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kriteria rendah sampai dengan sedang. Tingkat pelayanan pada jalan Slamet Riyadi berada pada tingkat B berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kreteria tinggi sampai sangat tinggi. Sedangkan tingkat pelayanan pada jalan HOS Cokroaminoto berada pada tingkat C yang berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kriteria rendah sampai dengan sedang.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) pada tahun 2020 telah memperhatikan beberapa hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan tahun 2019 yang lalu yaitu publikasi ke masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan, ketersediaan Alat Uji Emisi, serta pemenuhan alat yang memenuhi standar dan terkalibrasi baik. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan EKUP tahun 2020 masih perlu memperhatikan beberapa hal untuk perbaikan penyelenggaran kegiatan
diwaktu mendatang sebagai berikut :

- Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- Dalam uji emisi kendaraan yang berbahan bakar solar, teknik samplingnya perlu penyempurnaan dan disesuaikan dengan SNI.
- Laboratorium yang bekerjasama hendaknya laboratorium yang memiliki 6 jenis parameter dapat di uji lengkap dan terakreditasi.
- Lebih meningkatkan partisipasi Dealer Kendaraan dalam ketersediaan Alat Uji Emisi serta Pemeliharaan Alat/Kalibrasi.

Secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencemaran udara dari sumber bergerak di Kota Jambi belum menujukkan situasi yang memerlukan perhatian serius. Namun demikian sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota, hal ini perlu tetap

diperhatikan.

IKU ketiga belas mengenai indeks kualitas tutupan lahan dengan target 41,70 terealisasi dengan angka 44,82 atau tercapai sebesar 107,48 persen masuk kategori **SANGAT TINGGI**. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan nilai indeks kualitas tutupan lahan sebesar 0,01 dimana terdapat penambahan lahan untuk RTH sebesar 5,38 ha, yang terdiri dari RTH Taman Kota sebesar 0,01 ha dan RTH perumahan yang telah diserahkan kepada pihak Pemerintah Kota Jambi sebesar 5,37 ha.

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

IKTL = 0,252 x ITH + 0,281 x IPH + 0,087 x IKH + 0,163 x IKBA + 0,217 x IKT

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No.	Uraian	Nilai Indeks	Perkalian	Jumlah Indeks
1	2	3	4	5= (3 x 4)
	ITH	45,38	0,252	11,44
	IPH	50,00	0,281	14,05
	IKH	3,18	0,087	0,28
	IKBA	17,61	0,163	2,87
	IKT	74,58	0,217	16,18
	IKTL			**44,82**

Keterangan :

ITH = Indeks Tutupan Hutan/Lahan

IPH = Indeks Performance Hutan

IKH = Indeks Kondisi Habitat

IKBA = Indeks Konservasi Badan Air

IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah

Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi :

a. Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari taman hutan, RTH taman kota, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau, RTH pemakaman, perumahan, lahan pertanian, belukar rawa, perkebunan, jalur hijau jalan dan pedestrian, RTH kawasan perkantoran pemerintah dan RTH fungsi tertentu (sabuk hijau).
b. Indeks Performance Hutan, nilai indeks pada areal yang tidak mengalami perubahan pada periode tertentu diberi nilai 50.
c. Indeks Kondisi Habitat terdiri dari indeks stadia tiang dan indeks stadia pohon.
d. Indeks Konservasi Badan Air terdiri dari tutupan hutan buffer dan indeks konservasi badan air.
e. Indeks Kondisi Tutupan Tanah

Adapun program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan diantaranya adalah :

a. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam
   1) Kegiatan Pengendalian dampak perubahan iklim

      Melakukan penyuluhan dan pembinaan kampung iklim di 4 lokasi kampung iklim, penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Kota Jambi
   2) Kegiatan peningkatan kinerja pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau

      Melakukan kegiatan penataan taman yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 11 taman dan pembangunan taman baru sebanyak 2 unit taman, 1 unit taman *vertical garden* dan 1 unit taman *wetland* Danau Sipin
   3) Kegiatan pengelolaan hutan kota di 3 lokasi hutan kota

SASARAN 8
MENINGKATNYA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAYANAN PERDAGANGAN

Sasaran yang kedelapan yaitu meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan.

Tabel 3.10.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 8 (Kedelapan) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
8.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00%	175,94	52,00%	116,23%	223,52%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					175,94			223,52%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Sasaran ke delapan dengan 1 (satu) buah IKU ini dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, yaitu persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan dengan target 52,00 persen terealisasi sebesar 116,23 persen atau dengan capaian 223,52 persen dengan kategori **SANGAT TINGGI**, dengan cara pengukuran menjumlahkan seluruh realisasi indikator sasaran strategis tahun pelaksanaan (tahun n) yaitu 100% + 105% + 72% + 254% +81% + 100% dibagi dengan jumlah sasaran strategis yang mendukung urusan perdagangan tahun pelaksanaan (tahun n) yaitu 6 sasaran strategis dikali 100 persen dengan realisasi sebesar 119%, dengan analisa sebagai berikut:

1. Persentase realisasi retribusi

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 100 persen dan realisasinya sebesar 101 persen dengan capaian sebesar 101 persen. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditaregtkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja SANGAT TINGGI (interval penilaian 91<).

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar

Dengan indikator realisasi penerimaan retribusi pasar dan target sebesar 3,599 M, dimana bentuk aksi yang dilakukan pada kegiatan ini pada tahun 2020 adalah (1) Pencetakan karcis retribusi pelataran yang digunakan sebagai bukti pembayaran retribusi dan PKL, (2) Pencetakan blanko setoran retribusi perpasaran, digunakan sebagai bukti pembayaran retribusi (3) Pencetakan kartu control pedagang, digunakan sebagai sarana pengawasan pembayaran retribusi. Yang menjadi fokus kegiatan ini adalah memperoleh PAD dari sektor retribusi pasar dengan formulasi pengukuran realisasi penerimaan retribusi pasar (tahun n) sebesar 4,259 M dibandingkan dengan target penerimaan retribusi pasar (tahun n) sebesar 3.599 M dengan capaian 118.32%

b. Kegiatan Penyelenggaraan pendataan objek retribusi pasar

Dengan indikator jumlah izin perpasaran yang diterbitkan, Bentuk aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pendataan dan penetapan terhadap pelaku usaha yang menggunakan aset pemerintah sehingga ada legalitas pemakaian dan pengefektifan penarikan retribusi dan target sebesar 750 izin. Dengan formulasi

realisasi izin yang diterbitkan (tahun n) sebanyak 616 izin dibandingkan target izin yang diterbitkan (tahun n) sebanyak 750 izin dikali 100 persen dengan capaian 82,13 persen.

2. Persentase pasar yang bersih dan tertib

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 55 persen dan realisasinya sebesar 105 persen dengan capaian kinerja sebesar 191 persen. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditaregtkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja SANGAT TINGGI (interval penilaian 91<). Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan pasar

Adapun indikatornya adalah jumlah pasar milik pemerintah yang bersih dengan target sebanyak 11 (sebelas) unit pasar. Bentuk aksi yang dilakukan yaitu melaksanakan himbauan melalui spanduk sebanyak 9 (sembilan) pasar, yaitu pasar induk talang gulo, pasar talang banjar, pasar aur duri, pasar olak kemang, pasar TAC, pasar kebun handil dan pasar buah dan melaksanakan gotong royong kebersihan pasar dengan 6 (enam) lokasi sebanyak 9 (sembilan) kali jadwal kebersihan yaitu pasar talang banjar, pasar TAC, pasar kebun handil, pasar kasang, pasar aur duri dan pasar olak kemang. Dengan formulasi pengukuran realisasi pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n) sebanyak 11 (sebelas) unit pasar dibandingkan dengan target pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n) sebanyak 11 (sebelas) unit pasar dikali 100 persen dengan capaian 100 persen.

b. Kegiatan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah

Indikatornya jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan

penertiban dengan target sebanyak 11 (sebelas) unit pasar. Bentuk aksi yang dilakukan yaitu melaksanakan pengawasan dan penertiban pasar dengan target 11 (sebelas) titik lokasi PKL, yaitu:

1) PKL Pasar rakyat Talang Banjar
2) PKL Shelter Jl. WR. Supratman
3) PKL Jl. Ir. Sutami dan PKL Jl. Wahid Hasyim
4) PKL Pasar Induk Talang Gulo
5) PKL Pasar Aur Duri
6) PKL Jl. Sultan Thaha
7) PKL Pasar Kasang
8) PKL Pasar TAC
9) PKL Pasar Olak Kemang
10) PKL Pasar Kebun Handil
11) PKL Pasar Buah

Adapun formula penghitungannya realisasi pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n) sebanyak 12 (dua belas) unit pasar dengan penambahan PKL Taman Jomblo dibandingkan dengan target pasar milik pemerintah dalam penagwasan dan penertiban (tahun n) sebanyak 11 (sebelas) unit pasar dikali 100 persen dengan capaian 109,09 persen.

3. Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 55 persen dan realisasinya sebesar 72 persen dengan capaian kinerja sebesar 131 persen. Suatu prestasi kerja yang kurang baik dengan realisasi kinerja tidak melampaui yang ditargetkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja SANGAT TINGGI (interval penilaian 91≤). Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 di dukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan pemantauan distribusi barang

Dengan indikator jumlah pelaku usaha formal distribusi barang dan target sebanyak 50 pelaku usaha. Adapun bentuk aksi yang dilakukan, yaitu:

1) Melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Talang Banjar setiap hari
2) Melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Aur Duri sebagai pembanding harga sembako setiap minggu
3) Melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Handil setiap minggu
4) Melaksanakan pasar murah dan bazar di bulan Ramadhan
5) Melakukan pemantauan harga barang penting setiap bulan
6) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait perihal kelangkaan ketersediaan kebutuhan pokok
7) Melakukan pemantauan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar rakyat menyambut perayaan hari-hari tertentu

Adapun formulasi penghitungannya realisasi pelaku usaha formal distribusi barang dalam pemantauan dan pengawasan (tahun n) sebanyak 40 pelaku usaha dibandingkan dengan target pelaku usaha formal distribusi barang dalam pemantauan dan pengawasan (tahun n) sebanyak 50 pelaku usaha dikali 100 persen dengan capaian 80 persen.

b. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal

Indikatornya jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan dengan target sebanyak 200 pelaku usaha. Pada kegiatan ini bentuk aksi yang dilakukan pada tahun 2020 berupa melakukan pengadaan alat-alat laboratory grader sebanyak 1 unit.

Formulasi penghitungan realisasi jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) sebanyak 150 pelaku usaha dibandingkan target pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) sebanyak 200 pelaku usaha dikali 100 persen dengan capaian 75 persen.

c. Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen

Indikatornya adalah jumlah pelaku usaha formal yang diberdayakan dengan target sebanyak 125 pelaku usaha. Pada kegiatan ini bentuk aksi yang dilaksanakan berupa melaksanakan uji laboratorium barang hasil razia dan melakukan pengawasan barang dan gas LPG 3 kg. Adapun formulasi penghitungan dimana realisasi jumlah pelaku usaha formal yang diberdayakan (tahun n) sebanyak 75 pelaku usaha formal dibandingkan target jumlah pelaku usaha formal yang diberdayakan (tahun n) di kali 100 persen dengan capaian 60 persen.

4. Persentase UTTP yang ditera tera ulang

Adapun capaian kinerja pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 54 persen dan realisasinya sebesar 254 persen dengan capaian kinerja sebesar 471 persen. Suatu prestasi yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja SANGAT TINGGI (interval penilaian 91 $\leq$). Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja pencapaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian

Indikatornya adalah jumlah UTTP yang ditera tera ulang dengan target sebesar 1.620 unit UTTP. Pada kegiatan ini dibentuk aksi yang dilaksanakan berupa:

- Melaksanakan sosialisasi tertib ukur selama 2 (dua) hari dibagi dalam 2 (dua) sesi yaitu pada tanggal 30 Juli 2020 untuk 40 (empat puluh) orang pedagang Pasar Aur Duri dan pada tanggal 31 Juli 2020 bagi pedagang Pasar TAC dan Pasar Kebun Handil.
- Melaksanakan sidang ditera tera ulang selama 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal 6 Agustus 2020 s/d 5 September 2020 bertempat di pasar-pasar rakyat antara lain pasar angso duo, pasar talang banjar, pasar kasang, pasar kebun handil, pasar TAC, pasar hongkong, pasar keluarga, pasar mama, pasar induk talang gulo, pasar pelayangan, pasar olak kemang, pasar villa kenali, pasar aur duri dan pasar dalam kota.

Formulasi penghitungan realisasi jumlah UTTP yang tera tera ulang (tahun n) sebanyak 4.104 UTTP dibagi target UTTP yang tera tera ulang (tahun n) sebanyak 1.620 UTTP dikali 100 persen dengan capaian 254 persen.

5. Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina

Adapun capaian kinerja pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 57 persen dan realisasinya sebesar 81 persen dengan capaian kinerja sebesar 143 persen. Suatu prestasi yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja SANGAT TINGGI (interval penilaian 91 $\leq$). Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Indikatornya jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan perdagangan dengan target sebanyak 130 pelaku usaha. Pada kegiatan ini bentuk aksi yang dilaksanakan berupa:

1) Pelaksanaan sosialisasi bina usaha perdagangan dimana peserta direncanakan berjumlah 120 orang yang dari pelaku usaha. Pelaksanaan selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 November 2020 bertempat di Aula Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Maksud dan tujuan memberikan pemahaman dalam penataan persaingan antara pedagang, menjalin kemitraan antara pelaku usaha dengan IKM, dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
2) Pelaksanaan temu usaha dagang kemitraan dimasa diikuti 30 pelaku usaha selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 November 2020 bertempat di Aula Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
3) Pelaksanaan penyuluhan perdagangan dimana diikuti 30 (tiga puluh) pelaku usaha selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Aula Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Adapun formula penghitungan realisasi pelaku usaha yang menikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n) sebanyak 60 pelaku usaha dibandingkan target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n) sebanyak 130 pelaku usaha dikali 100 persen dengan capaian 45 persen

b. Kegiatan peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Indikatornya adalah jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan akses pasar denga target sebanyak 26 pelaku usaha. Pada kegiatan ini bentuk aksi yang dilaksanakan berupa piblikasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri/100% cinta produk Jambi melalui

media elektronik dan cetak leaflet sebanyak 200 lembar dan cover baleho pemasaran produk dalam negeri di 5 (lima) titik dalam Kota Jambi. Formulasi penghitungan realisasi jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan akses pasar (tahun n) sebanyak 30 pelaku usaha dibandingkan target pelaku usaha formal yang mendapatkan akses pasar (tahun n) sebanyak 26 pelaku usaha dikali 100 persen dengan capaian 116 persen.

6. Persentase sarana dan prasarana perdagangan

Adapun capaian kinerja pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 52 persen dan realisasinya sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 193 persen. Suatu prestasi yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja SANGAT TINGGI (interval penilaian 91 $\leq$). Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan

Indikatornya adalah persentase sarana dan prasarana perdagangan dengan target sebesar 100 persen. Pada kegiatan ini bentuk aksi yang dilaksanakan berupa:

- Pemeliharaan gedung berupa perbaikan sarana perdagangan
- Pembangunan kios, kantor pengelola dan rehab WC pasar aur duri
- Pembangunan septic tank pasar talang banjar
- Pembangunan pintu pagar pasar olak kemang
- Pembuatan parit saluran air pasar onderdil kebun handil

Formulasi penghitungan realisasi sarana dan prasaranan perdagangan (tahun n) sebesar 100 persen dibagi target sarana dan prasarana perdagangan (tahun n) sebesar 100 persen dikali 100 persen dengan capaian 100 persen.

SASARAN 9
MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

Sasaran kesembilan adalah meningkatnya ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya Prioritas pembangunan yang kelima adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Tabel 3.11.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 9 (Kesembilan) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	15.	Skor pola pangan harapan	87,90%	100,12%	91,00%	91,50%	100,55%	92,50%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,12%			100,55%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan menetapkan 1 (satu) IKU yaitu skor pola pangan harapan dengan target 91,00 persen terealisasi sebesar 91,50 persen dengan capaian 100,55 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dimana semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat di suatu wilayah semakin baik, dan kebutuhan pangan terpenuhi sesuai kebutuhan tubuh untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Perhitungan hasil tersebut di atas, dilakukan dengan menggunakan metode survey terhadap Pola Konsumsi Pangan rumah tangga penduduk Kota Jambi. Data primer yang diperoleh dilakukan analisa, sehingga diperoleh angka PPH sebesar 91,5 dengan skor masing-masing jenis kelompok pangan berbeda. Untuk jenis kelompok pangan sayur dan buah-

buahan, Kacang-kacangan, Buah/Biji berminyak dan Umbi-umbian masih harus ditingkatkan konsumsinya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berikut.

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE dan Skor Maks	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Padi-padian	1141.3	51.9	53.1	0.5	26.0	26.5	25.0	1.5	25.0
2	Umbian-umbian	97.6	4.4	4.5	0.5	2.2	2.3	2.5	-0.2	2.3
3	Pangan Hewani	300.5	13.7	14.0	2.0	27.3	28.0	24.0	4.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	218.9	10.0	10.2	0.5	5.0	5.1	5.0	0.1	5.0
5	Buah/Biji berminyak	27.9	1.3	1.3	0.5	0.6	0.6	1.0	-0.4	0.6
6	Kacang-kacangan	73.2	3.3	3.4	2.0	6.7	6.8	10.0	-3.2	6.8
7	Gula	107.3	4.9	5.0	0.5	2.4	2.5	2.5	0.0	2.5
8	Sayur dan Buah	108.7	4.9	5.1	5.0	24.7	25.3	30.0	-4.7	25.3
9	Lain-lain	122.6	5.6	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	2198.0	100.0	102.2	11.5	95	97.1	100.0		91.5

Sumber: data primer diolah, 2020

Keterangan

*) Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2150.0 Kkal/Kap/Hari

Faktor-faktor pendukung capaian indikator sasaran yaitu peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di targetkan pada tahun 2020 sebesar 2.989 gr/kap/hari untuk energi dan 79 gr/kap/hari untuk ketersediaan protein perkapita; pada akhir tahun 2020 diperoleh capaian atau terealisasi ketersediaan energi sebesar 3.012 gr/kap/hr dengan standar nasional 2400 gr/kap/hari. Hal ini berarti bahwa standar pemenuhan PPH ketersediaan untuk Kota Jambi sudah terpenuhi. Tetapi apabila dilihat dari kelompok pangan, maka ada 3 (tiga) jenis kelompok

pangan yang belum tersedia sesuai standar nasional, yaitu kelompok umbian-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah. Angka ketersediaan pangan untuk Kota Jambi tahun 2020 sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut:

Perhitungan Pola Pangan harapan tingkat Ketersediaan

No	Kelompok Bahan Pangan	Standar Nas.	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor rill	Skor PPH	Skor Maks	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Padi-padian	1200	1.477	61.5	0.5	30.77	25.00	25.0	
2	Umbi-umbian	144	106	4.4	0.5	2.21	2.21	2.5	
3	Pangan Hewani	288	311	13.0	2.0	25.91	24.00	24.0	
4	Minyak dan Lemak	240	782	32.6	0.5	16.30	5.00	5.0	
5	Buah/biji berminyak	72	-	-	0.5	-	-	1.0	
6	Kacang-kacangan	120	107	4.5	2.0	8.95	8.95	10.0	
7	Gula	120	134	5.6	0.5	2.78	2.50	2.5	
8	Sayuran dan buah	144	95	3.9	5.0	19.70	19.70	30.0	
9	Lain-lain	72	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	400	3012	125.5		106.62	87.36	100.0	

Sumber: data primer diolah, 2020

Sedangkan capaian PPH ketersediaan dari protein perkapita terealisasi senilai 99,14 gram/kapita/hari dari target 79 gram/kapita/ hari. Dibandingkan dengan standar nasional berada pada angka 63 gram/kapita/hari, berarti PPH ketersediaan dari protein untuk Kota Jambi sangat baik. PPH ketersediaan energi, protein dan lemak sebagaimana di dalam tabel berikut:

Perkembangan ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Perkapita per Hari

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Ha)	Protein (Gram/Hari)	Lemak (Gram/Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi-padian	1.477	36.18	6.57
2	Makanan Berpati	84	0.40	0.24
3	Gula	134	0.68	2.26
4	Buah biji berminyak	100	10.48	4.39
5	Buah-buahan	60	0.78	0.75
6	Sayur-sayuran	65	2.83	0.48
7	Daging	82	11.80	3.55
8	Telur	72	5.59	5.18
9	Susu	0	0.00	0.00
10	Ikan	157	30.39	2.77
11	Minyak dan Lemak	782	0.01	40.92

Sumber: data primer diolah, 2020

Selanjutnya capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dibagi menjadi 3 (tiga) urusan yaitu:

1. Urusan pangan

   Capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pangan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

   a. Peningkatan pola konsumsi pangan B2SA masyarakat, yang ditunjukkan oleh peningkatan Angka Kecukupan Energi (AKE)

sebesar 0,46 % dari tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu dari angka 2.188 menjadi 2198 kkal/kap/hari dengan perhitungan :

$$\% \text{ AKE} = \frac{(2.198-2.188)}{2.198} \times 100\ \% = 0{,}46\ \%$$

dan persentase peningkatan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 0,78 % dari tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu dari angka 64,3 menjadi 64,8 gr/kap/hari dengan perhitungan :

$$\% \text{ Peningkatan konsumsi protein} = \frac{(64{,}8-64{,}3)}{64{,}8} \times 100\ \% = 0{,}78\ \%$$

Rincian peningkatan Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Peningkatan Angka Kecukupan Energi

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			
		Kalori	Kalori	%	% AKE*)
		2019	2020		
1.	Padi-padian	1130.7	1138.4	51.8	**52.9**
2.	Umbi-umbian	105.8	98.4	4.5	**4.6**
3.	Pangan Hewani	284.4	301.7	13.7	**14.0**
4.	Minyak dan Lemak	222.4	219.2	10.0	**10.2**
5.	Buah/Biji Berminyak	29.8	28.4	1.3	**1.3**
6.	Kacang-kacangan	71.0	73.6	3.3	**3.4**
7.	Gula	112.5	107.9	4.9	**5.0**
8.	Sayur dan Buah	105.0	108.2	4.9	**5.0**
9.	Lain-lain	126.3	122.3	5.6	**5.7**
	Total	**2188.0**	**2198.0**	**100.0**	**102.2**

Sumber: data primer diolah, 2020

Peningkatan Angka Kecukupan Protein Tahun 2020

No	Karakteristik Agroekologi	Konsumsi Protein (Gr/Kap/Hari)	Konsumsi Protein (Gr/Kap/Hari)	Kecukupan Protein (Gr/Kap/Hari)	Tingkat Konsumsi Protein (% AKP)
		2019	2020		
1	Wilayah Pertanian	63.6	65.2	57.0	114.4
2	Wilayah Perdagangan	59.9	64.3	57.0	112.8
3	Wilayah Lainnya	69.8	66.0	57.0	115.9
Total		**64.3**	**64.8**	**57.0**	**113.6**

b. Terlaksananya Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan pengolahan pangan lokal di 11 kecamatan;

c. Terlaksananya pengambilan sampel cabe giling merah keriting dari lima pelaku usaha di Pasar Angso Dua dan Talang Banjar yang terindikasi bahan kimia berahaa benzoat, ponceau 4R (zat pewarna) diatas ambang batas;

d. Terlaksananya pengambilan dan uji sampel pangan segar hasil pertanian, peternakan dan perikanan di Pasar Tradisional dan Pasar Modern di 11 kecamatan dalam Kota Jambi;

e. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Kota Jambi dari 91 menjadi 91,5 dengan nilai angka kecukupan ketersediaan protein 99,14 gr/kapita/hari dan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 3.012 Kkal/Kap/hari.

Dalam melaksanakan urusan pangan tersebut permasalahan yang masih dihadapi:

1) Pemenuhan cadangan Pangan Pemerintah Kota Jambi belum didukung oleh sarana dan prasarana yakni gudang dan jumlah cadangan pangan belum sesuai dengan amanat undang-undang yaitu 100 ton;

2) Implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) melalui pangan lokal belum optimal. Hal ini ditandai Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras, dan konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah yang belum memenuhi anjuran;
3) Sosialisasi keamanan jajanan anak sekolah khususnya di Sekolah Dasar tidak maksimal dilakukan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19;
4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi;
5) Belum ada petugas pengambil contoh (PPC) untuk melakukan uji sampel yang terlatih;
6) Koordinasi Tim Satgas Pangan belum optimal.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) Menyediakan sarana prasarana penyimpanan ketersediaan pangan terutama bahan pokok masyarakat demi menjaga kestabilan harga dan pasokan;
2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pola konsumsi pangan rumah tangga sesuai anjuran nilai Angka Kecukupan Energi (AKE) 2150 Kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kap/hari;
3) Melaksanakan penyuluhan secara berlanjut ditengah masyarakat Kota Jambi untuk tentang sumber pangan alternatif karbohidrat selain beras dan non terigu melalui pembinaan dan sosialisasi/edukasi;

4) Melakukan Promosi peningkatan Pola konsumsi sesuai anjuran yang berkualitas melalui kegiatan Display, Pameran /Expo, Gerakan Makan Diversifikasi Pangan Lokal dan Gerakan One Day No Rice;
5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pangan yang aman konsumsi melalui soialisasi dan membentuk jejaring pangan daerah;
6) Meningkatkan koordinasi yang bersinergi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan, inovasi teknologi dalam rangka percepatan pengentasan daerah rawan pangan;

2. Urusan perikanan

Adapun capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perikanan pada tahun 2020 adalah :

1) Tercapainya target PAD dari hasil penerimaan retribusi jasa usaha Produksi benih di UPTD PBAT sebesar 103,66 % dari target senilai Rp. 80.850.000,00 terealisasi sebesar Rp. 83.812.000,00;
2) Terlaksananya penyusunan Site Plan UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3) Terlaksananya Restocking benih ikan jelawat sebanyak 22.000 (Dua puluh dua ribu) ekor yang bertempat di Danau Sipin; dan
4) Terlaksananya kegiatan percontohan budidaya gurame pada Pokdakan Pancabakti Kecamatan Pelayangan.

Dalam melaksanakan urusan perikanan tersebut terdapat beberapa permasalahan dihadapi, seperti :

1) Harga pakan ikan yang cendrung tinggi;
2) Kurangnya inovasi pada tenaga teknis perikanan;
3) Terbatasnya pasokan induk ikan untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas;

4) Menurunnya kualitas air akibat pencemaran limbah industri maupun limbah rumah tangga akibat tingginya bisnis property;
5) Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1) Melakukan pelatihan dan bimbingan kepada petani pembudidaya ikan, petugas penyuluh perikanan maupun petugas teknis OPD sehingga petugas dapat melakukan inovasi yang belum pernah diterapkan pada pembudidaya ikan;
2) Melakukan pelatihan gerakan pembuatan pakan ikan secara mandiri guna menekan biaya pada usaha budidaya ikan;
3) Melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan pada pembudidaya ikan selama 5 tahun;
4) Mengoptimalkan hasil produksi benih ikan unggul di UPT PBAT Simpang rimbo dan Danau Teluk dengan cara meningkatkan kompetensi petugas teknis terlatih dengan menyeimbangkan jumlah petugas teknis untuk UPTD tersebut;
5) Melakukan sosialisasi undang-undang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dengan efektif dan efisien.

3. Urusan pertanian

Urusan pertanian pada Tahun 2020 memiliki satu program urusan yakni program peningkatan Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan dengan 9 (sembilan) kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

A. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1) Terlaksananya pengadaan paket percontohan untuk masyarakat dalam bentuk bibit/benih tanaman sayur daun dan buah;

tanaman cabe dalam polybag 9000 Polybag, toga 1500 polybag; tanaman terong sebanyak 1500 polybag dan tanaman buah unggulan sebanyak 400 polybag;

2) Tercapainya produktivitas tanaman padi yang melebihi target yang ditetapkan tahun 2020 yaitu dari target 5,2 % terealisasi 5,4 %.

B. Bidang Peternakan

1) Terlaksananya Inseminasi Buatan dan SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) sebanyak 387 ekor dan kelahiran sebanyak 265 ekor;
2) Pelaksanaan pendataan jumlah stok ketersediaan ternak (Sapi/kerbau, ayam dan telur) pada saat menjelang Hari besar Keagamaan;
3) Mengeluarkan rekomendasi usaha peternakan;
4) Melaksanakan kegiatan promosi produk peternakan sebanyak 2 (dua) kali dan dilaksanakan di dalam Kota Jambi tepatnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Propinsi yang ke 63, dilaksanakan di Lapangan Gubernur dan di lapangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi;
5) Terlaksananya pemeriksaan sampel penyakit, pengendalian dan penanggulangan peyakit hewan, serta pengambilan dan pemeriksaan sampel kesmavet dan Pangan Asal Hewan (PAH).

Dalam melaksanakan urusan pertanian terdapat beberapa permasalahan pada tahun 2020, yakni :

1) Berkurangnya luasan lahan produktif yang digunakan untuk kegiatan pertanian;
2) Penerapan teknologi baru budidaya tanaman yang belum optimal pada tingkat petani yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan

lahan kosong atau pekarangan rumah;

3) Peran penyuluh yang dirasa belum optimal;
4) Tidak adanya jaminan pegaturan harga produk angan yang wajar dari pemerintah kecuali beras;
5) SDM yang kurang untuk mengevaluasi disemua kegiatan pertanian.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Optimalisasi oleh petugas terhadap lahan pertanian yang masih berproduksi, seperti melakukan gerakan pemanfaatan lahan sempit/lahan pekarangan;
2) Melakukan pendampingan atau bimbingan terhadap penggunaan pestisida/herbisida ramah ligkungan;
3) Optimalisasi peran penyuluh pertanian sebagai garis terdepan dalam rangka peningkatan pemahaman pertanian sempit berdaya, memberikan penyuluhan kepada petani dan kelompok tani dalam rangka penerapan teknologi pertanian perkotaan;
4) Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis penambahan nilai produk pertanian;
5) Melakukan bimbingan pelatihan kepada ternak tentang budidaya yang benar dan penggunaan tatacara penggunaan yang baik dan ekonomis
6) Penambahan jumlah dokter hewan untuk pengawasan kesmavet dan pengobatan hewan.

SASARAN 10
MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Sasaran selanjutnya adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

Tabel 3.12.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 10 (Kesepuluh) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,36%	2,38%	2,29%	96,22%	2,41%
RATA-RATA % CAPAIAN					2,36%			96,22%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Sasaran ke 10 (sepuluh) meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menetapkan 1 (satu) IKU yaitu kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan target sebesar 2,38 persen terealisasi sebesar 2,29 persen atau dengan capaian sebesar 96,22 persen, masuk kategori **SANGAT TINGGI.** Hal ini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPS Kota Jambi bahwa Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikelompokkan dalam Industri Perhotelan dan Restoran/Kuliner. Untuk industri Perhotelan dan Restoran, untuk tahun 2020 mengalami minus, hal ini menunjukkan bahwa industri perhotelan dan restoran mengalami kerugian. Hal ini dipengaruhi karena dampak dari Pandemi Covid-19.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi dari sektor Pariwisata dengan target pada tahun 2020 sebesar Rp. 45,5 Milyar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi bahwa untuk PAD sektor Pariwisata sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp. 51.298.808.979,- (Lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratusn tujuh puluh sembilan rupiah), hal ini menunjukkan peningkatan sebesar **113**% dari target tahun 2020, namun Kontribusi PAD sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi hanya 23,8 % dari PAD Kota Jambi Tahun 2020 sebesar 216,815.393.479.-

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi tahun 2019 menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 500.000 orang. Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Jambi sebesar 297.710 orang atau mengalami penurunan menjadi sebesar 59,54 persen dari target. Jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan jumlah kunjungan tamu hotel selama tahun 2020 di Kota Jambi. Rata-rata lamanya hari kunjungan wisatawan di Kota Jambi di hitung dari lamanya tinggal wisatawan di Kota Jambi. Hal ini dari jumlah rata-rata tamu yang menginap selama 3 (tiga) hari. Adapun jumlah hotel yang berinvestasi di Kota Jambi adalah hotel bintang 5 sebanyak 1 hotel, hotel bintang 4 sebanyak 4 hotel, hotel bintang 3 sebanyak 2 hotel, hotel bintang 1 sebanyak 3 hotel dan hotel melati sebanyak 85 hotel. Disamping itu jumlah destinasi objek wisata dengan target 5 destinasi terealisasi 6 destinasi atau dengan capaian 120 persen. Pada akhir tahun 2020 permbangunan dan Pengembangan destinasi wisata telah melebihi sebagaimana yang ditargetkan, adapun tempat destinasi wisata yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun swasta pada tahun 2020 antara lain :

1. Rehab/pengembangan Taman Sepada sepanjang jalan Sumantri Brojonegoro Sipin Jambi.
2. Pengembangan Destinasi Wisata Taman Remaja Kota Baru Kota Jambi
3. Pengembangan Destinasi Wisata Tugu Keris siginjai dan Taman Jomblo di seputaran kantor Walikota Jambi
4. Pengembangan Destinasi Taman Kongkow Kota baru kota Jambi
5. Pengembangan Destinasi Taman Hutan kota Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru, Kota Jambi
6. Pembangun dan Pengembangan Taman Air Kota Baru kota Jambi.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan adalah program dan kegiatan telah dianggarkan di dalam dokumen penggunaan anggaran (DPA) perangkat daerah tahun 2020, adanya komitmen pimpinan dimana Walikota Jambi memberikan dukungan suport yang sangat tinggi terhadap kemajuan kepariwisataan dan kebudayaan Kota Jambi, adanya dukungan stakeholder pariwisata, dan instansi terkait seperti dari para penggiat pariwisata, pelaku seni dan budaya serta dari pengelola dan pemilik usaha pariwisata serta dari instansi pemerintah baik instansi vertikal, provinsi dan Pemerintah Kota Jambi. Lebih lanjut adanya peran serta masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut seperti memberikan suport dalam mendukung setiap kegiatan atau even yang dilaksanakan selalau ramai meriah dan tidak pernah terjadi hambatan dan kekacauan semuanya berjalan dengan lancar dan tertib.

Adapun yang menjadi faktor penyebab kegagalan, adalah masih kurang maksimalnya koordinasi dan dukungan stakeholder pengelola usaha pariwisata di Kota Jambi, masih kurangnya perencanaan penganggaran pada kegiatan dan keterbatasan alokasi anggaran yang diperuntukkan. Disamping dikarenakan pandemi covid 19.

SASARAN 11
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sasaran kesebelas terkait meningkatkan pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020 melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran ke 11 (kesebelas) dengan melaksanakan Program Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Tabel 3.13.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 11 (Kesebelas) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
11.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	201,13%	9,00%	-9,64%	-107,11%	9,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					201,13%			-107,11%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Sasaran ke 11 (sebelas) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menetapkan 1 (satu) IKU yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target 9,00 persen terealisasi -9,64 persen dengan capaian -107,11 persen termasuk kategori **SANGAT RENDAH**. Persentase realisasi PAD tahun 2020 dapat dihitung dengan formulasi selisih realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dibagi realisasi tahun sebelumnya dikalikan 100% seperti berikut ini :

$$\% \text{ Realisasi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD 2020} - \text{Realisasi PAD 2019}}{\text{Realisasi PAD 2019}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 355.505.051.146} - \text{Rp. 393.429.595.384}}{\text{Rp.393.429.595.384}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{-9{,}64\%}$$

Terlihat penurunan yang signifikan dari realisasi PAD Kota Jambi Tahun 2020 yang hanya sebesar Rp.355.505.051.146,- (-9,64%) dibanding realisasi PAD Tahun 2019 sebesar Rp.393.429.595.384,- (16,09%). Penurunan realisasi PAD ini terjadi karena pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan di beberapa sektor pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak reklame.

Adapun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut :

No.	Komponen PAD	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	% Peningkatan/ (Penurunan)
1	Pajak Daerah	255,915,037,458.00	216,815,393,479.00	(15.28)
2	Retribusi Daerah	38,540,603,597.06	40,479,596,103.50	5.03
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,783,144,576.94	9,602,267,383.48	(1.85)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89,190,809,751.44	88,607,794,179.95	(0.65)
		393,429,595,383.44	355,505,051,145.93	(9.64)

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyumbang terbesar realisasi PAD Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah dari sektor Retribusi Daerah sebesar 40,479,596,103.50 dengan peningkatan sebesar 5,02%.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai koordinator diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (pemerintahan dan pembangunan) di daerahnya melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah :

a. Persepsi Wajib Pajak terhadap pengunaan uang pajak.
b. Belum memiliki SDM berkualitas yang memahami masalah perpajakan.
c. Penegakan hukum (*Low Infocement*) yang lemah.
d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyajian data dan informasi.
e. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih rendah.
f. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak belum jelas.
g. Sistem administrasi penerimaan yang kurang optimal

Hambatan dalam piutang :

a. Piutang Pajak Daerah
    1. Wajib Pajak mengalami pailit/kebangkrutan
    2. Wajib Pajak pindah tanpa pemberitahuan.
    3. Wajib Pajak tutup usaha tanpa adanya laporan.
    4. Belum adanya kebijakan dalam penghapusan piutang pajak

b. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
   1. Data Tunggakan
   2. Wajib Pajak tidak diketahui (*No Name*)
   3. Terdapatnya SPPT PBB ganda *(double)* dan Batal
   4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Adapun upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada yaitu antara lain :

Solusi dalam pencapaian target Pendapatan :

a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dengan mengikut sertaan pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Jambi untuk mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan.
c. Adanya perubahan regulasi pajak daerah.
d. Memaksimalkan sistem *computerized* pajak daerah.
e. Penyempurnaan data base wajib pajak
f. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah
g. Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah.

Solusi dalam piutang :

a. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak
b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk mengurangi jumlah piutang.
c. Melakukan penghapusan pembukuan piutang berdasarkan pertimbangan dan peraturan yang ada.
d. Perlunya Peraturan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah

SASARAN 12
MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI

Sasaran dua belas terkait meningkatkan realisasi investasi yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020 melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran ke 11 (kesebelas) dengan melaksanakan Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Tabel 3.14.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 12 (dua belas) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
12.	Meningkatkan realisasi investasi	18.	Realisasi investasi	410 M	245,12%	430,5 M	249,4 M	68,39%	523,37 M
RATA-RATA % CAPAIAN					245,12%			68,39%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Indikator Kinerja Utama Realisasi Investasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi menetapkan target sebesar 430,5 M pada tahun 2020, terealisasi sebesar 249,4 M, persentase capaian sebesar 68,39 persen masuk dalam kategori **SEDANG**. Data pendukungnya adalah sebanyak 45 perusahaan membuat yang sudah memenuhi syarat komitmen berupa

rekomendasi perizinan telah membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang didaftarkan melalui aplikasi OSS pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, dimana aplikasi tersebut terkoneksi ke Badan Koordinator Penanaman Modal dan laporan dari 45 perusahaan telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinator Penanaman Modal.

Selain itu secara berkala terus dilaksanakan bimbingan teknis dan kegiatan turun ke lapangan dikarenakan masih banyaknya perusahaan yang belum mengetahui cara penginputan pada aplikasi OSS terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Adapun kegiatan ini bertujuan mensinergikan antara aktivitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat guna menyatukan visi; dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan *multiplayer effect* positif bagi perekonomian daerah.

Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kota Jambi adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan, bina marga dan lingkungan hidup, komunikasi, dan informasi serta perhubungan.

Data Izin yang diterbitkan Tahun 2020

No.	Dokumen Izin yang Terbit	Jumlah
1.	Dokumen Izin Usaha Baru	3.001
2.	Dokumen Izin IMB	3.228
3.	Dokumen Izin Registrasi	3.458
6.	Dokumen Izin Usaha Perawat dan sejenisnya	2.244
	T O T A L	**11.931**

Berdasarkan data diatas, adapun data izin yang diterbitkan tahun 2020 yaitu izin usaha baru sebanyak 3.001 dokumen, izin IMB sebanyak 3.228 dokumen, izin Registrasi sebanyak 3.458 dokumen, dan izin usaha perawat dan sejenisnya sebanyak 2.244 dokumen.

Rumusan Indikator dan formulasi Perhitungan
Tahun 2020

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Keterangan
Target Realisasi Investasi (Renstra/RPJMD	430.500.000.000	430.500.000.000	
Realisasi Investasi	1.055.269.443.825	249.446.980.393	
Peningkatan Realisasi Investasi	232 %	-76,36%	Realisasi Investasi 2019 – Realisasi Investasi 2018 x 100%
Capaian Target Realisasi	245,13%	57,95%	Realisasi Investasi 2019 x 100% Realisasi Investasi Target

Rencana Investasi di Kota Jambi
Tahun 2020

NO.	BULAN	JUMLAH TENAGA KERJA	JUMLAH INVESTASI (Rp)	KETERANGAN
1.	Januari	1.101	379.315.494.529	
2.	Februari	485	1.389.410.957.004	
3.	Maret	442	5.130.000.000	
4.	April	681	844.379.720.301	
5.	Mei	582	23.932.399.366.479	
6.	Juni	943	275.426.313.128	
7.	Juli	408	310.908.223.857	
8.	Agustus	937	121.167.258.028	
9.	September	411	184.208.679.386	

10.	Oktober	551	181.851.945.638	
11.	November	848	318.330.446.278	
12.	Desember	1.448	555.409.458.806	
	Jumlah	**8.837**	**28.497.937.863.434**	

Sumber data : NSWI

Rencana tabel Investasi diatas pada bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2020 data melalui OSS dengan menggunakan OSS Versi 1.0 dari data perusahaan yang OSS dan NIB yang bisa Online waktu itu karena OSS masih berada dalam Lingkup Kementerian Perekonomian. Sedangkan untuk bulan mei s/d desember OSS tersebut telah berubah menggunakan Versi 1.1 namun data perusahaan OSS dan NIB tersebut tidak bisa diakses (Online) maupun di Unduh karena aplikasi tersebut untuk sementara masih dalam transisi yang akan dialihkan dari Kementerian Perekonomian ke BKPM RI Pusat.

SASARAN 13
MENINGKATKAN PENYERAPAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Sasaran ke 13 (ketiga belas) terkait meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020 melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran ke 13 (ketiga belas) dengan melaksanakan Program Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 3.15.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 13 (tiga belas) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2019			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	101,21%	65,25%	64,12%	98,27%	66,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					101,21%			98,27%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Iku ke 19 (kesembilan belas) ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 65,25 persen terealisasi sebesar 64,12 persen dengan capaian 98,27 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Adapun formulasi pengukuran jumlah angkatan kerja sebesar 296.275 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 462.029 orang kali 100 persen sehingga terealisasi sebesar 64,12 persen dari target 65,25 persen atau dengan capaian tercatat sebesar 98,27 persen, capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja yang tercatat sejumlah **196.275 orang**, sedangkan jumlah penduduk usia kerja sejumlah **462.029 orang**. sehingga capaian tercatat sebesar **64,12%**, capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar **65,25 %** (Data diperoleh dari BPS Kota Jambi).

Dapat dijelaskan bahwa **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang aktif mencari pekerjaan atau yang bekerja. **Penduduk Usia Kerja**adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja maupun yang tidak bekerja (tidak bekerja : pelajar, Ibu rumah tangga, kelompok penerima pendapatan seperti lansia). Penduduk usia kerja akan terus bertambah setiap tahun seiring dengan pertambahan penduduk.

Pandemi covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dikarenakan menurunnya jumlah angkatan kerja akibat dampak banyaknya terjadinya PHK dan penutupan usaha, sementara jumlah penduduk usia kerja bertambah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2020, jumlah angkatan kerja tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk usia kerja.

Untuk mencapai target indikator program tersebut, bidang penempatan tenaga kerja melaksanakan 2 (dua) kegiatan tehnis, yaitu :

1. Kegiatan pemberian fasilitasi dan pengadaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

   Untuk kegiatan pemberian fasilitasi dan pengadaan pelatihan tenagakerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, dilaksanakan beberapa sub kegiatan, yaitu :

   a. Pelatihan Keterampilan Desain Grafis : 1 angkatan : 20 orang
   b. Pelatihan Keterampilan Menjahit : 2 angkatan : 40 orang
   c. Pelatihan Keterampilan Tata Rias Kecantikan : 2 angkatan : 40 orang
   d. Pelatihan Service AC : 1 angkatan : 15 orang
   e. Pelatihan Operator Komputer : 1 angkatan : 15 orang

   Untuk tahun 2020, pengadaan pelatihan berbasis masyarakat yang ditahun sebelumnya memberikan pelatihan menjahit bagi anggota P2WKSS (bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi) ditiadakan, karena adanya pengalihan anggaran akibat pandemi covid 19.

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kegiatan diatas, yaitu :

   - Tingginya minat pencaker untuk mengikuti pelatihan untuk menambah keahlian

- Pelatihan yang dilaksanakan bidang penempatan dan produktivitas tenaga kerja di tahun 2020, memiliki kotribusi langsung kepada peserta pelatihan untuk dapat bersaing dalam pasar kerja, meskipun jumlah tenaga kerja yang terdaftar belum seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.
- Pembinaan dan evaluasi secara berkala bagi pencaker yang telah mengikuti pelatihan dan yang telah ditempatkan sesuai dengan lowongan kerja yang diinformasikan, sehingga dapat diketahui sejauh mana para pencaker memaksimalkan keahlian dan kesempatan yang dimiliki untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri sebagai sumber penghasilan.
- Tersedianya Instruktur berkompeten dalam pelaksanaan pelatihan

Sedangkan faktor yang penghambat capaian kegiatan ini, yaitu:

- Terbatasnya quota jumlah peserta pelatihan
- Terbatasnya jenis pelatihan yang diminati pencaker

2. Kegiatan Penyusunan dan Perluasan Informasi Pasar Kerja

   Untuk Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Penyusunan dan Perluasan Informasi pasar kerja,hanya melaksanakan kegiatan rutin pelayanan pembuatan AK1 dan pelayanan antar kerja bagi pencaker. 2 (dua) kegiatan yang biasanya selalu dilaksanakan setiap tahunnya ditiadakan, karena dampak pandemi covid 19, kegiatan itu yaitu pelaksanaan Job Fair dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 – 2008.

   Untuk pelayanan antar kerja, masalah yang dihadapi masih seperti tahun sebelumnya, yaitu lowongan kerja yang tersedia sebagian besar kurang diminati oleh pencaker, seperti lowongan marketing.

SASARAN 14
MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL

Sasaran ke 14 (keempat belas) terkait meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,Koperasi dan UKM Kota Jambi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020.

Tabel 3.16.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 14 (empat belas) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
14.	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	100,00%	8,54%	8,54%	100,00%	10,00%
		21.	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	448,8%	5,35%	2,8%	52,34%	8,3%
		22.	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	102,73%	19,27%	19,73%	101,46%	36,70%
RATA-RATA % CAPAIAN					8,30%			84,6%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

IKU kedua puluh menetapkan persentase usaha mikro kecil yang berkualitas dengan target 8,54 persen terealisasi 8,54 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen termasuk kategori **SANGAT TINGGI**. Pengukuran pencapaian persentase usaha mikro kecil yang berkualitas yaitu jumlah UKM berkualitas sebanyak 920 UKM dibandingkan dengan jumlah UKM sebanyak 10.763 UKM dikali 100 persen. Dan realisasi capaian sebesar 8,54 persen dari target yang ditetapkan sebesar 8,54 persen. Berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kopersai dan UKM Kota Jambi Nomor 135

Tahun 2020 tanggal 24 November 2020, standar penilaian UKM berkualitas adalah:

- Memiliki kelengkapan izin usaha dan sertifikat kelayakan usaha lainnya
- Memiliki tempat usaha dan kelengkapan sarana dan prasarana usaha yang memadai
- Mempunyai modal usaha dan telah melaksanakan manajemen pembukuan usaha
- Telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen usaha dan memiliki rencana kerja
- Mampu mengembangkan produk dan pemasaran produk

Adapun faktor-faktor yang mendorong keberhasilan capaian indikator sasaran yang didukung program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Program ini memiliki indikator persentase usaha mikro menjadi usaha kecil, dengan rumusan pengukuran capaian program ini adalah jumlah usaha kecil sebanyak 3.556 di akhir tahun 2019 dan di tahun 2020 bertambah sebanyak 50 usaha kecil. Sedangkan jumlah usaha mikro sebesar 7.157 sehingga pencapaian program ini 50,39 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 46,69 persen.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan wirausaha pemula bagi 80 peserta. Kegiatan pelatihan ini terlaksana karena tingginya minat masyarakat untuk memiliki usaha.

2. Kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mikro kecil untuk dapat mengembangkan usahanya. Adapun pelatihan yang dilaksanakan, terdiri dari:

- Pelatihan olahan makanan : 80 peserta
- Pelatihan sertifikasi halal : 30 peserta
- Pelatihan handycraft : 80 peserta
- Pelatihan manajemen pengelolaan : 70 peserta

Faktor yang mempengaruhi kegiatan ini terlaksana, yaitu besarnya minat pelaku UMKM untuk menambah keahliannya dalam menghasilkan produk UMKM maupun manajemen pengelolaan usahanya, serta didukung adanya instruktur yang berkompeten dibidangnya.

3. Kegiatan penguatan pemasaran bagi produk UMKM

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendataan UMKM yang terdampak pandemi covid 19, sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya pelaku UMKM tersebut diajukan untuk menerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang.

DATA UMK PER JENIS USAHA KOTA JAMBI

TAHUN 2020

No	Kecamatan	Rekapitulasi UMKM	UMKM PERBIDANG USAHA										
			Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Ojek	PKL	UMKM Yang Menjadi Anggota Koperasi	Agro	TI	Jasa/ Kreatifitas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Telanaipura	1.195	452	60	-	42	292	53	88	1	63	144	1.195
2	Jambi Selatan	847	499	55	-	26	124	162	52	4	17	92	1.031
3	Jambi Timur	1.423	575	38	1	57	125	206	193	-	19	209	1.423
4	Pasar Jambi	929	406	108	-	15	-	228	-	4	9	159	929
5	Pelayangan	601	281	60	-	7	72	61	91	2	8	33	615
6	Danau Teluk	656	401	69	-	3	-	98	31	-	3	51	656
7	Kota Baru	736	242	55	-	39	251	56	18	-	11	64	736
8	Jelutung	553	111	40	-	8	66	207	35	-	3	83	553
9	Alam Barajo	1.116	435	63	-	42	-	109	-	-	19	264	932

10	Danau Sipin	1.592	742	106	-	30	-	346	-	-	35	319	1.578
11	Paal Merah	1.115	490	87	-	52	-	231	-	5	22	228	1.115
Jumlah		**10.763**	**4.634**	**741**	**1**	**321**	**930**	**1.757**	**508**	**16**	**209**	**1.646**	**10.763**

IKU ke 21 (dua puluh satu) persentase daya saing produk IKM, dengan target 5,35 persen terealisasi 2,8 persen dengan capaian 52,34 persen termasuk kategori **SEDANG**. Suatu prestasi kerja yang baik walaupun dalam masa pandemic covid 19 dan anggarannya sebagian besar dirasionalisasi masih dapat menyelesaikan beban pekerjaan, dapatlah dikatakan tingkat capaian kinerja indikator sasaran nilainya **rendah** (interval penilaian 51≤ 65). Adapun formulasi pengukuran realisasi indikator kinerja sasaran (tahun n) dibagi target indikator kinerja sasaran (tahun n) yang didukung oleh urusan perindustrian dengan menggunakan 2 indikator kinerja dan diwujudkan oleh program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan industri dan perdagangan, yaitu:

1. persentase IKM yang di bina

   Dalam mewujudkan sukses atau tidaknya suatu IKM tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM. Pelaku usaha IKM merupakan salah satu variabel dalam pencapaian Kota Jambi menjadi kota jasa dan perdagangan Dengan baiknya IKM yang dibina sehingga mampu mewujudkan menjadi IKM yang mandiri dapat menunjukkan peran pemerintah sangat penting. Untuk implementasi di dukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

   a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro, dan hasil hutan

      Dengan Indikator jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina dan dengan target sebanyak 120 unit IKM. Bentuk aksi dari kegiatan ini pelatihan BTP/BTM (bahan tambahan makanan/bahan tambahan pangan) untuk anggota IKM sebanyak 35 (lima puluh) orang, dan

pemberian bantuan hibah peralatan produksi untuk 25 IKM. Dengan formulasi penghitungan realisasi jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) sebanyak 60 unit IKM dibagi target IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) sebanyak 120 unit IKM dikali 100 persen dengan capaian 50 persen.

b. Kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika, dan aneka kerajinan

Dengan indikator jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina dengan target sebanyak 38 unit IKM. Bentuk aksi dari kegiatan ini direncanakan pelatihan service handphone untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. Formulasi penghitungan realisasi IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) 36 orang dibagi target IKM logam mesin, elektornika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) sebesar 38 orang dikali 100 persen dengan capaian 95 persen.

c. Kegiatan peningkatan pengembangan SDM industri kecil dan menengah

Dengan indikator jumlah SDM IKM yang berkualitas dengan target sebanyak 80 unit IKM. Bentuk aksi dari kegiatan ini berupa pemberian pelatihan Achevement Motivation Training (AMT) untuk SDM IKM yang terdapat di Kota Jambi, dimana ditargetkan untuk tahun 2020 sebanyak 80 unit IKM. Formulasi penghitungan realisasi SDM IKM yang dibina (tahun n) tidak terealisasi dibagi target SDM IKM yang dibina (tahun n) sebanyak 80 unit IKM dengan capaian 0 persen. Penyebabnya adalah tidak dilaksanakan karena anggarannya seluruhnya dirasionalisasi untuk pengangan covid 19.

2. persentase IKM yang bermitra.

IKM yang sukses dan mandiri merupakan salah satu penunjang atau

penopang tercapainya visi dan misi Walikota menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa terutama di Provinsi Jambi, sehingga kemampuan membina dan memfasilitasi IKM menjadi hal yang sangat urgen oleh karena itu IKM dijadikan indikator dalam pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja di dukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM

   Dengan indikator jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan dengan target sebanyak 80 unit IKM. Bentuk aksi yang akan dilaksanakan antara lain :

   1. Cetak stiker
   2. Konsultasi kemasan

   Formulasi penghitungannya realisasi jumlah kemasan IKM bermitra (tahun n) sebanyak 139 Unit IKM dibagi target kemasan IKM bermitra (tahun n) sebanyak 80 unit IKM dengan capaian 174 persen.

b. Kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah denga swasta

   Dengan indikator jumlah IKM yang bermitra dengan Dekranasda dan pelaku usaha dengan target sebanyak 80 unit IKM. Pada kegiatan ini bentuk aksi atau pekerjaan yang dilaksanakan berupa :

   a. Fashion
      - Melaksanakan Jambi fashion Festival 2020, yang direncanakan pada tanggal 5 Desember 2020 di Ruang Ebony BW Luxury Hotel Jambi. Dengan rangkaian kegiatan berupa lomba desain busana muslim dan casual etnik, fashion show dan bazaar.
      - Mengikuti Palembang fashion week 2020, yang direncanakan

pada tanggal 5 s/d 7 Maret 2020 di PSCC Palembang Icon Mall.

b. Mengikuti Pameran

- Mengikuti pameran Palembang fashion week 2020 di Palembang.

Formulasi penghitungannya realisasi IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n) sebanyak 17 unit IKM dibagi target IKM yang bermitra dengan Dekranasda dan pelaku usaha tahun n) sebanyak 50 unit IKM dengan capaian 34 persen.

c. Kegiatan promosi/pameran produk Jambi

Indikatornya adalah jumlah IKM yang ikut pameran/promosi dengan target sebanyak 16 unit IKM. Pada kegiatan ini bentuk aksi yang dilakukan yaitu membawa unit IKM mempromosikan hasil produknya ke tempat pameran. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bertujuan mengembangkan ekonomi berbasis potensi daerah, memberikan peluang bagi IKM untuk berinteraksi langsung dengan para pengunjung/custumer/buyer, mengajak masyarakat mencintai seni budaya dan produk Kota Jambi, mempromosikan produk unggulan daerah dan kerajinan nusantara sehingga membuka lapangan kerja dan kesempatan investasi. Untuk kegiatan ini selama tahun 2020 diikuti sebanyak 8 peserta unit IKM dari semula yang direncanakan sebanyak 16 unit IKM. Formulasi penghitungannya realisasi IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) sebanyak 8 unit IKM dibagi target IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) sebanyak 16 unit Ikm dengan capaian sebesar 50 persen.

IKU ke 22 persentase koperasi berkualitas, dengan target sebesar 19,27 persen terealisasi 19,73 persen dengan capaian 101,46 persen termasuk kategori SANGAT TINGGI. Pengukuran pencapaian persentase

koperasi berkualitas, alah jumlah koperasi berkualitas dibagi jumlah koperasi aktif di kali 100 persen. Di akhir tahun 2019, jumlah koperasi berkualitas sebanyak **36 koperasi** dengan jumlah koperasi aktif sebanyak **218 koperasi**. Dan ditahun 2020, jumlah koperasi berkualitas bertambah **7 koperasi** sehingga total jumlah koperasi berkualitas yaitu **43 koperasi**. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung persentase capaian Koperasi berkualitas sebesar **19,73 %**. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **19,27 %**. Berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi No. 43.a Tahun 2019 tanggal 11 Maret Tahun 2019, koperasi dikategorikan berkualitas, jika telah memenuhi persyaratan berikut :

- Memiliki sarana kantor dan usaha koperasi
- Tertib administrasi (memiliki buku 16)
- Penyelenggaraan rapat anggota, rapat pengurus, rapat pengawas, dan/atau rapat gabungan dalam 1 tahun
- Melaksanakan RAT
- Memiliki rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi (RAPBK)
- Peningkatan jumlah anggota
- Memiliki dana pendidikan
- Memiliki dana sosial
- Penyelenggaraan audit
- Laporan keuangan yang sehat untuk KSP/USP

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target indikator ini yaitu koperasi yang diarahkan untuk mencapai kategori berkualitas, telah tertib melaksanaan administrasi pembukuan usaha, telah mengupayakan adanya kantor sekretariat, tetap melaksanakan RAT sesuai jadwal meskipun ditengah pandemi covid 19, dan mampu menyajikan laporan keuangan

yang sehat. Disamping itu capaian indikator sasaran didukung oleh program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Pengukuran capaian indikator program ini, adalah jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dibagi jumlah koperasi aktif di kali 100 persen. Ditahun 2020, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 105 koperasi, dan jumlah koperasi aktif sebanyak 218 koperasi. Hal ini menunjukkan capaian program sebesar 48,17 %, belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 57,33 %.

Maju atau mundurnya perkembangan Koperasi, dipengaruhi oleh keaktifan para anggota, profesionalitas pengurus dan pembinaan dari pemerintah. Ketiga hal itu harus sejalan agar perkembangan suatu Koperasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, guna meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, sebagai salah satu gerakan ekonomi kerakyatan yang turut memberi andil dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah, Koperasi diharapkan mampu memberi kontribusi lebih dalam menyeimbangkan perekonomian masyarakat menengah, terutama saat pandemi covid 19 seperti saat ini yang dampaknya sangat dirasakan. Untuk itulah Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM berupaya terus meningkatkan kualitas pembinaan terhadap gerakan Koperasi melalui kegiatan-kegiatan yang merupakan kesinambungan dari tahun anggaran sebelumnya.

Faktor yang paling mempengaruhi berkurangnya jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT, yaitu karena adanya pandemi covid 19 yang membuat koperasi yang belum memiliki fasilitas IT, tidak dapat melaksanakan RAT. Faktor-faktor yang mendukung tetap terlaksananya pembinaan kepada koperasi, yaitu :

- Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan memberikan manfaat langsung bagi gerakan Koperasi binaan, baik kepada anggota, pengurus/pengelola dan pengawas,
- Adanya kesadaran dari anggota dan pengurus/pengelola untuk dapat mempertahankan manajemen usaha koperasi dengan baik, sehingga manfaat dari Koperasi semakin dapat dirasakan oleh seluruh anggota meskipun dampak pandemi covid 19 juga berimbas pada aktivitas dan operasional pengelolaan Koperasi.

Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan beberapa kegiatan, yaitu:
   - Workshop Peningkatan Partisipasi Anggota : 20 Koperasi (244 peserta)
   - Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengurus Koperasi : 13 Koperasi (30 peserta)
   - Bintek Pengelolaan Koperasi Syariah : 33 Koperasi (60 peserta)
   - Pelatihan SIAKop : 20 Koperasi (20 peserta)
   - Kegiatan Perkoperasian Bagi Kelompok Ekonomi Produktif : 8 Koperasi (200 peserta)
   - Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Pengelola KSP/USP : 24 Koperasi (24 peserta)
   - Bintek Akuntansi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi : 31 Koperasi (60 peserta)
2. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pembentukan tim penilai kesehatan koperasi KSP/USP dan tim satgas pengawas koperasi, yang melakukan penilaian kesehatan KSP/USP dan melakukan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan Koperasi terhadap aturan yang berlaku, terutama tentang administrasi pengelolaan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 17.393.500,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan output kegiatan terlaksananya peningkatan pengawasan terhadap koperasi.

DATA JUMLAH KOPERASI PER JENIS USAHA TAHUN 2020

NO	Kecamatan/ District	Kota Baru	Alam Barajo	Jambi Selatan	Paal Merah	Jelutung	Pasar Jambi	Telanai pura	Danau Sipin	Danau Teluk	Pelay angan	Jambi Timur	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kop.Pertanian/Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kop. Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kop. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kop. Nelayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kop. Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kopti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Kopra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kopinkra	-	-			-		-			-		-
10	Koppontren	1	-							1	1		3
11	Kopkar	2	-	-	1	3	3	5	4	-	-	2	20
12	Kop. Angkatan Darat	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	1	8
13	Kop. Angkatan Laut												-
14	Kop. Angkatan Udara												-
15	Kop. Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16	Kop. Serba Usaha	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4

17	Kop. Pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kop. Simpan Pinjam	2	1	2	3	1	-	4	1	-	-	-	14
19	Kop. Angkutan Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kop. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kop. Angkutan Udara												-
22	Kop. Angkutan Sungai												-
23	Kop. Angkutan Penyebrangan												-
24	Kop. Wisata												-
25	Kop. Telkom												-
26	Kop. Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K.B.P.R												-
28	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	23	4	9	3	3	3	30	3	1	-	4	83
29	Kop. Listrik Pedesaan												-
30	Kop. Asuransi Indonesia												-
31	Kop. Wanita	1	2	1	2	1	1	-	2	-	-	2	12
32	Kop. Profesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kop. Veteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

34	Kop. Wredatama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kop. Pepabri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	Kop. Mahasiswa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
37	Kop. Pemuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kop. Pertambangan												-
39	Kop. Padagang Kaki Lima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kop. Jamu Gendong												-
41	Kop. Lainnya (Umum, Mesjid)	7	10	2	9	7	5	12	7	2	1	2	64
42	KJKS (BMT)	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	6
Jumlah		**41**	**17**	**14**	**19**	**18**	**16**	**54**	**18**	**4**	**2**	**15**	**218**
43	Kop. Sekunder	-	-	1	-	-	-	1		-	-	-	2
Jumlah		**41**	**17**	**15**	**19**	**18**	**16**	**55**	**18**	**4**	**2**	**15**	**220**

SASARAN 15
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN

Sasaran ke 15 (kelima belas) terkait meningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020. Dalam mewujudkan sasaran ke 15 (kelima belas) didukung oleh program akses dan mutu pelayanan masyarakat.

Tabel 3.17.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 15 (lima belas) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
15.	Meningkatkan derajat kesehatan	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	-	72,35%	72,65%	100,41%	72,37%
RATA-RATA % CAPAIAN					-			100,41%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Iku ke dua puluh tiga, angka harapan hidup (AHH) dengan target 72,35 persen terealisasi 72,65 persen atau dengan capaian 100,41 persen masuk kategori **SANGAT TINGGI**.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2020

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Persentase
1.	Rumah sakit	17	22,6
2.	Puskesmas	20	26,6
3.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	39	50,8
	Jumlah	76	33,33

Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Pada tahun 2020 fasilitas kesehatan terbanyak di Kota Jambi adalah puskesmas pembantu sebanyak 39 unit atau sebesar 50,8 persen dari total seluruh fasilitas kesehatan yang ada. Sementara itu fasilitas lainnya adalah rumah sakit sebesar 22,6 persen (17 unit) dan puskesmas sebesar 26,6 persen atau 20 unit.

Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Kota Jambi Tahun 2019 dan 2020

No	Angka Kematian	2019	2020
1.	Ibu	5	3
2.	Bayi	7	10

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Dari tabel diatas jumlah kematian ibu tahun 2019 sebanyak 5 orang sedangkan tahun 2020 sebanyak 3 orang, jumlah kematian bayi tahun 2019 sebanyak 7 sedangkan tahun 2020 sebanyak 10 bayi terjadi peningkatan hal ini disebabkan oleh banyak faktor, dimana penyebab kematian ibu adalah pre eklampsia, eklampsia dan perdarahan.

Faktor penyebabnya bisa dari perilaku ibu pada saat hamil dimana asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan saat hamil, tablet Fe sudah diberikan tetapi kecukupan tablet Fe tergantung dari kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe tersebut di rumah. Selain itu juga budaya dalam pengambilan keputusan juga mempengaruhi, dimana seharusnya ibu bersalin di rujuk ke rumah sakit tetapi karena menunggu keputusan dari keluarga/suami sehingga terlambat sampai kefasilitas kesehatan/rumah sakit.

Kematian bayi meningkat pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan penyebab kematian bayi karena asfiksia, hal ini terjadi karena anemia pada ibu yang membuat darah tidak dapat membawa oksigen, proses persalinan berlangsung lama, ibu hamil memiliki tekanan darah yang terlalu tinggi atau rendah, saat persalinan berlangsung ibu dan/atau bayi mengalami infeksi, plasenta lepas dari rahim terlalu cepat mengakibatkan hilangnya oksigen atau bayi terlilit tali pusar.

Penurunan jumlah Bumil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan Balita kurus antara tahun 2019 dengan tahun 2020, hal ini disebabkan telah dilaksanakan upaya pemenuhan gizi ibu dan bayi telah dilaksanakan upaya pemenuhan gizi ibu dan bayi telah dilaksanakan sesuai target yaitu 100 persen. Hal ini dilakukan dengan dilaksanakan kelas ibu hamil di masyarakat sehingga pengetahuan ibu hamil tentang giziBumil meningkat, dan deteksi dini Bumil KEK dilakukan pada saat ANC. Selain itu telah meningkatnya pengetahuan ibu tentang 1.000 HPK (Seribu Hari Pertama

Kehidupan) yakni dengan cara:

1. Pemberian PTM Bumil
2. Pemberian tablet tambah darah 90 tablet
3. Pemberian IMD
4. Pemberian ASI eksklusif 0 – 5 bulan 29 hari bulan
5. Pemberian MP ASI usia 6 – 24 bulan

SASARAN 16
MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSESBILITAS PENDIDIKAN

Sasaran ke 16 (keenam belas) terkait meningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020. Dalam mewujudkan sasaran ke 16 (keenam belas) didukung oleh program akses dan mutu pelayanan masyarakat.

Tabel 3.18.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 16 (enam belas) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
16.	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan	24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	100,14%	14,61%	15,10%	103,35%	14,64%
		25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	99,91%	17,32%	17,32%	100,00%	4,32%
		26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68%	100,00%	10,69%	10,92%	102,15%	10,72%
RATA-RATA % CAPAIAN					15,42%			101,83%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Untuk mewujudkan Sasaran 16 (keenam belas) menetapkan 3 (tiga) Iku yaitu Iku ke dua puluh empat, harapan lama sekolah (HLS) dengan target 14,61 persen terealisasi 15,10 persen dengan capaian 103,35 persen masuk kategori **SANGAT TINGGI**, dimana data pendukung dan pengukuran dilakukan oleh BPS Kota Jambi dikarenakan nilai itu digabungkan dengan siswa yang bersekolah di pesanteran di pesantren dan MTS dan MI yang datanya tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Iku ke dua puluh lima, persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan dengan target 17,32 persen terealisasi 17,32 persen dengan capaian 100 persen masuk kategori **SANGAT TINGGI**, dimana data pendukung dan pengukuran dilakukan oleh BPS Kota Jambi.

Selanjutnya, Iku kedua puluh enam rata-rata lama sekolah (RLS) dengan target 10,69 persen terealisasi 10,92 persen dengan capaian 102,15 persen, masuk kategori **SANGAT TINGGI** dimana data pendukung dan pengukuran dilakukan oleh BPS Kota Jambi.

Dapat dijelaskan untuk ketiga IKU di atas, dimana permasalahan pokok yang dihadapi oleh bidang pendidikan di Kota Jambi yaitu belum optimalnya daya saing pendidikan, dimana pendidikan merupakan prasayarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat global. Permasalahan pendidikan Kota Jambi adalah belum optimalnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan masih terbatasnya daya tampung siswa terutama ditingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri, masih banyaknya saran dan prasarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki, belum terpenuhinya kebutuhan guru, masih rendahnya kualitas guru dan siswa.

SASARAN 17
MENGENDALIKAN ANGKA KELAHIRAN PENDUDUK

Sasaran ke 17 (ketujuh belas) terkait mengendalikan angka kelahiran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020. Sasaran 17 (ketujuh belas) menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, berikut

Tabel 3.19.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 17 (tujuh belas) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
17.	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	27.	Laju pertumbuhan penduduk	N/A	-	1,05%	-	-	1,01%
		28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	99,80%	96,46%	95,99%	99,51%	97,15%
RATA-RATA % CAPAIAN					49,90%			49,76%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Iku kedua puluh tujuh laju pertumbuhan penduduk, dengan target 1,05% belum terealisasi masuk kategori **BELUM TERDATA** dikarenakan data bersumber dari BPS Kota Jambi yang belum dipublikasikan.

Untuk Laju Pertumbuhan Penduduk dapat kita sandingkan dengan data sebagai berikut.

Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2018

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	25 448	24 187	49 635
2	5-9	24 920	23 981	48 901

3	10-14	24 459	24 307	48 766
4	15-19	27 168	27 943	55 111
5	20-24	27 896	27 747	55 643
6	25-29	25 994	25 610	51 604
7	30-34	25 240	25 490	51 030
8	35-39	24 828	25 728	50 556
9	40-44	23 929	23 715	47 644
10	45-49	20 605	19 614	40 219
11	50-54	16 321	15 611	31 932
12	55-59	12 679	12 545	25 224
13	60-64	9 196	8 453	17 649
14	65-69	5 882	5 649	11 531
15	70-74	3 121	3 314	6 435
16	75+	2 580	3 643	6 233
Jumlah/Total		300 566	297 537	598 103

Grafik Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

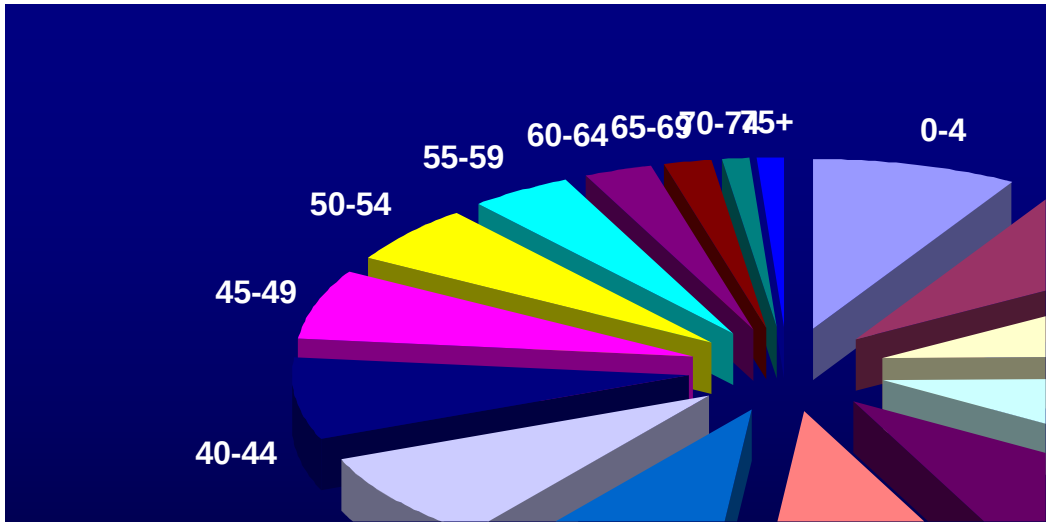

Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	25 239	24 472	49 711
2	5-9	24 968	24 262	49 230
3	10-14	24 297	24 589	48 886
4	15-19	27 295	28 262	55 557
5	20-24	27 865	28 059	55 924
6	25-29	25 855	25 905	51 760
7	30-34	25 782	25 787	51 569
8	35-39	24 967	26 030	50 997
9	40-44	24 331	23 991	48 322
10	45-49	21 276	19 834	41 110
11	50-54	16 867	15 782	32 649
12	55-59	13 114	12 678	25 792
13	60-64	9 680	8 537	18 217
14	65-69	6 326	5 705	12 031
15	70-74	3 280	3 348	6 628
16	75+	2 676	3 679	6 355
	Jumlah/Total	303 818	300 920	604 738

Grafik Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2019

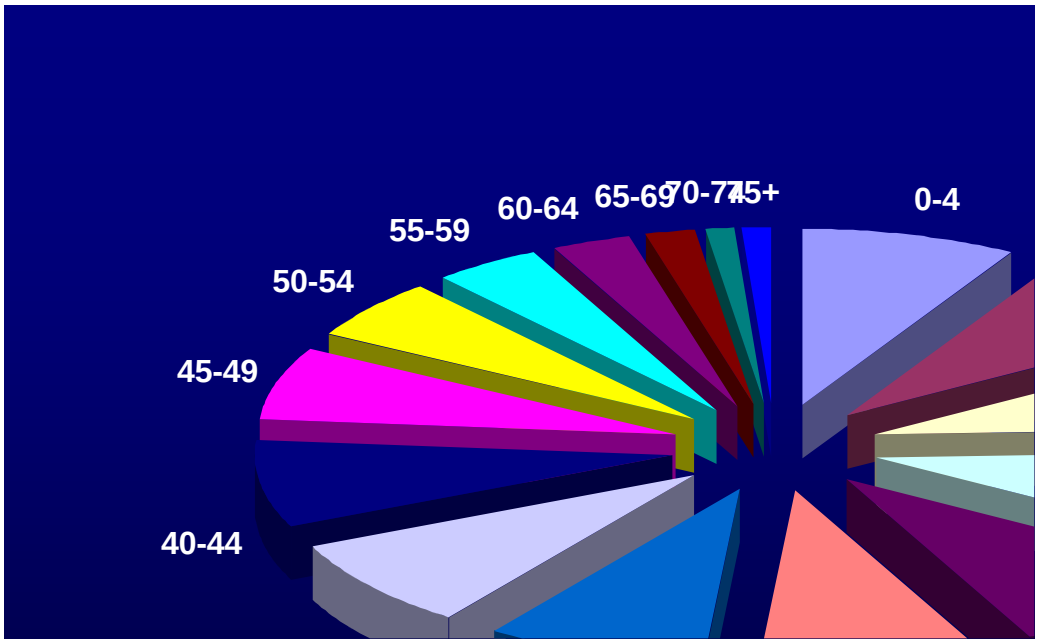

Jumlah Kelahiran Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Telanai Pura	423	470	893
2.	Jambi Selatan	533	530	1.063
3.	Jambi Timur	653	617	1.270
4.	Pasar Jambi	135	134	269
5.	Pelayangan	103	150	253
6.	Danau Teluk	117	112	229
7.	Kota Baru	615	686	1.301
8.	Jelutung	551	552	1.103
9.	Alam Barajo	882	840	1.722
10.	Danau Sipin	434	434	868
11.	Paal Merah	847	766	1.613
JUMLAH		5.293	5.291	10.584

Grafik Jumlah Kelahiran Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan
Tahun 2018

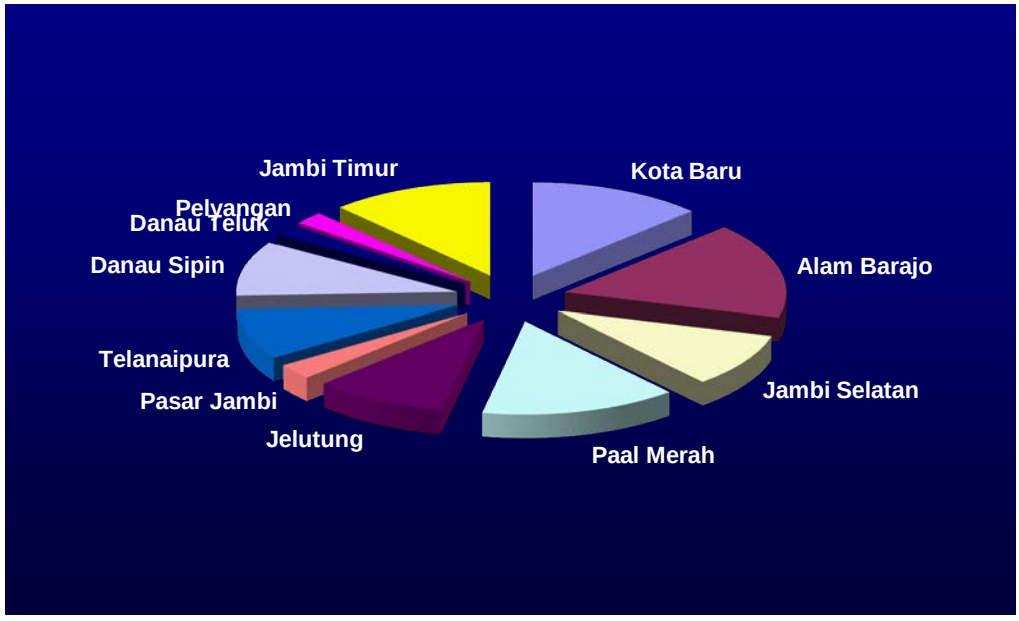

Banyaknya Pernikahan di Kota Jambi Per Kecamatan
Tahun 2018

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI
1.	Telanai Pura	679
2.	Jambi Selatan	1.050
3.	Jambi Timur	461
4.	Pasar Jambi	181
5.	Pelayangan	108
6.	Danau Teluk	102
7.	Kota Baru	1.208
8.	Jelutung	450
9.	Alam Barajo	1.208
10.	Danau Sipin	679
11.	Paal Merah	1.050

Grafik Banyaknya Pernikahan di Kota Jambi Per Kecamatan
Tahun 2018

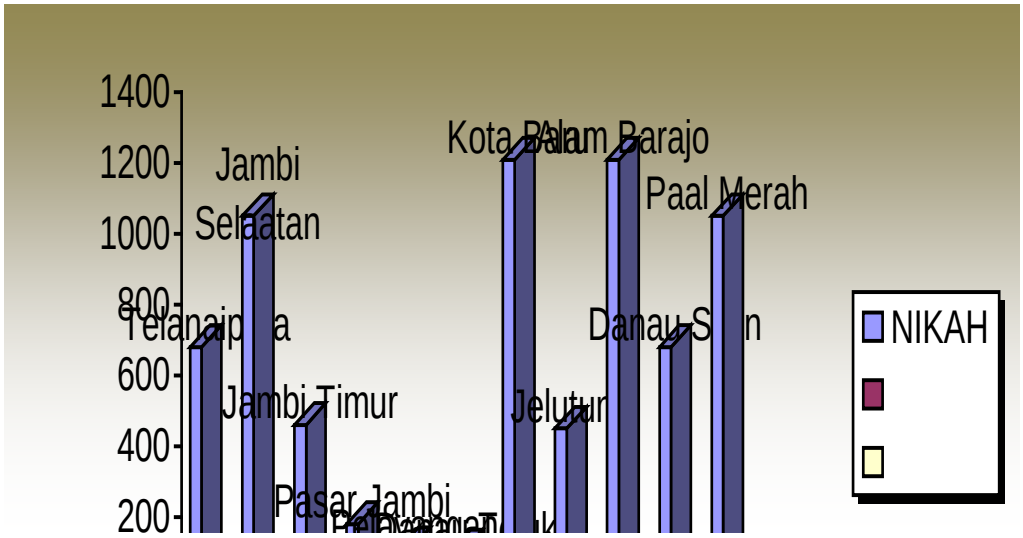

Banyaknya Pernikahan di Kota Jambi Per Kecamatan Berdasarkan Umum
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	< 19 Tahun	20 - 25 Tahun	25 - 30 Tahun	➢30 Tahun	JUMLAH
1	Telanai Pura	10	205	310	147	672
2	Jambi Selatan	12	275	312	418	1.017
3	Jambi Timur	5	105	200	110	420
4	Pasar Jambi	2	5	100	103	210
5	Pelayangan	1	11	69	29	110
6	Danau Teluk	1	41	25	28	95
7	Kota Baru	15	233	350	589	1.187
8	Jelutung	6	103	75	211	395
	JUMLAH	-				

Grafik Banyaknya Pernikahan di Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2019

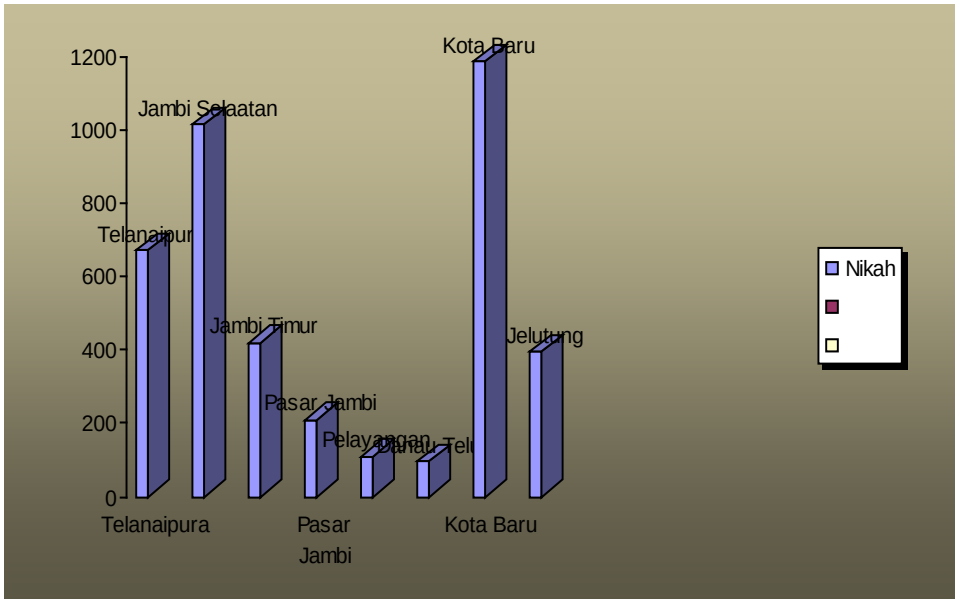

Lebih lanjut Iku kedua puluh delapan persentase jumlah keluarga sejahtera dengan target 96,46 persen terealisasi 95,99 persen dengan capaian 99,51 persen masuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Dengan cara pengukuran realisasi akumulasi keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II sebesar 129.308 keluarga dibandingkan target keluarga sejahtera 134.690 keluarga dengan capaian 99,80 persen. Data pendukung terdiri dari:

Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I dan II Per Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	KELUARGA SEJAHTERA I	KELUARGA SEJAHTERA II	%
1.	Telanaipura	10.727	5.739	4.371	94,25
2.	Jambi Selatan	13.652	6.047	7.370	98,28
3.	Jambi Timur	15.548	6.553	8.738	98,35
4.	Pasar Jambi	2.583	1.323	1.114	94,35
5.	Pelayangan	3.503	1.526	1.916	98,26
6.	Danau teluk	3.239	927	2.283	99,10
7.	Kota Baru	16.379	6.808	8.848	95,59

8.	Jelutung	14.294	6.766	7.011	96,38
9.	Alam Barajo	21.645	10.931	9.119	92,63
10.	Danau Sipin	10.396	4.781	5.160	95,62
11.	Paal Merah	22.724	10.164	11.813	96,71
JUMLAH		**134.690**	**61.565**	**67.743**	**96,04**

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera dari BKKBN, yaitu:

a. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I)

- Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja /sekolah dan Bepergian
- Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
- Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
- Bila Pasangn Usia Subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
- Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II)

- Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
- Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluaga makan daging/ikan/telur
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam Setahun
- Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah
- Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
- Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk

memperoleh Penghasilan

- Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin
- Pasangan Usia Subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi

c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III)

- keluarga berupaya meningkatkan pengetahuna agama
- Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang
- Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
- Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
- Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet

Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I dan II Per Kecamatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	PRA SEJAHTERA	%	KS I	%	KSS II	%	TOTAL KS	%
1	Telanai Pura	10.727	617	5,75	5.739	53,50	4.371	40,75	10.110	94,25
2	Jambi Selatan	13.652	235	1,72	6.047	44,29	7.370	53,98	13.417	98,28
3	Jambi Timur	15.548	257	1,65	6.553	42,15	8.738	56,20	15.291	98,35
4	Pasar Jambi	2.583	146	5,65	1.323	51,22	1.114	43,13	2.437	94,35
5	Pelayangan	3.503	61	1,74	1.526	43,56	1.916	54,70	3.442	98,26
6	Danau Teluk	3.239	30	0,93	927	28,62	2.283	70,48	3.210	99,10
7	Kota Baru	16.379	723	4,41	6.808	41,57	8.848	54,02	15.656	95,59
8	Jelutung	14.294	517	3,62	6.766	47,33	7.011	49,05	13.777	96,38
9	Alam Barajo	21.645	1.595	7,37	10.931	50,50	9.119	42,13	20.050	92,63
10	Danau Sipin	10.396	455	4,38	4.781	45,99	5.160	49,63	9.941	95,62
11	Paal Merah	22.724	747	3,29	10.164	44,73	11.813	51,98	21.977	96,71
JUMLAH		**134.690**	**5.383**	**4,00**	**61.565**	**45,71**	**67.743**	**50,30**	**129.308**	**96,00**

Grafik Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera I, II dan III Per Kecamatan Tahun 2019

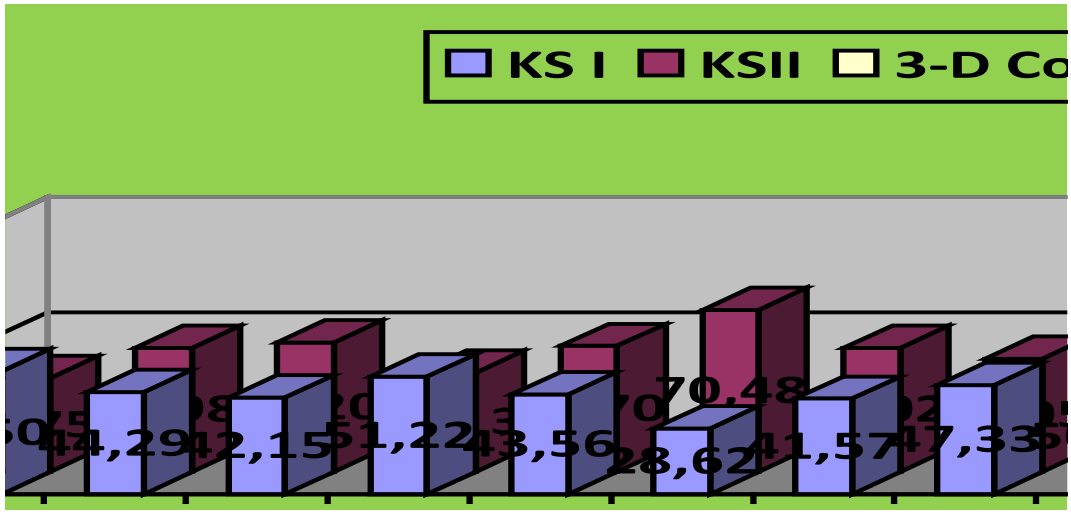

Data kelompok UPPKS Tahun 2018 di Kota Jambi

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SK	Nama Kelompok	ket
1	Telanaipura	Simpang IV Sipin	4		
		Pematang Sulur	2		
		Penyengat Rendah	1		
2	Jambi Selatan	Tambak Sari	1	-Melati Mandiri	
3	Jambi Timur	Sijenjang	1	-MANDIRI	ada
		Rajawali	1	-ANISA	
		Tanjung Pinang	1	-MANDIRI	ada
		Tanjung Sari	1	-PESONA	ada
		Kasang Jaya	1	- CENDRAWASIH	ada
4	Pasar Jambi	Beringin	1	-BERKAH	
5	Pelayangan	Arab Melayu	1	-Sinar Baru	ada
		Tahtul Yaman	1	-Lembayang	ada
		Tanjung Johor	1	-Sejahtera	
		Mudung Laut	1	-Melati RT 08	ada
6	KotaBaru	UPPKS Kasamba	1	-Kenali Asam Bawah	ada

7	Jelutung	Payo Lebar	2	-SERU	
				-MELATI	ada
		Talang Jauh	1	-Cemara I	ada
		Lebak Bandung	1	-Bina Benur Muda V	ada
		Kebun Handil	1	-Melati I	ada
		Jelutung	3	-CITRA MANDIRI	ada
				-VITA FOOD	ada
				-Maju Bersama	ada
		Cempaka Putih	1	-Kenanga	ada
8	Alam Barajo	Kenali Besar	2	-MAWAR PUTIH	
				-Bougenville I	
		Bagan Pete	1	-MAJU BERSAMA	
9	Danau Teluk	Ulu Gedong	1	-SEJAHTERA RT.09	ada
			1	-Nilam Sari	ada
10	Danau Sipin	Solok Sipin	1	-CENDANA	
		Sungai Putri	2	-RANTING 5	
				-Dara Petak	
		Legok	1	-SIPIN DANAU SEJAHTERA	ada
11	Paal Merah	Talang Bakung	1	-MELATI BAKUNG	
		Lingkar Selatan	1	-Keluarga Berkwalitas kampung kb	
			1	-Mentari	ada
Jumlah			**40**		

Data kelompok UPPKS Tahun 2019 di Kota Jambi

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH SK	NAMA KELOMPOK	KET
1	Telanaipura	Pematang Sulur	1	-UPPKS Pematang Sulur	ada
		Penyengat Rendah	1	- Cherry	ada
		Buluran Kenali	1	-Sejahtera	ada
2	Jambi Selatan	Tambak Sari	1	-Melati Mandiri	ada
		Pakuan Baru	1	-Mawar	ada
		Pasir Putih	1	-Mawar	ada
3	Jambi Timur	Sijenjang	1	-MANDIRI	ada
		Rajawali	1	-ANISA	ada
		Tanjung Pinang	1	-MANDIRI	ada
		Tanjung Sari	1	-PESONA	ada
		Kasang Jaya	1	-CENDRAWASIH	ada
4	Pasar Jambi	Beringin	1	-BERKAH	ada
		Orang Kayo Hitam	1	-Amanah	ada
5	Pelayangan	Tahtul Yaman	1	-Lembayung	ada
		Tanjung Johor	1	-Sejahtera	ada
		Mudung Laut	2	-Serasi	ada
				-Melati	ada
6	KotaBaru	Kenali Asam Bawah	1	-Beringin	ada
		Paal Lima	1	-Sedap Malam	ada
		Suka Karya	1	-Melati	ada
7	Jelutung	Payo Lebar	3	-SERU	ada
				-MELATI	ada
				-Hidayah	ada
		Lebak Bandung	1	-Bina Benur Muda	ada
		Jelutung	2	-CITRA MANDIRI	ada
				-VITA FOOD	ada

		Talang Jauh	1	-Cemara I	ada
		Cempaka Putih	2	-Kenanga I	ada
				-Kenanga II	ada
8	Alam Barajo	Kenali Besar	2	-MAWAR PUTIH	ada
				-Bougenville I	ada
		Bagan Pete	1	-MAJU BERSAMA	ada
		Rawasari	1	-Barokah	ada
		Mayang Mangurai	1	-Mengurai	ada
9	Danau Teluk	Ulu Gedong	1	-Putri Kembar	ada
		Olak kemang	1	-Nilam Sari	ada
10	Danau Sipin	Solok Sipin	1	-CENDANA	ada
		Sungai Putri	2	-RANTING 5	ada
				-Dara Petak	ada
		Legok	1	-SIPIN DANAU SEJAHTERA	ada
11	Paal Merah	Talang Bakung	1	-MELATI BAKUNG	ada
		Lingkar Selatan	1	-Keluarga Berkwalitas	ada
J U M L A H			**43**		

CAKUPAN JUMLAH ANGGOTA POKTAN YANG BER-KB TAHUN 2020

No	Uraian	Jumlah Anggota		%
		Kelompok	Ber-KB	
1	2	3	4	5
1.	Cakupan anggota BKB ber KB	7.239	4.392	60,67
2.	Cakupan anggota BKR ber KB	3.353	2.301	68,63
3.	Cakupan anggota BKL ber KB	3.297	1.729	52,44
4.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	11	56	509,90

5.	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber-KB mandiri	1.297	632	48,72
6.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di setiap Kecamatan	11	11	100,00

SASARAN 18
MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER

Sasaran ke 18 (kedelapan belas) terkait meningkatkan kesetaraan gender dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020. Sasaran 18 (kedelapan belas) menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, berikut

Tabel 3.20.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 18 (delapan belas) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
18.	Meningkatkan kesetaraan gender	29.	Indeks pembangunan gender	94,89	99,53%	94,91	94,60	99,73%	94,95
		30.	Indeks pemberdayaan gender	68,07	102,54%	68,20	69,83	102,93%	68,50
RATA-RATA % CAPAIAN					81,48%			101,33%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Iku kedua puluh sembilan indeks pembangunan gender, dengan target 94,91 terealisasi dengan angka 94,60 atau tercapai 99,73 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dengan penghitungan dan data pendukung indeks pembangunan gender bersumber dari UNDP dengan

indikator angka harapan hidup terealisasi sebesar 70,60 persen laki-laki dan 74,40 persen Perempuan, angka harapan lama sekolah (tahun) terealisasi sebesar 14,95 persen Laki-laki dan 14,89 persen Perempuan dan angka rata-rata lama sekolah(tahun) terealisasi sebesar 11,21 persen laki-laki dan 10,58 persen perempuan, pengeluaran perkapita 16.074 laki-laki dan 11.480 perempuan dan nilai IPM 81,71 persen laki-laki dan 76,92 persen perempuan dengan hasil nilai indeks pembangunan gender sebesar 94,6 persen

Pembangunan manusia meliputi konsep yang luas, mencakup pemberdayaan, kerjasama, kesetaraan, keberlanjutan, dan keamanan (Amartya Sen, 1989). Untuk menyederhanakan konsep yang sangat luas ini, UNDP menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, agar ukuran ini juga dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan berbasis gender, maka UNDP mengembangkan Gender Development Index atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah umur harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta pengeluaran konsumsi (mewakili dimensi ekonomi).

Tabel IPG Provinsi Jambi Tahun 2019

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)										
	AHH laki-laki	AHH Perempuan	EYS Laki-laki	EYS Perempuan	MYS Laki-laki	MYS Perempuan	Pengeluaran per kapita laki-laki	Pengelauaran perkapita perempuan	IPM Laki-laki	IPM perempuan	IPG
Provinsi Jambi	69,10	73,00	12,90	13,20	8,90	8,00	15776,00	7523,00	75,80	67,10	88,40
Kerinci	67,80	71,70	14,00	13,80	9,00	7,70	15670,00	7194,00	76,40	66,30	86,70
Merangin	69,20	73,10	12,00	12,20	8,30	7,20	14490,00	7089,00	73,30	64,50	88,00
Sarolangun	67,00	71,00	12,30	12,20	8,40	7,30	16810,00	9831,00	74,20	67,20	90,70
Batanghari	68,40	72,30	12,90	13,30	8,30	7,70	16005,00	5901,00	74,90	63,80	85,20
Muaro Jambi	69,20	73,10	12,70	13,30	8,60	8,10	13814,00	4034,00	74,10	59,50	80,30
Tanjung Jabung Timur	64,10	68,00	11,50	12,70	6,80	6,00	14872,00	6387,00	68,60	60,20	87,80
Tanjung Jabung Barat	66,00	70,00	12,30	12,90	8,10	7,20	14092,00	5722,00	71,70	61,40	85,70
Tebo	67,90	71,80	12,40	12,60	8,20	7,20	15362,00	8529,00	73,60	66,40	90,20
Bungo	65,60	69,50	12,60	12,70	8,70	7,20	17915,00	8658,00	74,70	66,20	88,60
Kota Jambi	70,60	74,40	14,90	14,90	11,20	10,60	16074,00	11480,00	81,70	76,90	94,10
Kota Sungai Penuh	70,00	73,90	15,10	14,80	10,90	10,00	12953,00	10204,00	79,00	74,60	94,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2020

Keterangan :

AHH : Angka Harapan Hidup

EYS : Harapan Lama Sekolah

MYS : Rata-rata Lama Sekolah

Dari data diatas terlihat IPG Kota Jambi tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jambi dan melebihi rata-rata IPG Provinsi Jambi dan angka ini sudah sesuai dengan target Renstra DPMPPA Kota Jambi yaitu target IPG sebesar 94,46. Hal ini sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

1. Angka Harapan Hidup

   Pada aspek kesehatan, nilai angka harapan hidup perempuan (74,40) di Kota Jambi lebih tinggi dibandingkan laki-laki (70,60). Hal sangat terkait dengan female advantages (FA) atau keunggulan perempuan , terutama faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan dari setiap

gender. Secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok, dan pekerjaan berat. Namun demikian, secara praktik di beberapa wilayah, female advantages lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Meskipun usia harapan hidup perempuan Kota Jambi lebih besar dari laki-laki, namun dari aspek kesehatan yang lain seperti morbiditas dan keluhan kesehatan, perempuan masih di atas laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang, tetapi perempuan lebih rentan dalam mengalami sakit. Hal ini terkait dengan karakter fisik perempuan yang secara umum lebih lemah dibandingkan laki-laki.

2. Harapan Lama Sekolah

   Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun negara. Tingkat pendidikan yang baik akan mengarahkan suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan.

   Di Kota Jambi Harapan Lama Sekolah Perempuan 14,90 dan laki-laki 14,90. Harapan Lama Sekolah perempuan di Kota Jambi merupakan angka tertinggi disbandingkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dan diatas rata-rata Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi.

3. Rata-rata Lama Sekolah

   Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah rata-rata

lama sekolah, berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Kota Jambi 10,60 sedangkan laki-laki 11,20. Angka tersebut merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dan diatas angka rata-rata Provinsi Jambi. Namun rata-rata lama sekolah Perempuan di Kota Jambi masih rendah dibandingkan laki-laki. Dari data diatas menggambarkan bahwa perlunya upaya Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah perempuan di Kota Jambi

4. Pengeluaran Per Kapita

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Dalam konteks kesetaraan gender, indikator yang dapat menunjukan ada tidaknya perbedaan adalah data upah dan pendapatan perkapita. Namun karena masalah ketersediaan data upah dan pendapatan perkapita, maka indikator ini kemudian digantikan dengan data pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebagai proksi.

Pengeluaran Per Kapita Perempuan di Kota Jambi 11.480 sedangkan laki-laki 16.074. Angka pengeluaran per kapita perempuan tersebut merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dan diatas angka rata-rata Provinsi Jambi. Namun pengeluaran per kapita Perempuan di Kota Jambi masih rendah dibandingakan laki-laki. Dapat di simpulkan sector perekonomian di Kota Jambi masih di dominasi oleh laki-laki.

Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relative tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.

Iku ketiga puluh indeks pemberdayaan gender dengan target 68,20 terealisasi 69,83 dengan capaian 102,39% masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dimana penghitungan dan data pendukung indeks pembangunan gender bersumber dari UNDP dengan data pendukung keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 20,45 persen, perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 51,35 persen dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 29,43 persen.

Perbedaan capaian dalam ekonomi menjadi penyebab utama ketimpangan gender di Indonesia. Salah satu sebab dari hal adalah kurangnya peran perempuan dalam pasar tenaga kerja. Bukan tanpa sebab, budaya patriarki yang masih melekat hingga saat ini memberikan sekat bagi perempuan untuk lebih bertanggung jawab di bidang domestik atau pekerjaan rumah tangga. Sementara peran publik diberikan kepada laki-laki. Pembebanan peran domestik mengakibatkan secara umum perempuan menjadi kurang produktif secara finansial.

Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong kesetaraan gender dari sisi ketenagakerjaan menampakkan hasil yang cukup menggembirakan. Berbagai indikator ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perempuan semakin berkontribusi dalam pasar tenaga kerja. Meski capaian beberapa indikator tersebut belum dapat menyamai laki-laki,

namun dalam perkambangannya indikator tenaga kerja perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi kesetaraan gender di Indonesia pada umumnya dan di Kota Jambi pada khususnya.

Tabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Jambi Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan
1	Kota Jambi	94,14	68,48	17,78	51,35	29,43
2	Kerinci	86,68	59,96	3,33	48,46	43,04
3	Merangin	88,01	54,25	0,01	56,07	41,18
4	Sarolangun	90,67	60,07	8,57	52,42	30,48
5	Batang Hari	85,17	75,56	22,86	47,27	34,47
6	Muaro Jambi	80,29	63,18	8,57	48,09	35,2
7	Tanjung Jabung Timur	87,76	68,81	26,67	46,59	22,88
8	Tanjung Jabung Barat	85,68	68,31	20.00	55,58	27,04
9	Tebo	90,23	51,98	2,86	50,56	28,8
10	Bungo	88,63	59,18	14,29	52,27	23,02
11	Kota Sunga Penuh	94,44	52,87	00.01	51,17	34,71

Dari data diatas terlihat IDG Kota Jambi dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jambi dan melebihi rata-rata IPG Provinsi Jambi dan angka ini melebihi target Renstra DPMPPA Kota Jambi yaitu target IDG sebesar 68,10. Hal ini sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

   Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dan kontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, salah satunya parlemen. Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu indikator SDGs

yang tercantum pada Target 5.5 “Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, dan Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan untuk Memimpin di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan dalam Kehidupan Politik, Ekonomi, dan Masyarakat”, “Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah. Selama ini, parlemen di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dilakukan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Meski belum mampu memenuhi

target yang diharapkan, tapi dengan tren keterwakilan perempuan di parlemen yang cenderung meningkat telah menimbulkan optimisme bahwa peran perempuan di bidang politik semakin nyata terlihat dan berpotensi untuk terus ditingkatkan.

Di Kota Jambi tingkat keterwakilan perempuan di parlemen masih dibawah 30% yaitu sebanyak 20%. Masih dibutuhkannya strategi dari Pemerintah maupun Partai Politik untuk berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Jambi. Pada tahun 2019 Dinas pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Pelatihan bagi Calon Legislatif Perempuan di Kota Jambi dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman caleg perempuan agar tidak hanya menjadi penonton dalam pemilihan legislative namun bias berbicara banyak dan mewakili suara perempuan di Kota Jambi.

2. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Perbaikan berbagai indikator ketenagakerjaan seperti meningkatnya partisipasi kerja perempuan dan penurunan pengangguran selama satu dekade terakhir, juga diikuti dengan peningkatan persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional. Persentase tenaga professional perempuan cenderung meningkat. Selain persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga professional, indikator pemberdyan gender lain yang juga meningkat adalah komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Persentase jumlah ASN perempuan cederung meningkat dari waktu ke waktu, pada tahun 2018 jumlah ASN Perempuan Pemerintah Kota Jambi sebesar 68,21 persen. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu jumlah ASN Perempuan Pemerintah Kota Jambi sebesar 68,78 persen dan tahun 2020 sebesar 68,96 persen. Meski demikian, peran perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan relatif masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari persentase pejabat struktural laki-laki dan perempuan yang masih timpang. Selain masalah rendahnya jumlah pejabat struktural ASN perempuan, terdapat beberapa tantangan lain yang harus dihadapi dan membutuhkan penanganan dari berbagai pemangku kepentingan terkait, diantaranya adalah keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dan ketimpangan upah yang masih saja terjadi. Selanjutnya, masalah yang umum terjadi pada pekerja perempuan yang telah menikah adalah kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan ketika memiliki anak, kemudian masuk kembali ke pekerjaan tersebut ketika sudah siap.

ASN Pemerintah Kota Jambi Yang Menduduki Eselon II dan Camat Tahun 2020

No	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Eselon II	24	3	27
2.	Camat	8	3	11

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai ASN, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat eselon II didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

   Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. Pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk mengurangi kesenjangan sumbangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan diantaranya memberi pelatihan maupun keterampilan seperti membatik, menjahit, wirausaha dan lainnya sehingga perempuan dapat ambil bagian dalam menunjang peningkatan pendapatan keluarga dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih baik.

SASARAN 19

MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK ANAK

Sasaran ke 19 (kesembilan belas) terkait meningkatkan pemenuhan hak anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020.

Tabel 3.21.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 19 (sembilan belas) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
19.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,00%			100,00%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020 (Data diolah)

Iku ketiga puluh persentase hak anak yang terpenuhi, dengan target 80,00 persen terealisasi 70,00 persen atau tercapai 100,00 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dimana target 80,00 persen berdasarkan standarisasi Kota Layak Anak adalah kategori Madya. Standar Kota Layak Anak (KLA merupakan pemenuhan hak anak dengan kategori:

1. Pratama Range : konstanta 500 – 600 poin
2. Madya : konstanta 700 – 800 poin
3. Nindya : konstanta 800 – 900 poin
4. Utama : konstanta 1.000 poin

Tahun 2019 Kota Jambi mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori Madya, konstanta 700 – 800 poin. Cara pengukurannya adalah jumlah 5 variabel Kota Layak Anak sebesar konstanta 700 dibandingkan dengan konstanta 1.000 di kali 100 dengan capaian 70,00%.

No	Variabel Pemenuhan Hak Anak
1.	Hak sipil dan kebebasan
2.	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3.	Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4.	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5.	Perlindungan khusus

No	Skor	Standar Penilaian KLA	Target		Capaian	
			2019	2020	2019	2020
1.	500 – 600 poin	Pratama	70%	80%	Madya	Nindya
2.	600 – 700 poin	Madya				
3.	700 – 800 poin	Nindiya				
4.	800 – 900 poin	Utama				
5.	900 – 1000 poin	KLA				

Persentase pemenuhan hak anak pada tahun 2020 berdasarkan evaluasi kota layak anak yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhadap upaya pemenuhan hak anak di Kota Jambi dengan hasil capaian Kota Jambi mendapatkan penghargaan kategori Madya dengan range nilai 700 – 800 poin dari 1000 poin yang harus dipenuhi, dengan formulasi nilai 800/1000 x 100% = 80%, artinya berdasarkan nilai tersebut indikator kinerja utama pemenuhan hak anak untuk tahun 2020 sudah terpenuhi.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya analisisi atas efisiensi penggunaan daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- Adanya sumber dana baik dari APBD maupun sumber lain seperti CSR dunia usaha
- Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai kota layak anak
- Tanggung jawab dari gugus tugas kota layak anak dalam pemenuhan hak anak
- Dukungan dari dunia usaha dalam bentuk dana dan program kegiatan
- Dukungan dari media dalam pengembangan kota layak anak
- Dukungan dari masyarakat dalam perwujudan kota layak anak
- Dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam perwujudan KLA
- Dukungan dari lembaga swadaya masyarakat
- Program inovasi pemerintah daerah dalam upaya percepatan pencapaian kota layak anak.

SASARAN 20
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Sasaran ke 20 (kedua puluh) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dan kecamatan dalam Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020.

Tabel 3.22.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 20 (dua puluh) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2019			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	117,81%	61,43%	59,15%	96,29%	52,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					117,81%			96,29%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Iku ketiga puluh dua persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan target 61,43 persen terealisasi 59,15 persen dengan capaian 96,29 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Formulasi pengukuran Lembaga pemberdayaan masyarakat/kapasitas pemberdayaan masyarakat sebanyak 38 variabel data aktif dibagi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat/kapasitas pemberdayaan masyarakat yang ada sebanyak 62 variabel.

Kategori/kriteria LPM aktif antara lain:

1. Adanya surat keputusan LPM terbaru
2. 50 - 60% anggota /pengurus aktif dalam pertemuan
3. Ada rencana kerja yang partisipatif
4. Mengikutsertakan diri (ketua dan pengurus) dalam musrenbang kecamatan dan kelurahan dibuktikan dengan daftar hadir
5. Ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
6. Menggerakkan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan
7. Adanya kerjasama antar lembaga di masyarakat
8. Perbaharuan SK dilakukan setiap 5 tahun sekali

Sebagai meta data adanya data LPM di 11 kecamatan/62 kelurahan

NO	Kecamatan	Jumlah LPM	Aktif	Kurang Aktif
1.	Jambi Timur	9 Orang	9 Orang	-
2.	Jelutung	7 Orang	7 Orang	-
3.	Pasar Jambi	4 Orang	4 Orang	-
4.	Pelayangan	6 Orang	6 Orang	-
5.	Jambi Selatan	5 Orang	5 Orang	-
6.	Telanaipura	6 Orang	6 Orang	-
7.	Kota Baru	5 Orang	5 Orang	-
8.	Danau Teluk	5 Orang	5 Orang	-
9.	Paal Merah	5 Orang	5 Orang	-
10.	Danau Sipin	5 Orang	5 Orang	-
11.	Alam Barajo	5 Orang	5 Orang	-
		62 Orang	**62 Orang**	

Analisa program/kegiatan yang dilakukan oleh LPM antara lain:

Input	Proses	Output
1. Adanya surat keputusan LPM terbaru	- Mengikuti musrenbang kelurahan/ kecamatan	- Adanya bukti daftar hadir musrenbang
2. 50 - 60% anggota/pengurus aktif dalam pertemuan	- Penyusunan laporan kegiatan	- Adanya berita acara hasil komitmen - Adanya dokumen kerjasama
3. Ada dokumen rencana kegiatan	- Melaksanakan kerjasama - Menggerakkan swadaya gotong royong - Memantau kegiatan pembangunan	- Lingkungan bersih aman dan nyaman -
4. Dokumen kerjasama antar lembaga kemasyarakatan (draft)		

Dukungan dan hambatan

Dukungan antara lain adanya sumber dana dari APBD maupun swadaya masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dan pembangunan sedangkan hambatan bagi LPM tidak diikutsertakan dalam pengawasan pembangunan di kelurahan.

SASARAN 21
MENINGKATKAN PRESTASI DAN KREATIVITAS KEPEMUDAAN

Sasaran ke 21 (kedua puluh satu) meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020.

Tabel 3.23.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 21 (dua puluh satu) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
21.	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	33.	Indeks pembangunan pemuda	50,00%	-	50,00	-	-	52,00
RATA-RATA % CAPAIAN					-			-	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Iku ketiga puluh tiga indeks pembangunan pemuda, dengan target 50,00 belum terealisasi masuk kategori **BELUM TERDATA** dikarenakan data bersumber dari BAPPENAS yang belum dipublikasikan.

Adapun indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi terdiri dari:

1. Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi dengan target 50 persen terealisasi 55 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dengan formulasi penghitungan jumlah pemuda kader organisasi berjumlah 275 orang dibagi jumlah pemuda yang berorganisasi di tingkat Kota Jambi berjumlah 500 orang dikali 100 persen dengan capaian 110 persen.
2. Persentase pembinaan dan pengawasan cabang olahraga prestasi dengan target 73,33 persen teralisasi 73,33 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan formula penghitungan jumlah cabang olahraga yang dibina sebanyak 33 cabang olah raga dibagi jumlah cabang olahraga kota sebanyak 33 cabang olah raga dikali 100 persen dengan capaian 100 persen.

SASARAN 22
MENURUNKAN ANGKA PMKS

Sasaran ke 22 (kedua puluh dua) menurunkan angka PMKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam tahun anggaran 2020.

Tabel 3.24.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 22 (dua puluh dua) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
22.	Menurunkan angka PMKS	34.	Persentase PMKS yang tertangani	60,00%	38,86%	70,00%	67,26%	96,09%	85,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					38,86%			96,09%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

Iku ketiga puluh empat persentase PMKS yang tertangani, dengan target 70,00 persen terealisasi 67,26 persen atau dengan capaian 96,09 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Dengan formulasi pengukuran jumlah warga terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 2.016 orang dibagi jumlah warga terlantar di luar panti sebanyak 3.000 orang dikali 100 persen dengan realisasi sebesar 67,26 persen atau dengan capaian 96,09 persen, dengan rincian data sebagai berikut:

REKAPITULASI DATA WARGA TERLANTAR YANG KEBUTUHAN DASARNYA TERPENUHINYA DILUAR PANTI DI KOTA JAMBI 2020

No	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Disabilitas terlantar	94
2.	Anak terlantar	289
3.	Lansia terlantar	187
4.	Gelandangan pengemis	331
5	Bimbingan sosial lansia	100
6.	Senam lansia	1.000
7.	Bimbingan sosial anak	15
TOTAL		**2.016**

Sumber: Data Primer diolah, 2020

REKAPITULASI WARGA TERLANTAR DI LUAR PANTI DI KOTA JAMBI TAHUN 2020

No	Kecamatan	Data PMKS Terlantar				Total
		Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lansia Terlantar	Gepeng	
1.	Pasar Jambi	42	-	40	331 Orang se-Kota Jambi	
2.	Telanaipura	127	15	80		
3.	Danau Sipin	117	-	140		
4.	Jelutung	173	66	53		

5.	Jambi Selatan	220	-	119	tidak menetap	
6.	Jambi Timur	251	149	111		
7.	Paal Merah	53	68	27		
8.	Kota Baru	144	208	57		
9.	Alam Barajo	108	25	70		
10.	Pelayangan	45	-	67		
11.	Danau Teluk	71	-	23		
JUMLAH		1.351	531	787	331	3.000

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Faktor-faktor pendukung untuk mencapai indikator sasaran tersebut adalah dengan didukung oleh 1 (satu) program yaitu program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS, dengan kegiatan yang terdiri dari:

1. Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat
2. Kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
3. Kegiatan pemberdayaan dan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PMKS)
4. Kegiatan pembinaan dan pelayanan bagi orang terlantar
5. Kegiatan pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia
6. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial
7. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi siabilitas, korban NAPZA
8. Kegiatan pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, kejuangan dankesetaikawanan sosial
9. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial
10. Kegiatan pendataan dan informasi fakir miskin
11. Kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin

12. Kegiatan pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin

Adapun yang menjadi kendalanya yaitu :

1. Penanganan PMKS dimasa Pandemi Covid-19
2. Belum maksimalnya laporan data PMKS yang telah ditangani
3. Belum adanya Rumah Singgah

Solusinya :

1. Peningkatan anggaran penanganan PMKS
2. Pengadaan Rumah Singgah

3.3. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode Tahun 2018 – 2023. Dengan tetap memperhatikan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kota Jambi dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi tahun 2005-2025, ditetapkan prioritas pembangunan sebagai panduan gerak langkah kemana pembangunan akan diarahkan.

Keempat prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi tahun 2018 - 2023 ditujukan untuk memperkuat identitas pembangunan Kota Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Jambi periode 2005 – 2025 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan gerakan dan kekuatan yang sinergis dengan daerah sekitarnya dan pemerintahan diatasnya.

Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kota Jambi periode 2018 -2023 disamping berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Jambi, juga

memperhatikan RPJMD kabupaten/kota tetangga, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJM Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan seperti terlihat pada Gambar 3.1. berikut ini.

Gambar 3.2.
Skema Keterkaitan RPJMD Kota Jambi 2018 – 2023
dan RPJPD Kota Jambi 2005 – 2025

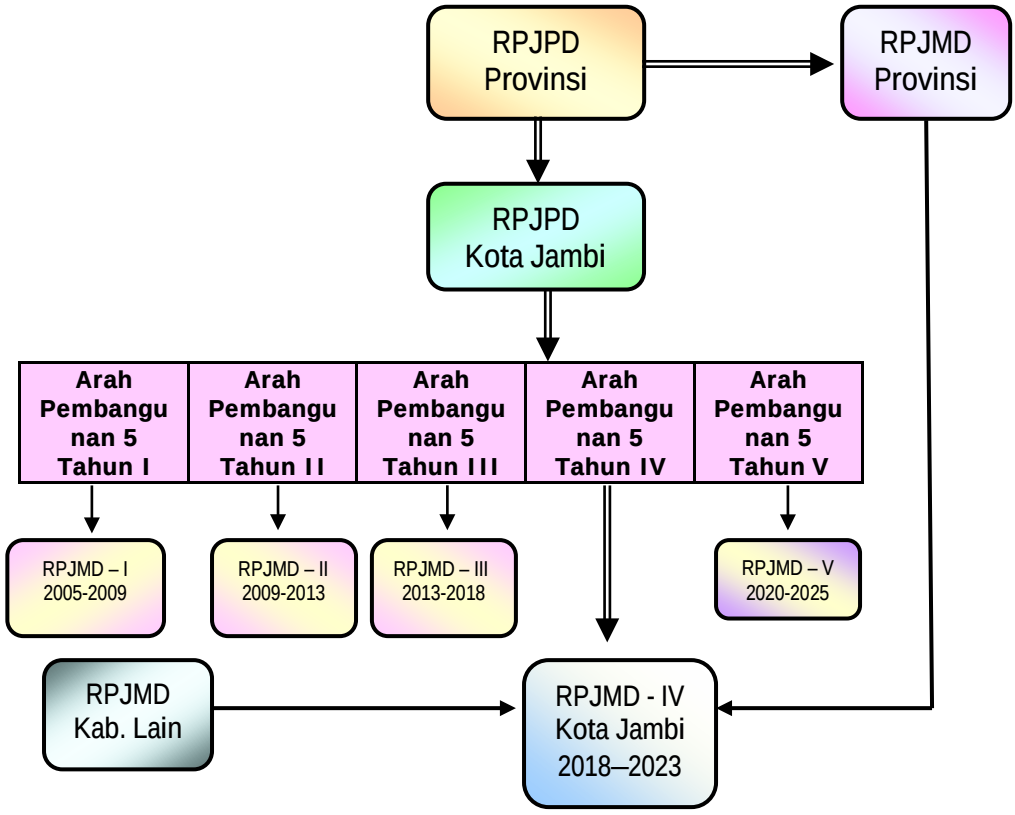

Sumber : RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 -2023

Sebagai gambaran umum untuk dapat melihat sinkronisasi dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Prioritas Pembangunan yang akan dicapai disetiap tahun, khususnya pada tahun 2019 yang merupakan tahun

Pertama periode pemerintahan tahun 2018 -2023 dengan periode tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.3.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Periode Tahun 2013 – 2018
dengan Periode Tahun 2018 -2023

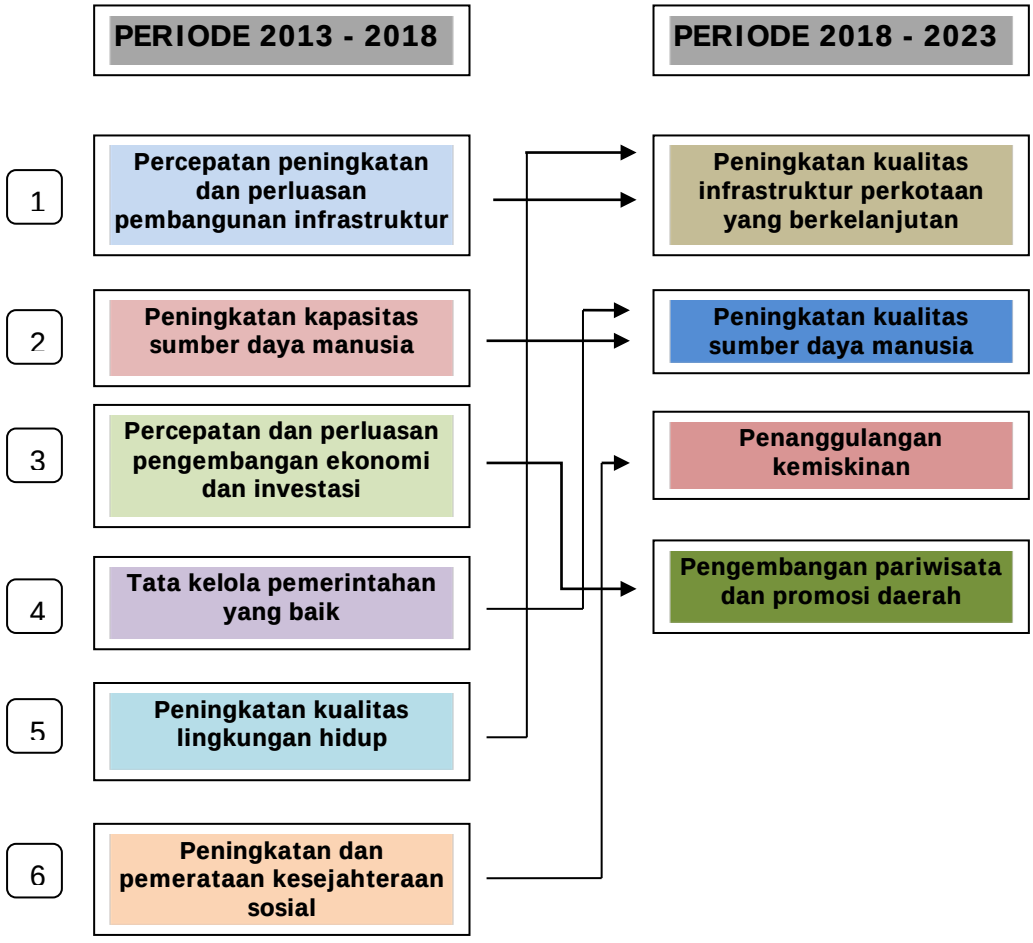

Selanjutnya sebagai panduan dalam pencapaian prioritas pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga dalam RPJMD telah ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus di jabarkan dan dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah. Sebagai perbandingan jumlah tujuan, sasaran dan IKU selama periode tahun 2008 -2013 dengan

periode tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25.
Perbandingan Jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Periode Tahun 2018 -2023

NO	URAIAN	PERIODE	
		2013-2018	2018-2023
1.	MISI	5	5
2.	TUJUAN	11	6
3.	SASARAN	22	22
4.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	38	34

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tujuan pada periode sebelumnya adalah sebanyak 11 buah dan pada periode 2018 – 2023 menjadi 6 tujuan. Namun untuk jumlah sasaran tetap yaitu 22 sasaran dan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) terjadi penurunan, yaitu untuk sasaran di periode sebelumnya adalah sebanyak 38 indikator, periode saat ini adalah sebanyak 34 indikator.

Tabel 3.26.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 1 (KESATU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,44	2,85	116,80	2,55	-	-	2,44
		Indeks profesionalitas ASN	55	56	56,2	100,35	57,50	66,70	116,00	88,00
		Nilai SAKIP	B	B	B	100,00	BB	-	-	A
		Indeks survey persepsi korupsi	N/A	3,65	3,35	91,78	3,69	-	-	3,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28	85,50	83,66	97,84	86,00	85,51	99,43	88,5

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat dari target, realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Utama pertama yaitu indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dapat dilihat pada tahun 2019 IKU indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dimana angka awal RPJMD terealisasi sebesar 2,33 naik menjadi 2,44 di tahun 2019 dan terealisasi 2,85 atau dengan capaian 116,80 persen, sedangkan pada tahun 2020 belum dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga belum ada baik realisasi maupun capaian di tahun 2020.

IKU kedua yaitu indeks profesionalitas ASN dapat dilihat pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 57,50 terealisasi 66,70 atau dengan capaian sebesar 116,00 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 ditargetkan sebesar 56 terealisasi 56,2 atau dengan capaian 100,35 persen dikarenakan dalam tahun 2020 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melebihi target yang diperjanjikan, yaitu:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,80 persen
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104,57 persen
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 108,44 persen
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 116,33 persen

IKU ketiga yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2019 terealisasi nilai “B” dengan nilai 65,02 atau dengan capaian 100 persen sedangkan untuk tahun 2020 nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum dapat terealisasi dikarenakan belum dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga yang seyogyanya pengumuman penilaian dilakukan dengan adanya ceremony dengan jadwal di bulan Januari ataupun Februari, sampai saat ini belum ada pemberitahuan.

IKU keempat yaitu indeks survey persepsi korupsi dapat dilihat untuk

tahun 2019 dengan target 3,65 indeks tersebut telah di publikasikan oleh Kementerian PAN dan RB RI dengan realisasi sebesar 3,35 atau dengan capaian 91,78 persen sedangkan pada tahun 2020 sama dengan IKU ketiga yang mana penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan belum ada pemberitahuan dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga untuk tahun 2020 indeks persepsi korupsi belum terealisasi.

Lebih lanjut IKU kelima adalah indeks kepuasan masyarakat, pada tahun 2020 ditargetkan 86,00 terealisasi sebesar 85,51 atau dengan capaian 99,43 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 2019 dengan capaian sebesar 97,84 persen dikarenakan disamping Pandemi Covid-19, juga Lokasi penilaian berbeda Unit kerja yang disurvei pada tahun 2019 belum sama sekali disurvei sehingga belum ada rencana tindaklanjut perbaikan pelayanan pada tahun 2020

Tabel 3.27.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 2 (KEDUA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
2.	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82,00	82,00	82,00	100,00	80,00	750,00	93,75	60,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU keenam yaitu penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL dapat dilihat pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 82,00 terealisasi 82,00 atau dengan capaian 100,00 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang mana penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL mengalami penurunan sesuai dengan target tahun 2020 yaitu sebesar 80,00 persen terealisasi sebesar 75,00 persen atau dengan capaian 93,75 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan baik PERDA maupun PERWAL semakin tinggi.

Tabel 3.28.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 3 (KETIGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,63	93,63	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU ketujuh yaitu cakupan pelayanan pemadam kebakaran dapat dilihat pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100,00 terealisasi 100,00 atau dengan capaian 100,00 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan target sebesar 100,00 persen terealisasi sebesar 93,63 persen atau dengan capaian 93,63 persen. Hal ini dikarenakan pandemic COVID-19 yang membatasi berjalannya kegiatan, sehingga dibeberapa kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran dan tujuan tidak berjalan maksimal.

Tabel 3.29.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 4 (KEEMPAT)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU ke delapan yaitu persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 20,00 terealisasi 20,00 atau dengan capaian 100,00 persen mengalami peningkatan yang sama pada tahun 2020 dengan target sebesar 20,00 persen terealisasi sebesar 20,00 persen atau dengan capaian 100,00 persen.

Tabel 3.30.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 5 (KELIMA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase Orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	48,71	243,00	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kesembilan adalah persentase Orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat dapat dilihat pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 20,00 terealisasi 20,00 atau dengan capaian 100,00 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan target sebesar 20,00 persen terealisasi sebesar 48,71 persen atau dengan capaian sebesar 243,00 persen. Hal ini dikarenakan jumlah ORKESMAS yang berperan aktif di masyarakat mengalami peningkatan dengan jumlah ORKESMAS yang dibina sebanyak 46 selama tahun 2020.

Tabel 3.31.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 6 (KEENAM)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,50	53,07	49,50	93,27	60,77	65,56	107,88	85,79

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kesepuluh yaitu cakupan layanan infrastruktur dan utilitas pada tahun 2019 adalah 53,07 persen terealisasi sebesar 49,50 persen dengan capaian 93,27 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan target sebear 60,77 persen terealisasi sebesar 65,56 persen atau dengan capaian sebesar 107,88 persen. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan, sebagai berikut:

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi jalan di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya

Tabel 3.32.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 7 (KETUJUH)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
7.	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Indeks kualitas air	43,24	37,75	38,27	101,27	38,30	39,60	103,40	43,38
		Indeks kualitas udara	91,27	80,7	76,84	95,21	80,72	84,51	104,70	91,45

	hidup	Indeks kualitas tutupan lahan	60,77	41,30	44,81	108,49	41,70	44,82	107,48	61,37

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kesebelas yaitu indeks kualitas air pada tahun 2020 dengan target 38,30 terealisasi sebesar 39,30 atau dengan capaian 103,40 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan target 37,75 terealisasi 38,27 atau dengan capaian 101,27 persen. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Jambi sedang giat-giatnya menjadikan danau Sipin sebagai temoat eco-wisata sehingga banyak dilakukan normalisasi dan pembersihan terhadap sampah maupun enceng gondok/gulma yang tumbuh di danau sipin, dan ini berdampak positif terhadap penambahan oksigen dalam air danau selanjutnya secara tidak langsung dapat mengurangi menurunkan beban pencemaran air danau. Disamping itu dilakukan upaya untuk mengurangi beban pencemaran air dengan melakukan pembangunan sarana prasarana fisik melalui kegiatan pembuatan *septictank* komunal ataupun instalasi pengolahan air limbahn (IPAL) komunal dan kegiatan SANIMAS oleh Dinas PUPR Kota Jambi dan Program Padat Karya Kali Bersih (PAKAR KASIH) yang dilakukan bersama oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat untuk mebersihkan kali atau anak sungai yang ada di Kota Jambi.

IKU kedua belas yaitu indeks kualitas udara pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 80,7 terealisasi 76,84 atau dengan capaian 95,21 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan target sebesar 80,72 terealisasi sebesar 84,51 atau dengan capaian 104,70 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sehingga tidak terjadi dampak kabut asap yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.

IKU ketiga belas yaitu indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2019 dengan target sebesar 41,30 terealisasi sebesar 44,81 atau dengan capaian

sebesar 108,49 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan target sebesar 41,70 terealisasi sebesar 44,82 atau dengan capaian sebesar 107,48 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 ada penambahan lahan untuk RTH Perumahan yang telah diserahkan kepada pihak Pemerintah Kota Jmbi sebesar 5,37 ha.

Tabel 3.33.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 8 (KEDELAPAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
8.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00	36,00	63,34	175,94	52,00	116,23	223,52	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU keempat belas yaitu persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan pada tahun 2019 dengan target sebesar 36,00 persen terealisasi 63,34 persen atau dengan capaian 175,94 persen mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan target sebesar 52,00 persen dengan realisasi 116,23 persen atau dengan 223,52 persen. hal ini disebabkan program dan kegiatan yang mendukung kepada ketercapaian kinerja sasaran sebagian besar realisasi kinerja program dan kegiatan sangat baik, walaupun pada program dan kegiatan tersebut umumnya anggaran dirasionalisasikan untuk kepentingan penanganan covid 19, disamping itu juga pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena masih adanya kekuatiran terhadap wabah virus 19.

Tabel 3.34.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 9 (KESEMBILAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	87,90	90,59	90,70	100,12	91,00	91,50	100,55	92,50

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kelima belas yaitu skor pola pangan harapan dapat dilihat pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 90,59 terealisasi 90,70 atau dengan capaian 100,12 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan target sebesar 91,00 terealisasi sebesar 91,50 atau dengan capaian sebesar 100,55 persen. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat di suatu wilayah semakin baik, dan kebutuhan pangan terpenuhi sesuai kebutuhan tubuh untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Tabel 3.35.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 10 (KESEPULUH)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35	2,35	2,38	100,42	2,38	2,29	96,22	2,41

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU keenam belas yaitu kontribusi pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2019 dengan target sebesar 2,35 persen terealisasi sebesar 2,38 persen dengan capaian 100,42 persen berdasarkan hasil data oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi sedangkan untuk tahun 2020 dengan target sebesar 2,38 persen terealisasi

sebesar 2,29 persen atau dengan capaian 96,22 persen, dimana penghitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

Tabel 3.36.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 11 (KESEBELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
11.	Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	4,00	8,00	16,09	201,13	9,00	-9,64	-107,11	9,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU ketujuh belas yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilihat pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 8,00 persen terealisasi 16,09 persen atau dengan capaian 201,13 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dengan target sebesar 9,00 persen terealisasi -9,46 persen atau dengan capaian -107,11 persen. Hal ini disebabkan terjadi karena pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan di beberapa sektor pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak reklame sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Tabel 3.37.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 12 (KEDUA BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
12.	Meningkatkan realisasi investasi	Realisasi investasi	410 M	430,5 M	1,055 T	245,12	430,5 M	249,4 M	68,39	523,37 M

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kedelapan belas yaitu realisasi investasi dapat dijelaskan pada tahun 2019 dengan target sebesar 430,5 Miliar terealisasi sebesar 1,055 Triliun atau dengan capaian 245,12 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dengan target sebesar 430,5 Miliar terealisasi sebesar 249,4 Miliar atau dengan capaian 68,39 Miliar. Hal ini dikarenakan adanya virus Covid 19 yang mengakibatkan turunnya nilaiperekonomian masyarakat sehingga mengakibatkan turunnya nilai investasi terhadap pelaku usaha.

Tabel 3.38.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 201920
SASARAN KE 13 (KETIGA BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	64,96	65,00	65,79	101,21	65,25	64,12	98,27	66,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kesembilan belas yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dijelaskan disini pada tahun 2019 dengan target sebesar 65,00 persen terealisasi sebesar 65,79 persen atau dengan capaian sebesar 101,21 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan target sebesar 65,25 persen terealisasi sebesar 64,12 persen atau dengan capaian 98,27 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 3,77 persen. Hal ini merupakan dampak pandemi Covid 19 yang sangat berimbas pada melemahnya roda perekonomian, terutama disektor usaha. Banyaknya karyawan yang di PHK/dirumahkan serta penutupan usaha, menjadi faktor tingginya pengangguran terbuka pada tahun 2020 ini.

Tabel 3.39.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 14 (KEEMPAT BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
14.	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61	8,08	8,08	100,00	8,54	8,54	100,00	10,00
		Persentase daya saing produk IKM	4,30	4,30	19,30	448,8	5,35	2,8	52,34	8,3
		Persentase koperasi berkualitas	13,00	16,06	16,50	102,73	19,27	19,73	101,46	36,70

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020(data diolah)

IKU kedua puluh yaitu persentase usaha mikro kecil yang berkualitas dapat dijelaskan pada tahun 2019 dengan target sebesar 8,08 persen terealisasi sebesar 8,08 persen atau dengan capaian 100 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan target sebesar 8,54 persen terealisasi sebesar 8,54 persen atau dengan capaian 100,00 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah UKM berkualitas sebanyak 50 UKM dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 870 UKM.

IKU kedua puluh satu yaitu persentase daya saing produk IKM, pada tahun 2019 dengan target sebesar 4,30 persen terealisasi sebesar 19,30 persen atau dengan capaian sebesar 448,8 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dengan target sebesar 5,35 persen terealisasi sebesar 2,8 persen atau dengan capaian 52,34 persen. Hal ini dikarenakan tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang terganggu akibat pandemic covid 19, sehingga sebagian besar anggaran dirasionalisasikan untuk penanganan covid 19, disamping itu pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal akibat kekuatiran penularan covid 19.

IKU kedua puluh dua yaitu persentase koperasi berkualitas dimana pada tahun 2019 dengan target 16,06 persen teralisasi sebesar 16,50 persen atau

dengan capaian 102,73 persen, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan terhadap capaian yaitu sebesar 101,46 persen tetapi terhadap realisasi daripada target mengalami peningkatan dengan target sebesar 19,27 terealisasi sebesar 19,73 persen. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target indikator ini yaitu koperasi yang diarahkan untuk mencapai kategori berkualitas, telah tertib melaksanaan administrasi pembukuan usaha, telah mengupayakan adanya kantor sekretariat, tetap melaksanakan RAT sesuai jadwal meskipun ditengah pandemi covid 19, dan mampu menyajikan laporan keuangan yang sehat.

Tabel 3.40.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 15 (KELIMA BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
15.	Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hdup (AHH)	72,34	72,35	-	-	72,35	72,65	100,41	72,37

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kedua puluh tiga yaitu angka harapan hidup pada tahun 2019 dan belum terealisasi dikarenakan belum dipublikasikan oleh Badan Statistik Pusat Kota Jambi dan pada tahun 2020 dengan target sebesar 72,35 persen terealisasi sebesar 72,65 persen atau dengan capaian 100,41 persen. Dimana penghitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

Tabel 3.41.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 16 (KEENAM BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
16.	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas	Harapan lama sekolah (HLS)	14,25	14,60	14,62	100,14	14,61	15,10	103,35	14,64

	pendidikan	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32	21,32	21,30	99,91	17,32	17,32	100,00	4,32
		Rata-rata lama sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,68	100,00	10,69	10,92	102,15	10,72

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kedua puluh empat yaitu harapan lama sekolah (HLS) dapat dijelaskan pada tahun 2019 dengan target sebesar 14,60 persen terealisasi sebesar 14,62 persen atau dengan capaian 100,14 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan target sebesar 14,61 persen terealisasi sebesar 15,10 persen atau dengan capaian sebesar 103,35 persen, dimana penghitungan data dilakukan oleh Badan Statistik Pusat Kota Jambi.

IKU kedua puluh lima yaitu persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan layanan pendidikan dapat dijelaskan disini dengan target sebesar 21,32 persen di tahun 2019 dan terealisasi sebesar 21,30 persen dengan capaian sebesar 99,91 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan target sebesar 17,32 persen terealisasi sebesar 17,32 persen atau dengan capaian sebesar 100,00 persen.

IKU kedua puluh enam yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dapat dijelaskan disini dengan target sebesar 10,68 persen di tahun 2019 dan terealisasi sebesar 10,68 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan target sebesar 10,69 persen terealisasi sebesar 10,92 persen atau dengan capaian sebesar 102,15 persen, dimana penghitungan data dilakukan oleh Badan Statistik Pusat Kota Jambi.

Tabel 3.42.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 17 (KETUJUH BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
17.	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	N/A	1,05	-	-	1,05	-	-	1,01
		Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	96,23	96,04	99,80	96,46	95,99	99,51	97,15

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kedua puluh tujuh yaitu laju pertumbuhan penduduk dapat dijelaskan disini pada tahun 2019 dan belum ada data capaian karena belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi begitu juga di tahun 2020 dengan target sebesar 1,05 belum terealisasi dikarenakan data belum dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

IKU kedua puluh delapan yaitu persentase jumlah keluarga sejahtera dapat dijelaskan disini dengan target sebesar 96,23 persen terealisasi sebesar 96,04 persen dengan capaian sebesar 99,80 persen pada tahun 2019 mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan target sebesar 96,46 persen terealisasi sebesar 95,99 persen atau dengan capaian sebesar 99,51 persen.

Tabel 3.43.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 18 (KEDELAPAN BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
18.	Meningkatkan kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	94,89	94,90	94,46	99,54	94,91	94,60	99,73	94,95
		Indeks pemberdayaan gender	68,07	68,10	69,83	102,54	68,20	69,83	102,39	68,50

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU kedua puluh sembilan yaitu indeks pembangunan gender dapat dijelaskan disini pada tahun 2019 dengan target sebesar 94,90 terealisasi sebesar

94,46 dengan capaian sebesar 99,54 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan target sebesar 94,91 terealisasi sebesar 94,60 atau dengan capaian 99,73 persen, dimana penghitungan indeks pembangunan gender dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

IKU ketiga puluh yaitu indeks pemberdayaan gender pada tahun 2019 dengan target sebesar 68,10 terealisasi sebesar 69,83 dengan capaian sebesar 102,54 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan target sebesar 68,20 terealisasi sebesar 69,83 dengan capaian 102,39 persen. Dapat dijelaskan disini walaupun capaian mengalami penurunan tetapi realisasi daripada target pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana penghitungan indeks pemberdayaan gender dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

Tabel 3.44.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 19 (KESEMBILAN BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
19.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00	70,00	70,00	100,00	80,00	80,00	100,00	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU ketiga puluh satu yaitu persentase hak anak yang terpenuhi dapat dijelaskan disini pada tahun 2019 dengan target sebesar 70,00 persen terealisasi sebesar 70,00 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen mengalami peningkatan target di tahun 2020 sebesar 80,00 persen terealisasi sebesar 80,00 persen atau dengan capaian sebesar 100,00 persen.

Tabel 3.45.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 20 (KEDUA PULUH)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	60,23	70,96	117,81	61,43	59,15	96,29	52,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020 (data diolah)

IKU ketiga puluh dua yaitu persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat dijelaskan disini pada tahun 2019 dengan target sebesar 60,23 persen terealisasi sebesar 70,96 persen dengan capaian sebesar 117,81 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan target sebesar 61,43 persen terealisasi sebesar 59,15 persen atau dengan capaian sebesar 96,29 persen. Hal ini disebabkan karena mewabahnya pandemi covid-19 sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan mengalami hambatan.

Tabel 3.46.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 21 (KEDUA PULUH SATU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
21.	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	Indeks pembangunan pemuda	50,00	50,00	-	-	50,50	-	-	52,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020(data diolah)

IKU ketiga puluh tiga yaitu indeks pembangunan pemuda dapat dijelaskan disini pada tahun 2019 dengan target sebesar 50,00 persen belum terealisasi dikarenakan belum dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi, begitu pula pada tahun 2020 dengan target 50,50 belum terealisasi dikarenakan Badan Pusat Statistik Kota Jambi belum mempublikasikannya.

Tabel 3.47.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2019 DAN 2020
SASARAN KE 22 (KEDUA PULUH DUA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2019			2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
22.	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60,00	65,00	25,26	38,86	70,00	67,26	96,09	85,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2020(data diolah)

IKU ketiga puluh empat yaitu persentase PMKS yang tertangani dapat dijelaskan disini pada tahun 2019 dengan target sebesar 65,00 persen terealisasi sebesar 25,26 persen dengan capaian 38,86 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan target sebesar 70,00 persen terealisasi sebesar 67,26 persen atau dengan capaian 96,09 persen. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah warga terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 2.016 warga terlantar.

1.4. PENDANAAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 DAN 2020

Dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah diarahkan dalam Prioritas Pembangunan dengan target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya, tentu saja tidak lepas dari masalah pendanaan. Sesuai dengan kemampuan daerah yang ada, Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menyusun alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.47. di bawah ini.

Pada awal perencanaan RPJMD 2018-2023 adalah Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan menggunakan alokasi dana APBD TA 2019 adalah sebesar Rp. 377.645.530.800,- atau sebesar 36,31 persen pada tahun 2019 dari total belanja langsung pada tahun

tersebut. Untuk tahun 2020 menggunakan alokasi sebesar Rp. 405.589.286.011,- atau sebesar 38,51 persen dari total belanja langsung pada tahun tersebut

Untuk prioritas kedua untuk awal perencanaan RPJMD 2018-2023 adalah Prioritas Peningkatan Kualitas SDM menggunakan alokasi dana APBD TA 2019 adalah sebesar Rp. 415.791.627.135,- atau sebesar 39,98 persen pada tahun 2019 dari total belanja langsung pada tahun tersebut.Pada tahun 2020 menggunakan alokasi sebesar Rp. 372.572.700.787,- atau sebesar 35,37 persen dari total belanja langsung pada tahun tersebut

Prioritas pembangunan ketiga yaitu penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan oleh APBD pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 223.876.115.739,- atau sebesar 21,53 persen 14.280.000.000,- atau sebesar 1,55 persen dari total belanja langsung daerah tahun 2019. Untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 257.121.415.410,- atau sebesar 24,41 persen dari total belanja langsung pada tahun tersebut.

Prioritas pembangunan keempat yaitu Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah menggunakan alokasi dana APBD TA 2019 adalah sebesar Rp. 15.847.089.000,- atau sebesar 1,52 persen pada tahun 2019 dari total belanja langsung pada tahun tersebut. Untuk tahun 2020 menggunakan anggaran sebesar Rp. 17.986.533.800,- atau sebesar 1,71 persen dari total belanja langsung pada tahun tersebut.

Tabel 3.48.

Alokasi APBD Per Prioritas Pembangunan Tahun 2019 dan 2020

NO	PRIORITAS PERIODE RPJMD 2018-2023	ALOKASI APBD-P 2019		PRIORITAS PERIODE RPJMD 2018-2023		ALOKASI APBD-P 2020	
		BL	%			BL	%
1	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN	377.645.530.800	36,31	1	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN	405.589.286.011	38,51
2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	415.791.627.135	39,98	2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	372.572.700.787	35,37
3	PENANGULANGAN KEMISKINAN	223.876.115.739	21,5.	3	PENANGULANGAN KEMISKINAN	257.121.415.410	24,41
4	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI DAERAH	15.847.089.000	1,52	4	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI DAERAH	17.986.533.800	1,71
TOTAL BELANJA LANGSUNG		**1.039.954.489.234**				**1.053.269.936.008**	

Sumber : Bappeda Kota Jambi. 2020 (Data Diolah)

3.5. AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2020

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 90,44% dari total anggaran yang dialokasikan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Secara lebih detail penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini.

3.5.1. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Realisasi PAD sebesar Rp. 355.695.658.212,28 dari target sebesar Rp. 369.594.193.000,00
- Dari komponen PAD, penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 40.479.596.103,50 dari target sebesar Rp. 36.618.000.000,00 Sedangkan penerimaan terkecil berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 216.970.081.307,00 dari target sebesar Rp. 232.060.000.000,00.
- Jika dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan sumber dana ekstern (DAU, DAK, Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan dana penyesuaian), Tingkat Kemandirian Daerah **35,44** persen, Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri masih rendah. Hal ini berdasarkan kategori yang

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, tapi secara teknis pendapatan asli daerah Kota Jambi melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 101,15 persen.

2) Dana Perimbangan

- Sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan adalah realisasi sebesar Rp. 1.036.458.974.832,00 dengan target sebesar Rp. 1.033.221.759.182,00
- Dari komponen Dana Perimbangan ini, penyumbang terbesar adalah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 99.720.170.995,00 melebihi target sebesar Rp. 87.667.936.000,00 sedangkan yang terkecil adalah Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 249.254.139.837,00 dari target sebesar Rp. 254.829.051.182,00.

Tabel 3.49.
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	369.594.193.000,00	355.695.658.212,28	96,24
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	232.060.000.000,00	216.970.081.307,00	93,50
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	36.618.000.000,00	40.479.596.103,50	110,55
1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	9.602.267.383,48	96,02
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.916.193.000,00	88.643.713.418,30	97,50
2	DANA PERIMBANGAN	1.033.221.759.182,00	1.036.458.974.832,00	100,31
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87.667.936.000,00	99.720.170.995,00	113,75
2.2	Dana Alokasi Umum	690.724.772.000,00	687.484.664.000,00	99,53
2.3	Dana Alokasi Khusus	254.829.051.182,00	249.254.139.837,00	97,81
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	214.842.462.532,00	229.693.482.529,90	106,91
3.1	Pendapatan Hibah	75.761.804.500,00	73.208.658.746,00	96,63
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 2)	97.614.609.032,00	115.018.774.783,90	117,83
3.3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	37.746.049.000,00	37.746.049.000,00	100,00
3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.617.658.414.714,00	1.621.848.115.574,18	101,15

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. 2020.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Dari Komponen penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah, penyumbang terbesar adalah Dana bagi hasil dari provinsi sebesar Rp 115.018.774.783,90, dari target sebesar Rp. 97.614.609.032,00.

3.5.2. Belanja Daerah

Dalam rangka perhitungan SAB (Standar Analisis Belanja), anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dapat dilihat tabel 3.49 berikut:

Tabel 3.49. menunjukkan:

a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.667.849.788.841,45 atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp 1.828.835.334.125,00,-. Komposisi belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal dan belanja tak terduga. Realisasi belanja tidak langsung ini dipergunakan:
   - Realisasi belanja operasi yang terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 628.395.170.421,00 atau 92,33% dari anggaran sebesar Rp 680.603.063.244,00 belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah.
   - Belanja hibah sebesar Rp. 19.888.786.667,53 atau 76,54% dari anggaran sebesar Rp. 25.985.781.492,00.

- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 7.637.723.000,00 atau 74,26% dari anggaran sebesar Rp. 7.637.723.000,00.
- Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp. - atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00.
- Belanja tidak terduga sebesar Rp. 41.044.082.130,00 atau 68,14% dari anggaran sebesar Rp. 60.238.830.381,00.

b. Rata-rata realisasi komponen belanja operasi dibawah 100%, dari belanja operasional tersebut realisasi belanja yang terkecil adalah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp. - dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00.

c. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 444.351.878.183,92 atau 97,55% dari anggaran sebesar Rp. 455.528.193.595,00

Realisasi Belanja Modal ini dipergunakan:

- Realisasi belanja modal yang terbesar dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan (konstruksi/pembelian) bangunan yaitu sebesar Rp 118.264.854.583,00 atau 97,54% dari anggaran sebesar Rp. 121.241.985.741,00
- Realisasi belanja modal yang terkecil dipergunakan untuk membiayai kegiatan peralatan industri kecil dan menengah yaitu sebesar Rp 91.000.000,00 atau 98,91% dari anggaran sebesar Rp. 92.000.000,00.

d. Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp. 41.044.082.130,00 atau sebesar 68,14% dari Total Rp. 60.238.830.381,00.

Tabel 3.50.
Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%
	BELANJA DAERAH			
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	775.565.398.117,00	694.999.439.218,53	89,61
1.1	BELANJA PEGAWAI	680.603.063.244,00	628.395.170.421,00	92,33
1.2	BELANJA HIBAH	25.985.781.492,00	19.888.786.667,53	76,54
1.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.637.723.000,00	5.671.400.000,00	74,26
1.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000,00	-	-
1.5	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.238.830.381,00	41.044.082.130,00	68,14
2	BELANJA LANGSUNG	1.053.269.936.008,00	972.850.349.622,92	92,36
2.1	BELANJA PEGAWAI	66.106.459.381,00	59.787.279.570,00	90,44
2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	531.635.283.032,00	468.711.191.869,00	88,16
2.3	BELANJA MODAL	455.528.193.595,00	444.351.878.183,92	97,55
JUMLAH BELANJA		1.828.835.334.125,00	1.667.849.788.841,45	90,98

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. 2020.

3.5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.50 berikut ini.

Berdasarkan perhitungan APBD tahun anggaran 2020 tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi disimpulkan sebagai berikut:

a. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.617.658.414.714,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.621.848.115.574,18 atau 101,15% dari target. Disisi lain, belanja dianggarkan sebesar Rp. 1.828.835.334.125,00 direalisasikan sebesar Rp. 1.667.849.788.841,45 atau 90,98% dari anggaran.

b. Dari anggaran defisit sebesar (211.176.919.411,00) dan realisasikan defisit sebesar (46.001.673.267,27) atau sebesar (21,78%).

Tabel 3.51.
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PENDAPATAN DAERAH	1.617.658.414.714,00	1.621.848.115.574,18	101,15
2	BELANJA DAERAH	1.828.835.334.125,00	1.667.849.788.841,45	90,98
	SURPLUS/(DEFISIT)	(211.176.919.411,00)	(46.001.673.267,27)	(21,78)
3	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	211.176.919.411,00	211.176.919.411,12	100,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	211.176.919.411,00	211.176.919.411,00	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN DAERAH (SILPA)		-	165.175.246.143,85	-

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Kota Jambi. 2020

c. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif yaitu dapat melampaui target pendapatan dan sekaligus melakukan penghematan (menekan) realisasi belanja (efisiensi).

d. Dalam tahun anggaran 2020, pada kegiatan pembiayaan terdiri dari penerimaan yang ditargetkan Rp. 211.176.919.411,00 dapat direalisasikan sebesar 100% dari target penerimaan pembiayaan dimaksud, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak ada sama sekali baik target maupun realisasi.

e. Realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp. 211.176.919.411,00 atau 100,00%, pada tahun anggaran 2020 didapatkan SILPA dari jumlah anggaran sebesar Rp. 165.175.246.143,85.

3.6. PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA JAMBI SELAMA TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

Walikota Jambi yaitu Bapak H. SYARIF FASHA, ME dan Wakil Walikota Jambi yaitu Bapak DR. Dr. H. MAULANA, MKM merupakan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode kepemimpinan Tahun 2018-2023 yang dilantik pada tanggal 7 November 2018. Tahun 2020 merupakan tahun ketiga berjalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan beliau.

1.	**PENGHARGAAN PRESTASI PENCAPAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP LEVEL 3 DARI BPKP RI**

Pemerintah Kota Jambi raih penghargaan atas Prestasi Pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP level 3 dari BPKP RI diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP RI Provinsi Jambi Rudi Mahani Harahap, AK., M.M. P.hd kepada Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, M.E bertempat di Aula Griya Mayang pada tanggal 22 Januari 2020.

2. PENGHARGAAN PARTISIPASI DAN PEDULI LUNAS PEMBAYARAN REKENING LISTRIK TAHUN 2019

Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME menerima piagam penghargaan Lancar Pembayaran Rekening Listrik yang langsung diserahkan oleh General Manager PT. PLN (Persero) UIW S2JB, bertempat di Ruang Utama Kantor Walikota Jambi pada tanggal 4 Februari 2020.

3. PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 DENGAN PREDIKAT "B"

Pemerintah Kota Jambi kembali berhasil mempertahankan nilai B, atas laporan akhir evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2019, dengan skor penilaian yang meningkat lebih tinggi dibanding SAKIP tahun 2018, pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP wilayah I Tahun 2019, di Kota Batam, Kepualauan Riau, Senin tanggal 10 Februari 2020. Dalam acara apresiasi tersebut, Walikota Jambi Dr. H.Syarif Fasha, ME, menerima langsung hasil evaluasi SAKIP dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo.

4. PENGHARGAAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESI TAHUN 2019 DENGAN NILAI "A" (MEMUASKAN)

Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME, meraih penghargaan dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Peringkat Memuaskan (Nilai A) berdasarkan hasil pengawasan tahun 2019. Penghargaan tersebut diserhakan langsung oelh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), Tjahjo Kumolo, didampingi oleh Plt Kepala ANRI M Taufik, kepada Wali Kota Fasha, bertempat di Sunan Hotel, Kota Solo pada tanggal 26 Februari 2020.

Tercatat, 103 (seratus tiga) lembaga kementerian, non kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang menerima penghargaan pengelolaan kearsipan untuk tahun 2020 ini. Dari 103 (seratus tiga) tersebut terdiri dari 23 Kemeneterian pengelolaan arsip terbaik, kemudian 20 lembaga di luar kementerian, serta 15 provinsi dan juga 45 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kota Jambi pun menempati peringkat ke-32 dalam penghargaan ini dan satu-satunya Pemda Provinsi Jambi yang meraih penghargaan ini.

5. PENGHARGAAN KARYA BHAKTI PEDULI SATPOL PP

Walikota Jambi menerima penghargaan nasional, Karya Bhakti Peduli Satpol PP pada puncak acara HUT ke-70 Satpol PP dan HUT ke-58 Satlinmas, yang berlangsung di Eks Bandara Selaparang, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selasa pagi tanggal 3 Maret 2020. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof.H.M Tito Karnavian, Ph.D. kepada Wali Kota Fasha.Tercatat, hanya 6 orang kepala daerah yang mendaatkan penghargaan bergengsi di tingkat nasional tersebut, diantaranya Gubernur NTB, Sumatera Selatan, Bali, Walikota Jambi, Walikota Mataram dan Bupati Lebak.

6. PENGHARGAAN TOP DIGITAL INNOVATION AWARD 2020

Pemerintah Kota Jambi kembali mendapat penghargaan bergengsi dibidang Smart City (Kota Pintar). Kota Jambi dibawah dut kepemimpinan Dr.H. Syarif Fasha, ME dan DR.dr. H. Maulana dianugerahkan penghargaan top digital innovation award 2020, untuk kategori “Top Strategy and Leadership In Government 2020”, oleh kelompok media terkemuka dibidang IT, Majalah ITECH dan portal berita itechmagz.id.

Mengangkat tema “digital Innovation For Excellent Performance”, oenyerahan penghargaan dibidang IT tersebut dilaksanakan berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu diserahkan secara virtual Tele-Awarding Video Conference oleh Menristek/BRIN, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro melalui siaran televisi, bertempat di TVRI Studio 4 Senayan Jakarta, pada tanggal 29 April 2020 lalu.

Yang membanggakan adalah Kota Jambi satu dari hanya 3 Pemerintah Daerah yang mendapat penghargaan ini. Selain itu terdapat 1 Kementerian, 2 Lembaga, dan 33 Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta yang mendapatkan penghargaan diajang Penganugerahan bergengsi Top Digital Innovation Award 2020 ini.

7. PENGHARGAAN LOMBA INOVASI DAERAH TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID 19

Pada acara penyerahan yang dilangsungkan secara virtual yang turut diapresiasi Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C) K.H Ma'ruf Amin. Kota Jambi sukses meraih Juara Terbaik III Nasional untuk inovasi Protokol Kesehatan pada sektor Restoran Covid-19, selain dianugerahi piagam penghargaan, Pemerintah Kota Jambi juga berhasil meraih hadiah dana insentif daerah (DIDI) sebesar 1 Milyar Rupiah.

8. PENGHARGAAN INOVASI TOP 99 KEMENPAN RB UNTUK INOVASI BANGKIT BERDAYA

Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Tele-Awarding, Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih TOP 99 untuk inovasi Bangkit Berdaya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Penilaian dilakukan melalui presentasi tanya jawab dengan panelis yang hampir diikuti semua tokoh nasional, para profesor, dan para ahli yang berdiskusi untuk menggali lebih dalam seberapa besar inovasi yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Jambi melalui Program Bangkit Berdaya via daring/online menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Wawancara yang dilakukan tim juri mengapresiasi Program Bangkit Berdaya yang digagas oleh Walikota Jambi, Dr. H. Syarif Fasha sejak tahun 2014 sampai sekarang. Diketahui angka yang didapat meningkat, dari 300 jutaan dan sekarang sudah 9 milyar lebih.

9. PENGHARGAAN BPK RI ATAS OPINI WTP PEMERINTAH KOTA JAMBI

Selasa, 30 Juni 2020 Pemerintah Kota Jambi telah melakukan acara yang digelar melalui video conference. Acara ini digelar berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi tahun 2019 silam yang telah meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Apresiasi terkait kinerja keuangan ini didapatkan Pemerintah Kota Jambi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Dengan meraih predikat opini WTP, hal ini telah menjadi bukti kompetensi Pemerintah Kota Jambi.

Predikat opini WTP ini telah disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Yuan Candra Djaisin, kepada Walikota Jambi, Dr. H. Syarif Fasha, ME.

10.	**PENGHARGAAN ICSB INDONESIA AWARD 2020 (PENGHARGAAN NATAMUKTI)**

Tahun kedua, Kota Jambi kembali meraih penghargaan Natamukti yaitu apresiasi kepada Kepala Daerah yang peduli majukan UMKM di daerah.

Bertempat di IPB International Convention Center, Kota Bogor pada tanggal 7 Oktober 2020, Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME menerima penghargaan Natamukti Award Tahun 2019. Pengahragaan tingkat nasional itu, merupakan kali keduanya diterima oleh Walikota Jambi, sejak tahun 2018 lalu.

Selain itu, yang paling membanggakan adalah Kota Jambi merupakan satu-satunya Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jambi yang berhasil meraih penghargaan tingkat nasional tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Prof. Rully Indrawan, bersama President of ICSB (International Council For Small Business), yang juga merupakan CEO Mark Plus Inc., Hermawan Kartajaya.

11. PENGHARGAAN MENKEU RI ATAS OPINI WTP PEMERINTAH KOTA JAMBI

4 (empat) kali beruntun raih WTP, kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Jambi terus diapresiasi Pemerintah Pusat yang telah sukses dalam kepiawaiannya mengelola akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

Bertempat di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, atas nama pemerintah pusat, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Walikota oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Kemenkeu Provinsi Jambi, Supendi.

12. PENGHARGAAN KEMENDAGRI ATAS KINERJA SANGAT TINGGI TERHADAP CAPAIAN LPPD DAN EKPPD

Jakarta, tanggal 11 November 2020 Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, atas capaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKP) Kota Jambi Tahun 2019 dengan perolehan status Kinerja Sangat Tinggi (skor 3,4420).

Skor tersebut menempatkan Kota Jambi pada peringkat 8, daerah tertinggi secara nasional kategori kota yang membanggakan, Kota Jambi seolah telah melakukan lompatan besar dalam urusan pemeringkatan tersebut. Dimana, pada tahun sebelumnya Kota Jambi berada pada peringkat 53 nasional.

Perolehan nilai tinggi tersebut diraih Kota Jambi, berdasarkan proses monitoring dan evaluasi menyeluruh dari Kemendagri, yang ditujukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerinah daerah dalam menerapkan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Walaupun tidak diterima langsung oleh dirinya dai Mendagri Tito Karnavian, Walikota Jambi H. Syarif Fasha mengaku bangga dan bersyukur atas apresiasi bergengsi tingkat nasional bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah seluruh Indonesia tersebut.

13. PIAGAM INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2020 KATEGORI KOTA SANGAT INOVATIF

Pemerintah Kota Jambi kembali meraih penghargaan tingkat nasional, Piala dan Piagam Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri RI dengan kategori Kota Sangat Inovatif.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bapak Wakil Walikota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM yang mewakili Bapak Walikota Jambi pada malam penganugerahan IGA 2020 di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2020.

14. PENGHARGAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

Kota Jambi kembali meraih penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia untuk tahun 2019 serta pelayanan publik berbasis HAM pada puncak acara peringatan ke-72 Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia tahun 2020 secara virtual, bertempat di Aula Kanwil KemenkumHam Jambi, pada tanggal 13 Desember 2020.

15. PENGHARGAAN NIRWASITA TANTRA

Pada tahun 2020 ini, penghargaan Nirwasita Tantra sangat selektif diberikan oleh Kementerian LHK RI. Tercatat hanya 2 Pemerintah Provinsi dan 9 Pemerintah Kabupaten (masing-masing 3 daerah kategori Kabupaten Besar, Sedang dan Kecil) dan 9 Pemerintah Kota se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini (masing-masing 3 daerah kategori Kota besar, sedang dan kecil). Kota Jambi masuk dalam kategori Kota Sedang bersama Kota Cimahi dan Kota Ambon.

Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinanya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

BAB 4
PENUTUP

Bab 4 Berisi :
Kesimpulan dari Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi ini merupakan sarana untuk introspeksi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Selain itu diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan terutama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan serta dapat memberikan manfaat bagi proses penyusunan rencana di masa mendatang.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan berbagai urusan pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Daerah Kota Jambi. Di masa mendatang Pemerintah Daerah Kota Jambi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama.

Secara umum dari 34 rasio indikator kinerja utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Jambi di tahun 2020, sebagian besar telah mencapai target dengan persentase capaian lebih atau sama dengan 91 masuk dalam

kategori **SANGAT TINGGI** sebanyak 26 indikator (76,47 persen), dalam kategori **SEDANG** sebanyak 2 indikator (5,88 persen) dan 6 Indikator (17,65 persen) yang sampai dengan akhir masa evaluasi ini belum dapat di evaluasi. Secara rekapitulasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KATEGORI	INDIKATOR KINERJA UTAMA (BUAH)	PERSENTASE (%)
1.	≥ 91	SANGAT TINGGI	26	76,47
2.	76 ≤ 90	TINGGI	0	0
3.	66 ≤ 75	SEDANG	2	5,88
4.	51 ≤ 65	RENDAH	0	0
5.	≤ 50	SANGAT RENDAH	0	0
6.	TIDAK DAPAT DIEVALUASI		6	17,65
	JUMLAH		**34**	**100**

Dari hasil rekapitulasi pencapaian target IKU tahun 2020 yang belum sesuai target dan masuk dalam kategori sedang adalah realisasi investasi dengan persenatse capaian sebesar 68,39 persen dan persenstase daya saiung produk IKM dengan capaian sebesar 52,34 persen. IKU yang belum dapat mencapai realisasi sesuai target akan menjadi catatan dan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Jambi yang disebabkan oleh mewabahnya pandemi covid-19 pada tahun 2020.

Selain itu keberhasilan maupun kekurangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi tidak terlepas pula dari adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2020 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di tahun 2021. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun 2020 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari

solusinya, sehingga visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi dapat dicapai pada akhir masa jabatannya.

Namun demikian hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut umumnya telah dapat diatasi dengan menggunakan daya dukung dan kemampuan organisasi yang ada. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Jambi akan meningkatkan dan mempersiapkan strategi-strategi pemecahan yang lebih efektif sehingga tahun – tahun mendatang hambatan maupun kendalanya dapat diminimalisir sedini mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi selama tahun 2020 dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Jambi, Maret 2021

WALIKOTA JAMBI

Dr.H.SYARIF FASHA, ME

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA JAMBI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H.SYARIF FASHA, ME

Jabatan : Walikota Jambi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjianini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Jambi, Januari 2020

WALIKOTA JAMBI

Dr. H.SYARIF FASHA, ME

No.	PROGRAM	APBD 2020		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	118.123.994.980	4.989.005.020	**123.113.000.000**
2.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	189.734.119.850	11.268.495.150	**201.002.615.000**
3.	Perencanaan teknis ke-PU an	9.205.601.000	4.604.408.400	**686.400.000.000**
4.	Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai	30.108.210.000		
5.	Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	525.813.660.600		
6.	Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	115.028.058.000		
7.	Fasilitasi, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	1.640.062.000		
8.	Pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan	1.476.799.600	2.091.413.900	**30.168.000.000**
9.	Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	1.635.144.400		
10.	Peningkatan pemeliharaan dan penataan utilitas umum	24.964.642.100		
11.	Penyelenggaraantrantibum, serta penegakan regulasi daerah	5.230.918.400	1.803.362.800	**7.813.000.000**
12.	Pembinaan dan perlindungan masyarakat	778.718.800		
13.	Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan	8.154.513.000	2.178.487.000	**10.333.000.000**
14.	Penanggulangan kemiskinasn dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	3.700.000.000	2.135.000.000	**5.835.000.000**
15.	Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	1.320.130.000	2.369.415.250	**5.197.000.000**
16.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	808.454.750		
17.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	699.000.000		
18.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.532.825.000	3.996.134.350	**58.250.000.000**
19.	Perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam	10.068.318.000		
20.	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	41.652.722.650		
21.	Pentaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3.644.199.000	4.525.801.000	**8.170.000.000**
22.	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	3.673.428.550	3.018.971.450	**9.167.000.000**
23.	Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	2.474.600.000		
24.	Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	5.226.476.250	2.572.523.750	**7.799.000.000**
25.	Peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan	7.560.474.000	4.292.658.000	**17.637.000.000**
26.	Pengendalian dan peningkatan disiplin berlalu lintas	2.089.850.000		
27.	Peningkatan pelayanan perparkiran	3.694.018.000		
28.	Peningkatan akses dan kualitas informasi publik	4.060.388.000	2.324.738.000	**6.500.000.000**
29.	Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	74.124.000		
30.	Manajemen data/informasi/statistik daerah	40.750.000		
31.	Peningkatan realisasi investasi	569.024.000	3.323.609.000	**4.541.000.000**
32.	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	648.367.000		
33.	Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	7.178.703.120	1.635.296.880	**8.814.000.000**
34.	Peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan	950.629.100	2.657.230.825	**5.592.000.000**
35.	Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1.984.140.075		
36.	Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan kebudayaan	1.408.750.000	1.931.800.000	**8.832.000.000**
37	Pembinaan, peningkatan dan pengelolaan pariwisata	5.491.450.000		

No.	PROGRAM	APBD 2020		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
38	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan tani	838.100.000	3.465.640.000	**8.151.000.000**
39.	Peningkatan produksi, mutu produk, dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	3.847.260.000		
40.	Pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan	1.912.897.500	4.831.097.500	**9.277.385.000**
41.	Pembinaan dan peningkatan industri kecil menengah	2.533.390.000		
42.	Peningkatan sistem pengawsan internal, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.867.345.000	2.022.655.000	**4.890.000.000**
43.	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1.978.975.000	4.122.860.000	**6.782.000.000**
44.	Penelitian dan pengembangan	680.165.000		
45.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset	7.940.881.550	5.426.750.450	**13.367.632.000**
46.	Peningkatan dan pengelolaan penapatan daerah	3.256.735.000	4.561.265.000	**7.818.000.000**
47.	Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	5.071.942.750	4.121.057.250	**9.193.000.000**
48.	Peningkatan kerjasama daerah	804.000.000	16.165.695.000	**54.700.000.000**
49.	Penataan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	1.068.000.000		
50.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	6.067.000.000		
51.	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparatur dan keprotokolan	3.840.805.000		
52.	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	782.000.000		
53.	Tata kelola administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa	2.166.000.000		
54.	Fasilitas dan koordinasi kegiatan dan kelembagaan keagamaan	9.761.000.000		
55.	Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	1.097.500.000		
56.	Tata kelola organisasi dan ketatalaksanaan	1.117.000.000		
57.	Penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan	11.831.000.000		
58.	Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD	30.609.185.000	15.124.815.000	**45.734.000.000**
59.	Pelayanan umum kecamatan	2.721.093.600	19.135.607.118	**90.887.000.000**
60.	Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	9.254.172.582		
61.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	18.279.779.100		
62.	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	41.496.347.600		
63.	Peningkatan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	908.596.000	1.426.404.000	**2.835.000.000**
64.	Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkemas dan parpol	500.000.000		
TOTAL		**1.316.676.434.907**	**142.122.197.093**	**1.458.798.632.000**

Jambi, 2020

WALIKOTA JAMBI

Dr. H.SYARIF FASHA, ME

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H.SYARIF FASHA, ME

Jabatan : Walikota Jambi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Jambi, 2020

WALIKOTA JAMBI

Dr. H.SYARIF FASHA, ME

No.	PROGRAM	APBD-P 2020		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	120.881.460.304	4.575.502.270	**125.456.962.574**
2.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	211.961.610.375	10.685.194.435	**222.646.804.810**
3.	Perencanaan teknis ke-PU an	11.291.945.750	3.826.622.400	**299.913.518.000**
4.	Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai	32.545.906.000		
5.	Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	135.512.259.850		
6.	Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	115.263.603.000		
7.	Fasilitasi, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	1.473.181.000		
8.	Pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan	1.388.424.600	1.918.913.900	**33.009.495.000**
9.	Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan	1.441.754.400		
10.	Peningkatan, pemeliharaan dan penataan utilitas umum	28.260.402.100		
11.	Penyelenggaraan trantibum, serta penegakan regulasi daerah	5.132.918.400	1.485.753.190	**7.066.207.390**
12.	Pembinaan dan perlindungan masyarakat	447.535.800		
13.	Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan	9.212.135.500	1.729.359.000	**10.941.494.500**
14.	Penanggulangan kemiskinasn dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2.508.483.250	1.937.290.000	**4.445.773.250**
15.	Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	962.730.000	1.898.177.050	**3.709.555.300**
16.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	417.754.750		
17.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	430.893.500		
18.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.043.676.000	3.796.262.511	**57.806.992.111**
19.	Perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam	8.584.359.000		
20.	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	43.382.694.600		
21.	Pentaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.727.503.000	3.394.433.000	**6.121.936.000**
22.	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	2.057.700.050	2.819.693.782	**6.427.436.432**
23.	Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	1.550.042.600		
24.	Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	4.405.248.500	2.120.223.600	**6.525.472.100**
25.	Peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan	6.236.159.500	3.682.875.400	**14.859.280.900**
26.	Pengendalian dan peningkatan disiplin berlalu lintas	1.693.093.500		
27.	Peningkatan pelayanan perparkiran	3.247.152.500		
28.	Peningkatan akses dan kualitas informasi publik	3.375.342.000	1.684.688.000	**5.102.280.000**
29.	Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	25.000.000		
30.	Manajemen data/informasi/statistik daerah	17.250.000		
31.	Peningkatan realisasi investasi	372.414.000	2.444.818.000	**3.224.024.000**
32.	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	406.792.000		
33.	Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	3.618.081.700	1.601.542.816	**5.219.624.516**
34.	Peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan	788.629.100	2.099.098.825	**4.186.447.800**
35.	Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1.298.719.875		
36.	Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan kebudayaan	912.750.000	1.525.260.800	**9.336.917.800**
37	Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan pariwisata	6.898.907.000		

No.	PROGRAM	APBD-P 2020		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
38	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan tani	384.492.500	3.236.512.000	**6.544.068.250**
39.	Peningkatan produksi, mutu produk, dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	2.923.063.750		
40.	Pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan	1.464.921.000	3.966.635.200	**7.127.805.700**
41.	Pembinaan dan peningkatan industri kecil menengah	1.696.249.500		
42.	Peningkatan sistem pengawsan internal, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.744.590.000	1.429.266.000	**4.173.856.000**
43.	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1.016.975.000	3.634.880.000	**5.128.520.000**
44.	Penelitian dan pengembangan	476.665.000		
45.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset	9.214.103.548	5.195.946.144	**14.410.049.692**
46.	Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah	1.838.125.000	3.587.467.000	**5.425.592.000**
47.	Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	3.171.338.750	3.112.625.250	**6.283.964.000**
48.	Peningkatan kerjasama daerah	679.295.000	15.793.653.625	**49.105.174.325**
49.	Penataan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	1.148.247.200		
50.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	6.147.825.000		
51.	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparatur dan keprotokolan	2.434.605.000		
52.	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	601.818.500		
53.	Tata kelola administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa	1.903.974.000		
54.	Fasilitas dan koordinasi kegiatan dan kelembagaan keagamaan	9.285.910.000		
55.	Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	1.313.500.000		
56.	Tata kelola organisasi dan ketatalaksanaan	1.141.951.000		
57.	Penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan	8.654.395.000		
58.	Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD	29.316.104.000	15.453.145.000	**44.769.249.000**
59.	Pelayanan umum kecamatan	2.105.237.600	18.551.904.333	**82.183.405.058**
60.	Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	5.653.765.582		
61.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	25.464.417.538		
62.	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	30.408.080.005		
63.	Peningkatan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	642.619.500	1.163.072.000	**2.118.029.500**
64.	Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkemas dan parpol	312.338.000		
TOTAL		**924.919.120.477**	**128.350.815.531**	**1.053.269.936.008**

Jambi, 2020

WALIKOTA JAMBI

Dr. H.SYARIF FASHA, ME

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA JAMBI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H.SYARIF FASHA, ME

Jabatan : Walikota Jambi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjianini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Jambi, Januari 2021

WALIKOTA JAMBI

Dr. H.SYARIF FASHA, ME

No.	PROGRAM	APBD 2021		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Perencanaaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.444.994.116	7.209.200.114	**10.865.242.896**
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.465.495.247		
3.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	745.553.419		
4.	Kepegawaian Daerah	2.575.878.850	22.748.522.251	**28.195.115.340**
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.870.714.239		
6.	Pengelolaan Keuangan Daerah	29.467.424.142	9.484.798.205	**40.168.643.025**
7.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.216.420.678		
8.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.513.254.976	21.896.029.308	**25.409.284.284**
9.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	292.499.672	4.423.778.465	**7.670.961.027**
10.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.590.944.654		
11.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	801.267.796		
12.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	412.515.440		
13.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	149.955.000		
14.	Pengelolaan Pendidikan	142.058.880.134	314.039.859.346	**456.451.284.123**
15.	Pengembangan Kurikulum	319.380.058		
16.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	33.164.585		
17.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.589.230.557	227.632.926.591	**287.329.308.026**
18.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	349.556.917		
19.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	368.537.970		
20.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	389.055.991		
21.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	32.291.938.320	12.801.254.942	**654.500.160.616**
22.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	57.782.580.000		
23.	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.406.837.550		
24.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.583.728.790		
25.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.297.304.490		
26.	Pengembangan Permukiman	56.064.546.320		
27.	Penataan Bangunan Gedung	294.873.827.740		

No.	PROGRAM	APBD 2021		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
28.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	131.752.099.600		
29.	Penyelenggaraan Jalan	51.575.765.250		
30.	Pengembangan Jasa Konstruksi	2.484.277.857		
31.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.585.999.757		
32.	Pengembangan Perumahan	806.021.206	6.754.387.164	**41.075.361.552**
33.	Kawasan Permukiman	5.896.761.754		
34.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum PSU)	27.618.191.428		
35.	Pemberdayaan Sosial	1.310.539.374	5.587.416.180	**10.371.810.000**
36.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	89.864.240		
37	Rehabilitasi Sosial	1.618.864.630		
38	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.048.741.604		
39.	Penanganan Bencana	716.383.972		
40.	Pengendalian Penduduk	245.713.237	4.335.223.508	**10.134.512.308**
41.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.494.642.464		
42.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.058.933.099		
43.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	685.255.185	5.011.924.360	**10.922.004.616**
44.	Perlindungan Perempuan	485.107.261		
45.	Peningkatan Kualitas Keluarga	168.951.590		
46.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	282.101.733		
47.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	305.283.114		
48.	Perlindungan Khusus Anak	571.677.622		
49.	Pemeberdayaan Lemabaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	3.411.703.751		
50.	Perencanaan Lingkungan Hidup	831.279.855	10.359.100.061	**62.642.887.000**
51.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.397.570.164		
52.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	7.291.417.193		
53.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	35.393.630		
54.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	318.039.260		

No.	PROGRAM	APBD 2021		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
55.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	325.404.234		
56.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.564.700		
57.	Pengelolaan Persampahan	42.029.117.903		
58.	Pendaftaran Penduduk	187.800.697	8.031.878.382	**11.377.426.528**
59.	Pencatatan Sipil	304.980.994		
60.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.820.191.495		
61.	Pengelolaan Profil Kependudukan	32.574.960		
62.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.707.487.549	13.230.159.110	**25.137.495.732**
63.	Pengelolaan Pelayaran	199.849.073		
64.	Aplikasi Informatika	3.604.776.849	4.978.337.828	**14.186.145.000**
65.	Informasi dan Komunikasi Publik	5.473.045.903		
66.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	76.259.850		
67.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53.724.570		
68.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	556.518.674	4.959.005.803	**7.675.207.000**
69.	Penempatan Tenaga Kerja	376.476.056		
70.	Hubungan Industrial	349.983.968		
71.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	39.999.870		
72.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	26.641.854		
73.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	391.862.244		
74.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	212.519.559		
75.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	596.199.044		
76.	Pengembangan UMKM	165.999.928		
77.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	94.574.800	5.974.080.591	**8.013.939.856**
78.	Promosi Penanaman Modal	453.304.779		
79.	Pelayanan Penanaman Modal	892.232.509		
80.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	533.747.557		
81.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	65.999.620		

82.	Pembinaan Perpustakaan	1.142.749.638	7.101.953.289	**9.283.500.540**
83.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	49.404.740		
84.	Pengelolaan Arsip	978.762.230		
85.	Perlindungan dan penyelematan Arsip	10.630.643		
86.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.263.784.500	4.612.487.084	**19.244.784.452**
87.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12.147.110.968		
88.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.221.401.900		
89.	Pengembangan Kebudayaan	1.368.738.196	4.692.162.767	**9.287.484.000**
90.	Pengembangan Kesenian Tradisional	149.645.130		
91.	Pembinaan Sejarah	24.989.670		
92.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.653.169.751		
93.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	304.499.626		
94.	Pemasaran Pariwisata	1.094.278.860		
95.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	137.237.000	8.994.736.240	**13.594.113.240**
96.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.066.560.632		
97.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	688.237.000		
98.	Pengembangan Ekspor	91.576.000		
99.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	163.225.368		
100.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	911.000.000		
101.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	311.500.000		
102.	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	106.075.000		
103.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	123.966.000		
104.	Penanggulangan Bencana	1.125.647.998	8.261.900.049	**13.615.304.480**
105.	Penanggulangan Kebakaran	4.227.756.433		
106.	Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	741.071.478	14.346.776.326	**18.974.319.712**
107.	Penanganan Kerawanan Pangan	73.749.946		
108.	Pengawasan Pengamanan Pangan	176.650.864		
109.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	62.489.954		

No.	PROGRAM	APBD 2021		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
110.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.795.283.880		
111.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	141.620.369		
112.	Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	652.917.845		
113.	Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	248.099.646		
114.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	532.020.209		
115.	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	97.639.500		
116.	Penyuluhan Pertanian	105.999.695		
117.	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	1.168.675.821	11.285.934.787	**12.454.610.608**
118.	Penyelenggaraan Pengawasan	2.414.850.000	8.768.703.424	**11.581.238.424**
119.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	397.685.000		
120.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.011.923.250	46.697.545.614	**73.709.468.864**
121.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	26.538.938.800	34.853.566.119	**64.756.504.640**
122.	Perekonomian dan Pembangunan	3.363.999.721		
123.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	0	**19.797.942**
124.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-		
125.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-		
126.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-		
127.	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.797.942		
TOTAL		**1.055.084.816.245**	**737.467.897.964**	**1.792.552.714.209**

Jambi, 2021

WALIKOTA JAMBI

Dr. H.SYARIF FASHA, ME